

ISBN 978-602-7584-14-3

Migrasi dan Urbanisasi di JABODETABEK :

**Tinjauan Empiris dan
Aplikasi Kebijakan**



**Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

MIGRASI DAN URBANISASI DI JABODETABEK: Tinjauan Empiris dan Aplikasi kebijakan



**Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2012**

MIGRASI DAN URBANISASI DI JABODETABEK: Tinjauan Empiris dan Aplikasi kebijakan

Penanggung Jawab
Drs. Suyono Hadinoto, MSc

Penulis
Rani Toersilaningsih
Chotib Hasan
Triasih Jutaharta

Editor
Tim Ditdamduk

Diterbitkan oleh :
**Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

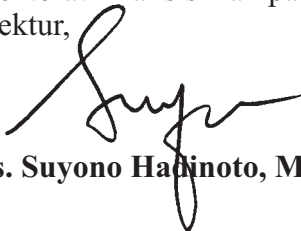
Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya buku Migrasi dan Urbanisasi di Jabodetabek dapat tersusun dan tersajikan. Buku ini merupakan buku dengan isu spesifik mengenai permasalahan dan dampak kependudukan dari fenomena migrasi dan urbanisasi di wilayah Jabodetabek.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami permasalahan dampak kependudukan dan memberi pemahaman mengenai sebab-sebab dan konsekuensi dari migrasi maupun urbanisasi, khususnya di wilayah Jabodetabek. Perubahan distribusi penduduk dan aktifitas ekonomi menjadi hal penting dalam kerangka evaluasi kebijakan, dan intervensi yang perlu dilakukan guna menciptakan keseimbangan pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan.

Kami menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisan dan penyusunan buku ini, untuk itu dengan senang hati kami menerima masukan yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan dan penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga hasilnya dapat bermanfaat.

Jakarta, Desember 2012
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Direktur,



Drs. Suyono Hadinoto, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Studi	6
1.3 Metodologi.....	6
1.4 Ruang Lingkup	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Urbanisasi	9
2.1.1 Konsep Perkotaan 1961	9
2.1.2 Konsep Perkotaan 1971	10
2.1.3 Konsep Perkotaan 1980 dan 1990	11
2.1.4 Konsep Perkotaan 2000	13
2.2 Migrasi Desa - Kota	16
BAB III GAMBARAN SOSIO- EKONOMI JABODETABEK	23
3.1 Sejarah Jabodetabek	23
3.2 Kondisi Kependudukan.....	28
3.3 Kondisi Perekonomian	31
3.3.1 Kondisi Makro Ekonomi Jabodetabek	31
3.3.2 Kondisi Ketenagakerjaan Jabodetabek	34
BAB IV POLA MIGRASI MASUK DAN URBANISASI	57
4.1 Perbedaan Pengertian Migrasi Dan Urbanisasi	57
4.2 Faktor Penentu Migrasi	59
4.3 Migrasi Masuk di Wilayah Jabodetabek	62
4.4 Urbanisasi di Jabodetabek	72
4.5 Kebijakan Pemerintah	76

BAB V DAMPAK MIGRASI DAN URBANISASI	79
5.1 Dampak Terhadap Kondisi Demografi dan Sosial	79
5.2 Dampak Ekonomi	83
5.3 Dampak Terhadap Lingkungan	84
5.4 Dampak terhadap Pertahanan Dan Keamanan	91
 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	 97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Rekomendasi Kebijakan	99
 DAFTAR PUSTAKA	 101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah penduduk perkotaan dunia tahun 1950-2025	1
Tabel 1.2 Jumlah penduduk perkotaan di 12 kota besar di Indonesia	3
Tabel 1.3 Kawasan metropolitan di Indonesia.....	5
Tabel 2.1 Sistem skoring untuk menentukan desa perkotaan tahun 1980.....	12
Tabel 2.2 Sistem skoring untuk menentukan desa perkotaan tahun 2000.....	15
Tabel 2.3 Konsekuensi migrasi terhadap daerah penerima	21
Tabel 2.3 Konsekuensi migrasi terhadap daerah pengirim	22
Tabel 3.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Jabodetabek 1971-2010	30
Tabel 3.2 PDRB per kapita HB Jabodetabek 2005-2009	32
Tabel 3.3 Laju pertumbuhan PDRB Kab-Kota menurut HK 2000, 2005-2009	33
Tabel 3.4 PDRB kabupaten kota se-Jabodetabek harga berlaku 2005-2009	34
Tabel 3.5 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan Jabodetabek 2008 - 2010	35
Tabel 3.6 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan Jabodetabek 2008 – 2010 (lanjutan)	36
Tabel 3.7 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha di Jabodetabek 2008 - 2010.....	38
Tabel 3.8 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha di Jabodetabek 2008 – 2010 (lanjutan).....	39
Tabel 3.9 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan Jabodetabek 2008 -2012	42
Tabel 3.10 Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan Jabodetabek 2008 -2012 (lanjutan).....	43

Tabel 3.11	Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan 2008-2012	45
Tabel 3.12	Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan 2008-2012(lanjutan)	46
Tabel 3.13	Rata-rata upah berdasarkan pendidikan di Jabodetabek 2008-2010	48
Tabel 3.14	Rata-rata upah berdasarkan pendidikan di Jabodetabek 2008-2010 (lanjutan)	49
Tabel 3.15	Rata-rata upah berdasarkan jenis pekerjaan 2008-2010	51
Tabel 3.16	Rata-rata upah berdasarkan lapangan usaha di Jabodetabek 2008-2011	52
Tabel 3.17	Rata-rata upah berdasarkan status pekerjaan di Jabodetabek 2008-2011	54
Tabel 3.18	Rata-rata upah berdasarkan status pekerjaan di Jabodetabek 2008-2011	55
Tabel 4.1	Trend jumlah pemudik, arus balik dan pendatang baru ke provinsi DKI Jakarta 2004 - 2012	67
Tabel 4.2	Penduduk urban yang datang ke wilayah kota Tangsel pasca idul fitri 2011	68
Tabel 4.3	Jumlah pendatang yang masuk ke kota Tangerang	69
Tabel 4.4	Jumlah pendatang yang masuk ke kota Bogor	71
Tabel 4.5	Proyeksi jumlah dan proporsi penduduk perkotaan	73
Tabel 4.6	Jumlah penduduk dan persentase penduduk perkotaan di Jabodetabek.....	75
Tabel 5.1	Jumlah pelaku komuter di Jabodetabek	80
Tabel 5.2	Peristiwa kriminalitas Jabodetabek tahun 2006 dan 2008	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema keputusan bermigrasi menurut model Todaro	20
Gambar 2. Jumlah penduduk DKI Jakarta.....	28
Gambar 3. Distribusi wilayah asal migran tenaga kerja ke Bodetabek (SUPAS 2005).	63
Gambar 4. Persentase migran risen masuk ke wilayah Bodetabek (SP 2010).	66
Gambar 5. Kontribusi tiap sektor kegiatan terhadap total emisi pencemar spesifik di Jabodetabek, 2008	88

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Migrasi dan urbanisasi merupakan manifestasi langsung dari proses pembangunan ekonomi dalam ruang (*space*), khususnya yang berkaitan dengan tahapan globalisasi kontemporer. Pemahaman mengenai sebab-sebab dan konsekuensi dari migrasi maupun urbanisasi dalam konteks perubahan distribusi penduduk dan aktifitas ekonomi, menjadi hal penting dalam kerangka evaluasi kebijakan yang selama ini ada serta intervensi yang perlu dilakukan guna mengatasi keseimbangan pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan.

Migrasi dan urbanisasi di negara-negara berkembang secara historis memiliki kaitan dengan stagnasi dan volatilitas sektor pertanian serta kurangnya diversifikasi sektoral dalam ekonomi pertanian. Penurunan pertumbuhan di sektor pertanian, baik dalam produksi maupun pendapatan petani, telah memberikan dampak pada kurangnya kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Demikian juga dengan rendahnya penyediaan infrastruktur di sektor public berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi keluar dari perdesaan. Setelah di perkotaan, banyak di antara para migran kemudian terserap ke dalam sektor ekonomi informal perkotaan.

Tabel 1. 1.
Jumlah Penduduk Perkotaan Dunia tahun 1950 -2025 (dalam jutaan)

Wilayah	1950	1960	1070	1980	1995	2000	2025*)
Dunia	724	1012	1352	1807	2584	3208	5065
Negara Maju	449	573	698	834	875	965	1040
Negara Berkembang	275	439	654	972	1709	2101	4025
Afrika	32	50	83	133	250	331	804
Latin Amerika	68	107	162	241	358	431	601
Asia	218	342	407	596	1101	1291	2615

Sumber:

1. United Nation, *Pattern of Urban and Rural Population Growth* (1980).
2. Pii Eina Berghall, *Habitat II and the Urban Economy: A Review of Recent Developments and Literature* (1995)
3. World Resources Institute, *World Resources, 1996-97. The Urban Environment* (1996)
4. Proyeksi Penduduk 1995

Jumlah penduduk perkotaan di dunia menunjukkan peningkatan yang luar biasa sejak tahun 1950 sampai dengan 2025. Pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh arus migrasi desa-kota, pertumbuhan alamiah di daerah perkotaan maupun reklasifikasi daerah perdesaan menjadi perkotaan. Di dunia sendiri pada tahun 1995 sebanyak 724 juta penduduk tinggal di perkotaan. Angka ini terus meningkat dengan cepat dan diproyeksikan mencapai 5 milyar lebih penduduk yang tinggal di perkotaan. Jika diperhatikan menurut negara maju dan negara berkembang, peningkatan jumlah penduduk perkotaan lebih cepat di negara-negara berkembang yaitu dari hanya 275 juta pada tahun 1995 diproyeksikan menjadi 4 milyar lebih pada tahun 2025 (Tabel 1).

Di Indonesia, pada tahun 2025 nanti diproyeksikan sekitar 60% penduduk tinggal di daerah perkotaan, dan pulau Jawa akan menjadi kampung kota terbesar di dunia yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi di bagian timur. Jika ini benar terjadi maka akan terjadi implikasi yang luar biasa baik implikasi sosial, ekonomi, keamanan, politik dan lingkungan. Dalam hal lingkungan, kebutuhan akan air bersih meningkat cepat sementara cadangan air bersih yang tersedia semakin berkurang sebagai akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk perkotaan di 12 kota besar di Indonesia dimana Jakarta masih menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar sebanyak 9.607.787 jiwa disusul oleh Surabaya, Bandung dan Bekasi. Dalam konteks JABODETABEK sebagai sebuah kawasan megapolitan, jumlah penduduk wilayah ini menjadi sangat luar biasa besarnya yaitu sekitar 17,7 juta.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perkotaan di 12 Kota Besar di Indonesia, 2010

Kota	Jumlah Penduduk
Jakarta	9,607,787
Surabaya	2,765,487
Bandung	2,394,873
Bekasi	2,334,871
Medan	2,097,610
Tangerang	1,798,601
Depok	1,738,570
Semarang	1,555,984
Palembang	1,455,284
Makassar	1,338,663
Tangerang Selatan	1,290,322
Batam	1,137,894

Sumber: BPS, 2011

Jumlah penduduk Jakarta tersebut menjadi kota terbesar didunia urutan keempat sesudah Seoul (10.321.449 jiwa), Mumbai (9.900.000 jiwa), Brazil (9.839.436 jiwa). Penduduk Jakarta masih berada diatas kota Moscow (9.000.000 jiwa), Mexico (8.591.309 jiwa) dan Shanghai (8.205.598 jiwa). Bisa dibayangkan kondisi DKI Jakarta yang padat, sesak dan rapat dan bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan perilaku penduduknya.

Selain kelahiran dan kematian, migrasi merupakan salah satu komponen demografi yang mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk di suatu wilayah atau negara. Migrasi adalah perpindahan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu, karena faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan. Selain faktor fisik, faktor sosial, faktor demografis dan faktor kultural berupa tradisi merantau, yang paling utama sebagai pendorong bermigrasi adalah faktor ekonomi yaitu keinginan untuk mencari pekerjaan dan kesejahteraan.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara merupakan tujuan utama bermigrasi sejak jaman kemerdekaan. Namun sejak tahun 1990-an DKI Jakarta mengalami pergeseran migrasi yang semula sebagai daerah penerima migran, berubah menjadi daerah pengirim migran (Chotib, 1998). Angka migrasi keluar dari DKI Jakarta dengan daerah tujuan utamanya adalah Jawa Barat

(70,0 persen) dan Jawa Tengah (12,2 persen), lebih tinggi daripada angka migrasi masuknya, sehingga migrasi neto DKI Jakarta menjadi negatif. Para migran yang pergi ke Jawa Barat sebagian besar ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka tertarik dengan pemukiman-pemukiman baru yang dibangun di wilayah tepi tersebut, ditambah lagi dengan adanya kesempatan kerja khususnya sektor industri.

Hal ini merupakan gejala pergeseran fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) atau yang disebut dengan *urban sprawl*, yaitu proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar (Giyarsih, 2001). Gejala ini muncul karena DKI Jakarta sebagai ibukota negara mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi, penduduknya padat, dan bangunan-bangunan semakin banyak sehingga mengakibatkan kota tersebut tidak mampu menampung lebih banyak penduduk lagi.

Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan kota-kota besar ditandai dengan proses urbanisasi dan industrialisasi, yang berakibat pada pemekaran wilayah dengan membentuk koridor-koridor perkotaan (Firman, 1996). Perubahan luas kawasan perkotaan kemudian membentuk konurbasi, yaitu bergabungnya beberapa kota yang membentuk kawasan kota yang lebih luas yang dikenal sebagai kawasan metropolitan (*metropolitan area*).

Proses terjadinya konurbasi tidak lepas dari makin maraknya penduduk kota inti yang berpindah tempat tinggal menuju daerah pinggiran kota. Dengan kata lain, proses urbanisasi yang berlangsung di kawasan metropolitan tidak hanya terjadi di pusat kota, melainkan terjadi *spill over* ke daerah pinggiran kota. Pada perkembangan yang lebih lanjut, terjadi kejenuhan tinggal di pusat kota (terutama sebagian golongan masyarakat kelas menengah dan atas) yang mengalihkan tempat tinggalnya di pinggir kota. Menurut Hariyono (2007), pada tahap tertentu dengan kondisi yang berbeda mereka kembali ke pusat kota dengan gejala kota dipenuhi dengan apartemen, perumahan eksklusif, rumah toko, dan rumah susun.

Sedangkan menurut Silver (2008), gejala semacam ini lebih disebabkan karena adanya “dekonsentrasi planologis”, terutama setelah diberlakukannya Inpres no. 13/1976 yang menetapkan bahwa Kota dan Kabupaten Bogor, yang berlokasi sekitar 60 km ke arah selatan Jakarta, kemudian Kabupaten/Kota Tangerang di sebelah barat, dan Kabupaten/Kota Bekasi di sebelah timur dirancang sebagai titik-titik simpul pengembangan daerah khusus ibukota yang terkoneksi dan menyatu dengan sistem jalan raya yang lebih modern.

Perkembangan Jakarta dan sekitarnya ini ternyata memberikan dampak terhadap perkembangan kota-kota metropolitan lain di Indonesia yang juga sebagai akibat adanya dekonsentrasi planologis tersebut.

Pada saat ini di Indonesia dikenal 7 (tujuh) kawasan metropolitan, yang masing-masing terdiri atas 1 daerah inti (kota metropolitan) dan beberapa daerah yang terintegrasi ke dalamnya. Berikut ini daftar kawasan metropolitan di Indonesia beserta wilayah integrasinya:

Tabel 1.3
Kawasan Metropolitan di Indonesia

Kawasan Metropolitan	Kota Metropolitan (Daerah Inti)	Wilayah yang Terintegrasi (Daerah sekitarnya)
Mebidang (Medan Binjai Deli Serdang)	Kota Medan	Kab. Deli Serdang Kota Binjai
JABODETABEK (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi)	Kota Jakarta	Kab. Bogor Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok Kab. Tangerang Kota Tangerang
Bandung Raya	Kota Bandung	Kab. Bandung Kab. Sumedang Kota Cimahi
Kedungsepur (Kendal Ungaran Semarang Purwodadi)	Kota Semarang	Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Kendal
Gerbangkertosusila (Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan)	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Lamongan Kota Mojokerto
Mamminasata (Makasar Maros Sungguminasa Takalar)	Kota Makasar	Kab. Takalar Kab. Goa Kab. Maros
Sarbagita (Denpasar Badung Gianyar Tabanan)	Kota Denpasar	Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Tabanan

Sumber: Handiyatmo (2009); Sahara (2010)

Sejalan dengan fakta-fakta di atas, maka perlu dilakukan kajian penulisan mengenai migrasi dan urbanisasi di salah satu wilayah metropolitan di atas, yaitu wilayah metropolitan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Untuk analisis yang lebih fokus, maka kajian ini dilakukan terhadap aspek migrasi dan urbanisasi dengan melihat tinjauan empiris serta dampak-dampaknya terhadap aspek kehidupan lainnya. Akan ditinjau pula implikasi kebijakan atas fakta-fakta empiris yang terjadi di wilayah metropolitan tersebut.

1.2. TUJUAN STUDI

Tujuan umum dari kajian ini adalah mengidentifikasi pola, arus dan volume migrasi serta proses urbanisasi di wilayah megapolitan JABODETABEK serta implikasi yang terjadi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan mobilitas penduduk.

1.3 METODOLOGI

Analisa implikasi migrasi dan urbanisasi di JABODETABEK ini akan dilakukan melalui dua metodologi utama yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode Kuantitatif pada dasarnya adalah melakukan assessment terhadap pola, proses migrasi dan urbanisasi di wilayah JABODETABEK serta faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak social ekonomi, politik, budaya, hankam daan lingkungan migrasi di wilayah JABODETABEK. Perubahan pola migrasi dan urbanisasi yang dipengaruhi oleh *push* dan *pull factor* serta kebijakan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam, untuk penyusunan kebijakan migrasi di masa depan. Perubahan pola migrasi dan proses urbanisasi terutama disebabkan oleh:

- (1) Perubahan komposisi penduduk JABODETABEK.
- (1) Bergesernya pola migrasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi social-ekonomi, budaya dan politik serta perubahan iklim dunia dan lingkungan
- (2) Karakteristik migran dari sisi demografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya serta
- (3) Kebijakan pemerintah yang mendorong proses migrasi menjadi lebih intens atau justru membatasi proses migrasi
- (4) Pembangunan ekonomi dan fasilitas pelayanan public termasuk transportasi dan komunikasi.

Adapun kebijakan pemerintah yang akan menjadi bahasan dalam kajian ini antara lain adalah:

- (1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola migrasi dan urbanisasi baik di tingkat nasional maupun JABODETABEK.
- (2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mobilitas penduduk dan pembangunan perkotaan

Langkah-langkah perhitungan untuk metode kuantitatif adalah sebagai berikut:

- (1) Mengolah data yang tersedia
- (2) Melakukan analisa gambaran umum pola migrasi dan proses urbanisasi

Adapun data yang akan dipakai bersumber dari:

- a. Susenas
- b. Sensus Penduduk berbagai tahun
- c. PotensiDesa (PODES)
- d. Data laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. ProyeksiPenduduk

Metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan Kota/Kabupaten se BODETABEK dan provinsi DKI Jakarta. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah setempat untuk penanganan migrasi dan urbanisasi serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif maupun analisa konten terhadap berbagai sumber data baik kuantitatif maupun kualitatif.

1.4 RUANG LINGKUP

Kajian ini akan meliputi meliputi:

- a. Trend urbanisasi di JABODETABEK
- b. Pola dan arus migrasi masuk ke JABODETABEK
- c. Factor-faktor yang mendorong maupun penarik migrant untuk masuk ke wilayah ini
- d. Implikasi dari dinamika migrasi terhadap kehidupan social, ekonomi, politik, hankamnas maupun lingkungan.

BAB II. TINJAUAN TEORETIS

2.1. PENGERTIAN URBANISASI

Dalam pengertian populer, urbanisasi selalu diterjemahkan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pengertian ini juga sering kali muncul dalam bahasan-bahasan ilmiah sekalipun. Namun jika kita lihat pengertian ini secara demografi, menurut Shrock dan Siegel (1976), urbanisasi merupakan suatu proses bertambahnya penduduk perkotaan. Bertambahnya proporsi penduduk perkotaan ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) Migrasi penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan; (2) pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri; dan (3) adanya reklasifikasi wilayah dari perdesaan ke perkotaan. Dengan demikian, secara demografis, urbanisasi tidak sama dengan migrasi dari perdesaan ke perkotaan, meski didalamnya terdapat proses migrasi perdesaan ke perkotaan.

Misalkan suatu daerah memiliki angka urbanisasi dari 30 persen pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 42 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu lima tahun daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar 12 persen. Angka 12 persen ini tidak berarti sama dengan terjadinya perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan sebesar 12 persen. Angka 12 persen merupakan hasil dari kombinasi tiga faktor penyebab urbanisasi yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini terlibat pula adanya faktor pertumbuhan alamiah (selisih antara angka kelahiran dan angka kematian) dan adanya reklasifikasi wilayah.

Reklasifikasi wilayah berarti terjadinya perubahan karakteristik suatu wilayah (biasanya desa) yang semula bersifat perdesaan menjadi perkotaan. Peningkatan urbanisasi bisa jadi disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah desa-desa yang berubah karakteristik dari perdesaan ke karakteristik perkotaan. Badan Pusat Statistik telah beberapa kali membuat definisi desa perkotaan, yaitu tahun 1961; tahun 1971; 1980 dan 1990; dan terakhir tahun 2000.

2.1.1. Konsep Perkotaan 1961

Menurut Bambang dan Ali (2001) penggolongan suatu desa menjadi daerah perkotaan dan perdesaan sangat diperlukan untuk komparasi spasial aspek-aspek kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi. Perbedaan desa

yang tergolong perdesaan dan desa yang tergolong perkotaan tidak hanya dicirikan oleh fisik lingkungan wilayah, tetapi ditunjukkan pula oleh perbedaan yang terlihat dari karakteristik sosial-ekonomi penduduk serta aksesibilitas terhadap fasilitas urban.

Dalam sejarah sensus penduduk Indonesia yang dilaksanakan setelah kemerdekaan, telah terjadi empat kali perubahan kriteria untuk menggolongkan apakah suatu desa dikategorikan sebagai perdesaan atau perkotaan. Perubahan tersebut dilakukan setiap menjelang sensus penduduk, kecuali tahun 1990 yang tetap memakai kriteria yang sama dengan tahun 1980 karena dianggap masih relevan.

Pada sensus penduduk 1961, konsep/definisi perkotaan sangat sederhana. Sebuah desa dikategorikan sebagai perkotaan jika dapat memenuhi salah satu kriteria dari tiga kriteria di bawah ini:

1. Desa tersebut terdapat di kotamadya.
2. Desa tersebut terdapat di ibu kota kabupaten.
3. Desa tersebut 80 persen atau lebih penduduknya bekerja di luar sektor pertanian, walaupun desa tersebut berada di luar kotamadya maupun ibu kota kabupaten.

Dengan demikian, pada tahun 1961 untuk mengkategorikan sebuah desa sebagai perkotaan hanya mempertimbangkan posisi kewilayahan desa tersebut dan sektor pekerjaan penduduknya, sedangkan keberadaan fasilitas urban/perkotaan di desa serta kemudahan mengakses fasilitas-fasilitas urban tersebut sama sekali belum dipertimbangkan sebagai variabel yang menentukan. Jadi, semua desa yang berada di kotamadya, berada di ibu kota kabupaten, serta desa-desa yang berada di luar kotamadya dan ibukota kabupaten tetapi 80 persen atau lebih penduduknya bekerja di luar sector pertanian dikategorikan sebagai desa perkotaan.

2.1.2. Konsep Perkotaan 1971

Tahun 1971, terjadi penyempurnaan konsep perkotaan. Keberadaan fasilitas perkotaan di desa seperti rumah sakit/klinik, sekolah, dan listrik mulai dipertimbangkan sebagai variabel yang menentukan apakah sebuah desa bisa dikategorikan sebagai perkotaan atau tidak. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan konsep perkotaan yang terakhir, batasannya masih relatif sederhana.

Pada sensus penduduk 1971, sebuah desa dikategorikan sebagai perkotaan jika dapat memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria di bawah ini:

1. Desa tersebut terdapat di kotamadya.
2. Desa tersebut terdapat di ibu kota kabupaten.
3. Desa tersebut 80 persen atau lebih penduduknya bekerja di luar sektor pertanian.
4. Desa tersebut 50 persen atau lebih penduduknya bekerja di luar sektor pertanian dan paling sedikit mempunyai tiga fasilitas perkotaan (rumah sakit/klinik, sekolah, dan listrik).

Jika kita mengikuti konsep di atas, maka yang dapat digolongkan sebagai desa perkotaan pada tahun 1971 adalah semua desa yang tergolong sebagai desa perkotaan pada sensus penduduk 1961 dan semua desa yang 50 persen atau lebih penduduknya bekerja di luar sektor pertanian asal desa tersebut paling sedikit memiliki tiga fasilitas perkotaan.

2.1.2. Konsep Perkotaan 1980 dan 1990

Penyempurnaan konsep perkotaan yang lebih progresif terjadi pada sensus penduduk 1980. Indikator posisi kewilayahan sebuah desa, apakah berada di kotamadya (sekarang disebut kota sebagai pengganti istilah kotamadya) atau di ibu kota kabupaten tidak lagi menjadi variabel yang menentukan untuk menggolongkan sebuah desa sebagai perkotaan. Sementara terhadap variabel lain yang dipakai, dilakukan teknik pengukuran dengan memberi skor ordinal secara linier, sehingga bisa dilakukan penilaian yang lebih cermat dan halus.

Variabel kepadatan penduduk per km² (KPD) diberi skor 1-10, mulai dari tingkat kepadatan kurang dari 500 orang per km² hingga 5.000 orang atau lebih per km². Pemberian skor 1-10 diberikan pula terhadap variabel persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian (PRT), mulai dari persentase di atas 95 persen hingga 25 persen atau kurang dari 25 persen.

Variabel fasilitas urban/perkotaan, indikatornya diperbanyak dari hanya tiga macam pada tahun 1971 menjadi 18 macam pada tahun 1980. Fasilitas perkotaan tersebut adalah: jalan aspal, bioskop, SD, SMP, SLTA, Rumah Sakit, BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), Puskesmas, telepon, Bank, lahan industri, pasar permanen, Rumah Makan, listrik, persewaan alat pesta, jarak ke kabupaten, dan angkutan umum. Skoring dilakukan berdasarkan jumlah

fasilitas perkotaan yang ada di desa. Nilai skor untuk variabel ini antara 2-10, mulai dari tidak memiliki fasilitas perkotaan hingga memiliki dengan jumlah 8 atau lebih fasilitas perkotaan.

Sistem skoring untuk menentukan kriteria perdesaan atau perkotaan tahun 1980 yang didasarkan pada tiga buah variabel utama yaitu: kepadatan penduduk per km² (KPD), persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian (PRT), dan jumlah fasilitas urban/perkotaan (JFU) dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Sistem Skoring untuk Menentukan
Desa Perkotaan Tahun 1980

KRITERIA			NILAI SKOR
KPD	PRT	JFU	
< 500	>95	-	1
500-999	91 – 95	0	2
1000 – 1499	86 – 90	1	3
1500 – 1999	76 – 85	2	4
2000 – 2499	66 – 75	3	5
2500 – 2999	56 – 65	4	6
3000 – 3499	46 – 55	5	7
3500 – 3999	36 – 45	6	8
4000 – 4999	26 – 35	7	9
≥000	≤5	8	10

Sumber: Bambang dan Ali (2001), Konsep Desa Perkotaan: Keterbandingan Antar Sensus

Keterangan: KPD = kepadatan penduduk per km²,

PRT = persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian,

JFU = jumlah fasilitas urban/perkotaan

Pada sensus penduduk 1980, sebuah desa dikategorikan sebagai perkotaan jika dapat memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Desa tersebut memiliki akumulasi skor dari tiga variabel (KPD+PRT+JFU) sebesar 21 atau lebih.

2. Desa tersebut memiliki akumulasi skor dari variabel KPD+PRT+JFU antara 19–21, asal memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Jarak dari desa ke desa terdekat yang tergolong perkotaan kurang dari 5 km, berdasarkan penilaian tim lapangan kondisi desa adalah perkotaan, dan prospek perkembangan desanya sedang.
 - b. Jarak dari desa ke desa terdekat yang tergolong perkotaan kurang dari 5 km, berdasarkan penilaian tim lapangan kondisi desa mendekati kondisi perkotaan, dan prospek perkembangan desanya cepat.

Desa-desanya lain yang memiliki akumulasi skor KPD+PRT+JFU kurang dari 19 pada sensus penduduk 1980 tidak dapat dikategorikan sebagai desa perkotaan, tetapi berstatus sebagai perdesaan.

Pada pelaksanaan sensus penduduk 1990, kriteria untuk menentukan desa perkotaan 1980 dianggap masih relevan, sehingga pada tahun 1990 tidak terjadi perubahan konsep, artinya konsep desa perkotaan yang dipakai pada sensus penduduk 1990 sama dengan sensus penduduk 1980. Akan tetapi pada sensus penduduk tahun 2000, kembali dirasakan perlu adanya perbaikan konsep perkotaan yang disesuaikan dengan terjadinya perkembangan wilayah.

2.1.3. Konsep Perkotaan 2000

Pada sensus penduduk 2000 dua variabel yang dipakai untuk menetapkan kriteria desa perkotaan pada tahun 1980 dan 1990 masih tetap digunakan, yaitu kepadatan penduduk per km² (KPD) dan persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian (PRT). Namun demikian ada modifikasi skoring terhadap kedua variabel tersebut. Skor untuk variabel KPD yang tadinya 1-10 menjadi 1-8, dengan rentang kepadatan penduduk mulai kurang dari 500 orang sampai 8.500 orang atau lebih per km². Demikian pula variabel PRT, rentang skor menjadi 1-8 dengan tingkat persentase rumah tangga pertanian antara 70 persen atau lebih sampai di bawah 5 persen.

Modifikasi yang lebih mendasar dilakukan terhadap variabel jumlah fasilitas urban/perkotaan (JFU) menjadi keberadaan dan akses terhadap fasilitas urban/perkotaan (AFU). Pada tahun 1980 dan 1990, fasilitas perkotaan diperhitungkan hanya berdasarkan jumlah yang ada di desa, sedangkan pada tahun 2000, selain keberadaannya di desa juga diperhitungkan kemudahan mengakses fasilitas perkotaan tersebut, dengan kriteria jarak

tertentu untuk masing-masing jenis fasilitas. Berdasarkan pada konsep di atas, sebuah desa yang punya fasilitas perkotaan akan diberi skor yang sama dengan desa yang tidak punya fasilitas perkotaan tetapi memiliki kemudahan untuk mengakses fasilitas perkotaan di desa lain.

Penentuan jarak yang dianggap mudah untuk mengakses fasilitas perkotaan tidak sama antar jenis fasilitas, tergantung pada modus dari jenis fasilitas tersebut. Menurut Bambang dan Ali (2001), berdasarkan hasil pendataan sebelumnya, sekitar 85 persen desa perkotaan telah memiliki SMP atau jarak ke SMP kurang dari 2,5 km. Maka, desa yang memiliki SMP atau jarak ke SMP terdekat kurang dari 2,5 km, pada penilaian tahun 2000 diberikan nilai yang sama yaitu skor 1 untuk variabel AFU.

Sistem skoring untuk menentukan kriteria perdesaan atau perkotaan tahun 2000 yang didasarkan pada tiga buah variabel utama yaitu: kepadatan penduduk per km² (KPD), persentase rumah tanggayang bekerja di sektor pertanian (PRT), dan keberadaan serta aksesibilitas terhadap fasilitas urban (AFU) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.2
Sistem Skoring untuk Menentukan Desa Perkotaan Tahun 2000

Variabel/Klasifikasi	Skor
(1)	(2)
Total Skor	
• Skor Minimum	2
• Skor Maksimum	26
1. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
• < 500	1
• 500 – 1 249	2
• 1 250 – 2 499	3
• 2 500 – 3 999	4
• 4 000 – 5 999	5
• 6 000 – 7 499	6
• 7 500 – 8 499	7
• 8 500 +	8
2. Persentase Rumah Tangga Pertanian	
• 70.00 +	1
• 50.00 – 69.99	2
• 30.00 – 49.99	3
• 20.00 – 29.99	4
• 15.00 – 19.99	5
• 10.00 – 14.99	6
• 5.00 – 9.99	7
• < 5.00	8
3. Akses Fasilitas Umum	0,1,2,...,10
A) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 2.5 Km	0
B) Sekolah Menengah Pertama	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 2.5 Km	0
C) Sekolah Menengah Umum	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 2.5 Km	0
D) Pasar	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 2 Km	0
E) Bioskop	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 5 Km	0
F) Pertokoan	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 2.5 Km	0
G) Rumah Sakit	
• Ada atau ≤ 2.5 Km	1
• > 5 Km	0
H) Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti pijat/Salon	
• Ada	1
• Tidak ada	0
I) Persentase Rumah Tangga Telepon	
• ≥ 8.00	1
• < 8.00	0
J) Persentase Rumah Tangga Listrik	
• ≥ 90.00	1
• < 90.00	0

Sumber: Bambang dan Ali (2001), Konsep Desa Perkotaan: Keterbandingan AntarSensus

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, kemungkinan skor minimal yang diperoleh adalah 2, yaitu ketika sebuah desa memiliki kepadatan penduduk kurang dari 500 orang per km², persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian masih berada pada angka 70 persen atau lebih, dan desa tidak bisa dengan mudah mengakses fasilitas urban. Sedangkan skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 26, manakala kepadatan penduduk per km² sudah mencapai 8.500 orang atau lebih, persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian kurang dari 5 persen, serta desa memiliki kemudahan akses terhadap semua fasilitas perkotaan.

Pada sensus penduduk 2000, sebuah desa dikategorikan sebagai perkotaan jika dapat memperoleh skor dari variabel KPD+PRT+AFU paling sedikit 10. Dengan demikian desa yang mencapai skor 10 atau lebih disebut desa perkotaan, sementara yang memperoleh skor kurang dari 10 dikategorikan sebagai perdesaan.

Dari pengertian urbanisasi yang berubah-ubah ini maka dapat dipastikan jika kita melakukan analisis tentang urbanisasi antar tahun atau antar negara, maka sesungguhnya tidak serta merta dapat diperbandingkan secara langsung. Karena tiap-tiap negara memiliki definisi urbanisasi yang berbeda-beda. Demikian juga untuk analisis urbanisasi di Indonesia, perbandingan antarwaktu pada suatu daerah membutuhkan kehati-hatian.

2.2. MIGRASI DESA-KOTA

Dari ketiga faktor penentu urbanisasi yang dijelaskan di atas, migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan merupakan faktor penting dalam peningkatan jumlah atau proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Kondisi penduduk dan variasi pembangunan antar daerah, terutama antara daerah perdesaan dan perkotaan memberikan dampak pada maraknya perpindahan penduduk ke perkotaan. Terlebih lagi dengan makin terbatasnya lapangan kerja di desa akibat menyempitnya lahan pertanian merupakan faktor pendorong utama orang-orang desa pergi ke kota.

Menurut Firman (1994), migrasi merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Pola migrasi di negara-negara berkembang biasanya sangat rumit (kompleks) menggambarkan keseimbangan ekonomi yang lebih seimbang dan kesalingtergantungan antarwilayah di dalamnya. Demikian juga migrasi menggambarkan keseimbangan aliran sumberdaya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

Pandangan tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan masih terbagi antara penilaian positif dan penilaian negatif. Menurut pandangan *neo-classical economic equilibrium* migrasi merupakan proses alamiah yang merupakan konsekuensi dari ketidakmerataan regional dalam memperoleh kesempatan fasilitas sosial dan ekonomi. Orang-orang dari daerah yang rendah fasilitas sosial dan ekonominya akan bergerak ke daerah-daerah yang tinggi fasilitas sosial dan ekonominya. Karenanya migrasi dinilai positif karena membantu memperbaiki ketidakseimbangan pertumbuhan regional. Artinya, migrasi memiliki peranan sebagai mekanisme untuk mencari keseimbangan antara daerah yang masih sedikit fasilitas pembangunannya dengan daerah yang banyak fasilitas pembangunannya.

Berdasarkan pandangan *historial-structural* pemahaman terhadap migrasi penduduk harus dihubungkan dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara luas. Menurut pendekatan ini, migrasi mempunyai dampak negatif terhadap proses pembangunan regional. Tenaga-tenaga terdidik dan potensial serta sumber-sumber kekuatan akan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu sehingga memperluas jurang perbedaan pertumbuhan antara daerah-daerah yang sudah tinggi tingkat pembangunannya dengan daerah yang masih tertinggal pembangunannya. Daerah yang ketinggalan sebagai pengirim migran akan tetap tertinggal.

Migrasi desa-kota merupakan gejala yang sangat kompleks dan harus diinterpretasikan secara cermat. Bukti-bukti dari Amerika Latin dan beberapa negara Asia menunjukkan bahwa tujuan kedatangan migran ke kota sangat bervariasi. Ada yang pindah ke kota sebagai langkah awal, ada yang pindah ke kota sebagai tahap akhir setelah pindah beberapa kali ke kota lain, dan ada yang pindah untuk sementara waktu (Findley, 1987).

Teori migrasi bermula dari hasil karya Ravenstein (Todaro, 1976) sebagai dasar karya-karya ilmuwan lainnya seperti Lee dan Zelinsky khususnya dalam hal penekanan aspek motif ekonomi sebagai penyebab utama migrasi. Di samping itu, teori migrasi juga muncul dari studi pembangunan ekonomi seperti yang diformulasikan oleh Lewis, yang kemudian dikembangkan oleh Fei dan Ranis. Migrasi dianggap sebagai “*equilibrating mechanism*” yang menjurus kepada keseimbangan antara sektor subsisten dengan sektor modern. Pada prinsipnya teori-teori tersebut tidak dibangun untuk menjelaskan niat bermigrasi tetapi menguraikan perilaku migrasi.

Model “*human capital*” pada prinsipnya didasarkan atas teori pembuatan keputusan individual, dengan menekankan aspek investasi dalam rangka peningkatan produktivitas manusia. Dalam model ini niat tersebut telah ditentukan oleh suatu usaha mencari kesempatan kerja yang lebih baik dan income yang lebih tinggi. Migrasi dianggap sebagai suatu bentuk investasi individu, yang diputuskan setelah yang bersangkutan terlibat dalam kalkulasi biaya dan manfaat. Pengembangan dari model tersebut tampak dalam karya Todaro (1976) dan Todaro (2003).

Kerangka analisis dalam Todaro (2003) menjelaskan keputusan individu untuk melakukan migrasi ditentukan oleh nilai-nilai faktor pendorong dan faktor penarik yang dimiliki oleh migran. Secara ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ekonomi adalah pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan ekonomi yang dihasilkan yang diperoleh dari upah/gaji, keuntungan, persewaan, bunga dan lain-lain. Apabila seseorang hanya bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai saja maka ia hanya akan mendapatkan salah upah/gaji.

Karakteristik ekonomi perdesaan cenderung bersumber pada sektor pertanian dalam arti luas, yang didalamnya tidak hanya sektor pertanian seperti pertanian tanaman pangan, dan tanaman perkebunan/kehutanan, melainkan juga sektor peternakan, dan sub sektor perikanan. Sektor ini ditandai oleh produktifitas yang rendah karena input-input yang digunakan bersifat tidak padat modal. Pendapatan yang rendah dan atau sumber pendapatan yang kurang bervariasi di wilayah perdesaan bisa menjadi faktor pendorong untuk melakukan migrasi ke daerah urban. Rendahnya kepemilikan lahan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rendahnya pendapatan di perdesaan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mampu mendorong kinerja perekonomian perdesaan bisa meningkatkan pendapatan di daerah pedesaan bisa menekan angka migrasi menuju daerah perkotaan.

Sistem sosial yang cukup kuat di perdesaan ikut menentukan keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Sistem sosial yang dimaksud seperti jaringan kekerabatan dan kekeluargaan yang cukup kuat antara kelompok/individu yang telah melakukan migran dengan individu/keluarga di daerah asal bisa mendorong seseorang untuk melakukan migran ke wilayah urban.

Karakteristik perekonomian perdesaan pada umumnya berkembang di sektor primer, terutama sektor pertanian. Sementara itu karakteristik

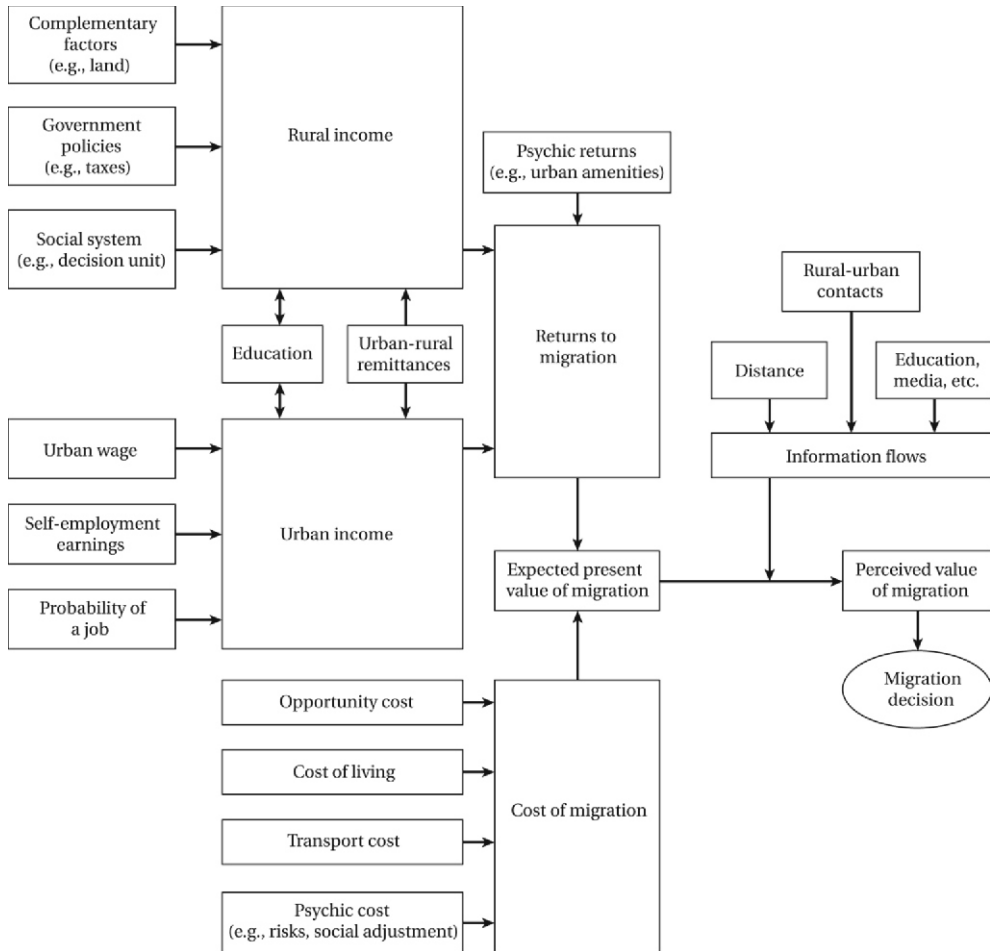
perekonomian perkotaan ditandai oleh berkembangnya sektor sekunder seperti industri pengolahan dan sektor tersier yang berkembang seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor keuangan. Kedua sektor ini —sektor industri pengolahan, dan sektor keuangan – identik dengan sektor yang mempunyai produktifitas yang tinggi. Dengan demikian karakteristik upah di perkotaan mempunyai upah yang lebih tinggi dan selanjutnya upah yang lebih tinggi di perkotaan bisa menjadikan faktor penarik migran dan selanjutnya akan meningkatkan angka urbanisasi. Seseorang tertarik untuk melakukan migrasi ke daerah urban karena mempunyai ekspektasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan yang didapatkan di perdesaan.

Kebijakan upah minimum cenderung diterapkan pada sektor-sektor formal dan lapangan pekerjaan non pertanian. Kebijakan upah minimum yang lebih banyak juga diterapkan di perkotaan ini turut mempengaruhi ekspektasi masyarakat untuk bekerja di perkotaan. Perbedaan Upah minimum antar wilayah juga bisa menjadi faktor penarik bagi migran untuk menuju ke wilayah JABODETABEK yang mempunyai upah minimum cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Tingkat pendidikan yang dimiliki ikut menentukan peluang untuk melakukan migrasi di perkotaan. Kesempatan pekerjaan yang lebih sedikit di perdesaan untuk sektor di luar pertanian atau sektor yang mempunyai produktifitas yang lebih tinggi mendorong tenaga kerja yang berpendidikan untuk melakukan migrasi ke perkotaan. Kesempatan kerja yang lebih terbuka di JABODETABEK untuk tenaga terampil dan atau tenaga ahli untuk memasuki sektor-sektor sekunder dan sektor tersier dengan upah yang lebih baik menjadi faktor penarik bagi angkatan kerja yang mempunyai pendidikan SLTA ke atas untuk migrasi masuk.

Pendapatan di perkotaan yang lebih tinggi juga meningkatkan ekspektasi angkatan kerja yang kurang berpendidikan untuk melakukan migran masuk ke JABODETABEK. Mereka yang tidak bisa masuk ke sektor formal akan masuk ke sektor informal dan cenderung di sektor perdagangan. Hal inilah yang menyebabkan tingginya pekerja sektor informal di DKI Jakarta.

Gambar 1
Skema Keputusan Bermigrasi menurut Model Todaro



Menurut Oberai (1972), migrasi memberikan beberapa dampak baik terhadap individu migran sendiri maupun keluarganya sebagai berikut:

- peningkatan pendapatan baik bagi individu maupun keluarganya (melalui remitan)
- Bagi keluarga yg ditinggalkan: dampak sosio-psikologis (fertilitas dan stabilitas perkawinan)
- Jika keluarga ikut bermigrasi: hilangnya kesempatan pendidikan bagi anak-anak

- Jika keluarga ikut bermigrasi: Hilangnya kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
- Perubahan kehidupan sosial (perilaku konsumtif/hemat, budaya, dll)
- Informasi tentang daerah lain yang lebih menarik

Sedangkan menurut Carr (1997), konsekuensi migrasi terhadap daerah pengirim dan daerah penerima dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Konsekuensi Migrasi terhadap Daerah Penerima

	Migrasi Sukarela		Migrasi Dukalara
	Kualitas rendah	Kualitas tinggi	Keluarga, Wanita dan Anak-anak
Demografi	Meningkatkan reproduksi dan pertumbuhan penduduk	Menambah jumlah penduduk, tetapi kelahiran rendah, keluarga kecil.	Peningkatan jumlah absolut, tetapi kecil kemungkinan meningkatkan angka kelahiran
Sosial	Dapat menciptakan dimensi etnis baru dengan konsentrasi budaya, ketegangan sosial	Kemungkinan besar berintegrasi dengan penduduk setempat, promosi inisiatif lokal.	Kecil kemungkinan berintegrasi dengan penduduk setempat, dengan mempertahankan budaya yg dibawa
Ekonomi	Surplus tenaga kerja, pengangguran meningkat, penciptaan sektor informal	Membawa gagasan dan ketrampilan, plus <i>consumer demand</i>	Tekanan ekonomi pada ekonomi keluarga miskin, tetapi dapat menjadi sumber tenaga kerja murah

Tabel 2.4
Konsekuensi Migrasi terhadap Daerah Pengirim

	Migrasi Sukarela		Migrasi Dukalara
	Kualitas rendah	Kualitas tinggi	Keluarga, Wanita dan Anak-anak
Demografi	Mengurangi tekanan penduduk, yang mayoritas penduduk usia muda dan reproduktif. Di daerah perdesaan angka kelahiran masih tinggi. Tapi, penurunan penduduk tua tidak sebesar yang diharapkan.		Peningkatan jumlah absolut, tetapi kecil kemungkinan meningkatkan angka kelahiran
Sosial	Umpan balik informasi, kembalinya para migran mengubah struktur sosial dan nilai-nilai yang berlaku. Mendorong pandangan keluar dan materialistis		Terpisahnya keluarga dan kehidupan komunitas
Ekonomi	Mengurangi tekanan ekonomi tetapi kehilangan penduduk usia muda. Penurunan produktivitas lahan, dan kekurangan tenaga kerja	Sangat merugikan, krn kehilangan tenaga kerja terdidik dan berketrampilan yg dibutuhkan dalam pembangunan. Kehilangan tk, dapat menghalangi investasi dari luar	Mengurangi tekanan penduduk, tetapi juga hilangnya penduduk yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.
Politik	Mengurangi kesetiaan lokal, dan memungkinkan munculnya dominasi dari kekuatan luar	Kehilangan suara pemilih pada proses demokratisasi	Memungkinkan kelangsungan instabilitas politik

BAB 3.

KONDISI SOSIO-EKONOMI JABODETABEK

JABODETABEK bukan hanya akronim dari Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi namun sebuah kawasan yang merupakan satu kesatuan tata ruang, ekonomi, politik, sosial dan pertahanan keamanan. Berkembangnya wilayah metropolitan (bahkan sudah menjadi megapolitan) JABODETABEK seperti juga Gerbang Kertasusila di Jawa Timur, Bandung Raya dan sekitarnya, Medan-Binjai-Batam dan Riau serta Makassar dan sekitarnya, yang merupakan suatu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berkembang dan menularkannya pada wilayah-wilayah sekitarnya.

Sejarah JABODETABEK merupakan sejarah yang panjang, yang telah dimulai sejak jaman Belanda sampai dengan masa kemerdekaan, dan merupakan suatu masalah nasional. JABODETABEK akan menjadi tolok ukur bagi pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan.

3.1. SEJARAH JABODETABEK

JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) merupakan sebuah kawasan megapolitan dimana DKI Jakarta merupakan wilayah atau kota inti dengan kota-kota di sekitarnya sebagai kota/kabupaten pendukung. Tahun 1965 Bung Karno meminta menteri pekerjaan umum pada saat itu untuk menyusun suatu rancangan pembangunan Jabotabek menjadi satu kawasan ekonomi. Namun sebenarnya konsep Jabotabek ini pertama kali diperkenalkan oleh Lambert J. Giebels dan Christ Rozerstraten (Suselo, 2011) ketika membantu pemerintah Indonesia untuk menangani perencanaan tatakota DKI Jakarta. Giebels menggunakan istilah Jabotabek hanya terbatas pada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Jakarta, termasuk wilayah pinggiran yang secara administrasi masuk ke wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Lambert J. Giebels (1986) menggunakan istilah Jabotabek bukan sekedar dari singkatan saja tetapi suatu perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam upaya menciptakan daerah-daerah penyerap limpahan kapasitas Kota Jakarta baik dari sisi penduduk, infrastruktur maupun perekonomian.

Giebles lebih lanjut mendesain jabotabek dengan menggunakan model linier karena, pertama model ini lebih cocok untuk pola kecenderungan perkembangan pembangunan di sepanjang radius Metropolitan Jakarta; kedua model linier tidak memaksa untuk mengembangkan sarana infrastruktur karena dianggap dalam satu garis yang dapat melayani lebih dari satu pusat, dan yang ketiga model ini dapat mendorong pusat-pusat kota yang berada di sekeliling kota “induk” DKI Jakarta untuk tumbuh menjadi metropolitan. Dengan mengacu model yang diajukan Giebles, Indonesia menetapkan Instruksi Presiden No 13 tahun 1976 tentang konsep pembangunan Jabotabek. Instruksi Presiden ini kemudian diikuti dengan Keputusan Bersama antara Gubernur DKI dengan Gubernur Jawa Barat No 1 dan 3 tahun 1976 untuk mengoperasikan Inpres tersebut.

Dengan ketentuan tersebut ditetapkan secara resmi bahwa Bogor, Tangerang dan Bekasi sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta. Ketiga wilayah ini dikembangkan untuk pemukiman, industri dan kantong air bagi kebutuhan air bersih penduduk di wilayah Jabotabek. Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan tata ruang yang terpadu agar wilayah ini berkembang bersama-sama dan sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun ternyata perencanaan tata ruang yang dibuat pada waktu itu tidak berjalan dengan baik karena terjadi percepatan perubahan penggunaan lahan. Tim Inpres No. 13/1976 menunjukkan, kewenangan di tingkat pusat diperlukan untuk perencanaan lintas daerah, terlebih lintas propinsi seperti Jabotabek. Selain itu, perlu disadari pula bahwa kewenangan sektoral instansi pemerintah pusat masih besar dan menentukan dalam pembangunan suatu wilayah seperti Jabotabek.

Dengan demikian, perlu koordinasi antarinstansi pusat dan sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Jabotabek tidak dapat ditangani hanya melalui kerja sama dua propinsi, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Memang kedua propinsi itu kemudian membentuk Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek (BKSP Jabotabek) untuk mengkoordinasikan perencanaan, namun kemampuan dan kewenangan BKSP Jabotabek terbatas untuk mengupayakan sinergi pembangunan kedua propinsi, menjadi wadah koordinasi antara instansi pusat yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh luas dalam pembangunan wilayah Jabotabek.

Wilayah Jabotabek ini kemudian berubah menjadi JABODETABEK ketika Depok yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bogor, masuk dan menjadi salah satu penyangga Jakarta. JABODETABEK sebenarnya diawali

dengan makin berkembangnya wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Hal ini terjadi sejak jaman penjajahan dulu DKI Jakarta yang dikenal sebagai Batavia telah ditetapkan sebagai ibukota wilayah jajahan, yang dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan. Sementara wilayah Sumatra dan Jawa Barat lebih dikembangkan sebagai sentra-sentra perkebunan baik teh, karet, kopi dan lain sebagainya. Sebagai pusat pemerintahan waktu itu Jakarta sudah didesain dengan berbagai sarana dan parasarana termasuk pembangunan kanal-kanal untuk mengatasi banjir karena letak Jakarta di bawah permukaan air laut. Kemudian sejak jaman kemerdekaan, DKI Jakarta berkembang dengan cepat, dan memicu terjadinya migrasi dari desa ke kota ini, terutama dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Jika pada sebelum kemerdekaan jumlah penduduk DKI Jakarta hanya sejumlah 533.000 jiwa pada tahun 1940 telah bertambah dengan cepat sejak kemerdekaan menjadi sekitar 1.753.600 jiwa pada tahun 1950, dan meningkat terus menjadi dua kali lipat pada tahun 1971 yaitu sebesar 4.546.492, dan akhirnya pada tahun 2010 telah berkembang menjadi 9.607.787 jiwa.

Menghadapi masalah kependudukan ini, pada tahun 1970-an Bang Ali Sadikin sebagai gubernur pada masa itu menetapkan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang. Kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan pembatasan-pembatasan untuk mengurus status kependudukan dengan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi pendatang seperti jaminan pekerjaan, jaminan tempat tinggal maupun uang jaminan bila orang yang bersangkutan gagal untuk berusaha atau bertempat tinggal di DKI Jakarta sebagai tabungan untuk kembali ke kampung halaman. Meskipun kebijakan tersebut gagal, namun peraturan daerah yang mengatur kependudukan tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut sampai sebelum diberlakukannya elektronik KTP di Indonesia.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara berkembang dengan cepat, terutama ketika pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pembangunan sentra-sentra industri manufaktur di pantai utara Jawa, khususnya DKI Jakarta dan wilayah-wilayah seputarnya, pada tahun 1980-an. Kemudian ketika revolusi colt terjadi, sarana dan prasarana transportasi dibangun hingga ke pelosok perdesaan terutama di pulau Jawa, lebih memicu migrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta dan wilayah-wilayah peri urbannya. Kondisi ini sebetulnya sudah diperkirakan oleh Bung Karno, sehingga muncul gagasan untuk memindahkan ibukota negara ke kota Palangkaraya pada tahun 1957. Dalam buku berjudul Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangkaraya tulisan Wijnarka,

disebutkan dua kali Bung Karno melihat potensi langsung kota ini untuk menjadi pusat pemerintahan. Posisi geografis Palangkaraya dianggap unik karena berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Namun rencana kepindahan ibukota ke Palangkaraya gagal karena kesulitan penyediaan barang bangunan dan desakan dari beberapa duta besar yang menginginkan Jakarta tetap sebagai ibukota negara. Setelah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno meninggalkan gagasan pemindahan ibukota dan kembali memfokuskan pembangunan di Jakarta yang kemudian dijadikan simbol kebangkitan Indonesia.

Rencana pemindahan ibukota pun terus berlanjut, pada periode pemerintahan Orde Baru, Presiden Suharto sempat juga menggagas pemindahan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat melalui Keppres 1 tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keputusan ini mendukung rencana pengembangan kota mandiri di Jonggol, Jawa Barat seluas 30 ribu hektar yang digagas oleh salah seorang putra Soeharto, Bambang Trihatmodjo (Firman, 1997). Rencana pemindahan ibukota ke Jonggol tidak berlanjut seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998.

Pada awalnya rencana pembangunan kawasan DKI Jakarta diarahkan ke bagian barat dan timur wilayah ini, sedangkan bagian selatan diperuntukkan bagi resapan air yang akan memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini nampak dengan dibangunnya jalan-jalan penghubung ke wilayah barat dan timur dari DKI Jakarta seperti TOL Jagorawi, TOL Cikampek serta TOL yang menuju ke Tangerang. Namun dalam perkembangan selanjutnya penggunaan tata ruang di DKI Jakarta semakin semrawut, karena daerah yang tadinya diproyesikan untuk daerah resapan air ternyata dibangun untuk pemukiman dan pusat-pusat perbelanjaan. Akibatnya DKI Jakarta mulai merasakan kekurangan air bersih setiap musim kemarau dan ancaman intrusi air laut yang semakin meluas.

Selanjutnya Djakapermana (2011) mengatakan bahwa pembangunan JABODETABEK ditambah dengan Cianjur merupakan masalah nasional, yang harus diselesaikan secara nasional pula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan JABODETABEKPUNJUR merupakan kawasan strategis nasional yaitu sebuah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan dan rencana tata ruangnya ditetapkan dengan peraturan presiden karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, hankam,

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Selain itu, Kawasan JABODETABEKPUNJUR termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia menurut UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan hal tersebut, Kawasan JABODETABEKPUNJUR mempunyai peran sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman hayati yang dapat menjamin tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan peraturan tersebut maka pembangunan JABODETABEKPUNJUR memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi Jakarta, provinsi Jawa Barat khususnya pemerintah Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta pemerintah Provinsi Banten khususnya Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Salah satu contoh kawasan MUR skala besar lain di Indonesia adalah pada kawasan sekitar DKI Jakarta. Perkembangan yang terjadi pada ibukota negara tersebut sudah sangat pesat bahkan terjadi penyatuan secara fisik dengan kawasan sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok atau yang sering disebut JABODETABEK (Silas, 2002). Menurut tujuan Rencana Induk Jakarta (1965-1985) pengembangan JABODETABEK salah satunya adalah mendorong pembukaan wilayah untuk menjadi pusat pertumbuhan, baik di tengah Kota Jakarta maupun di koridor penghubung antara Jakarta dan wilayah sekitarnya. Namun pembukaan wilayah terbangun tersebut tidak segera diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan tepat waktu, sementara pembangunan di sekitar perbatasan Jakarta dengan Bodetabek terus terjadi sehingga terjadinya konurbasi yang memperluas cakupan wilayah yang harus dikelola Jakarta. Namun demikian, batasan wilayah administrasi menyebabkan tarik ulur dalam pengelolaan seluruh wilayah JABODETABEK menjadi satu atap pengelolaan. Berbagai pembicaraan antar kepala pemerintahan telah dilakukan tetapi belum nampak hasilnya.

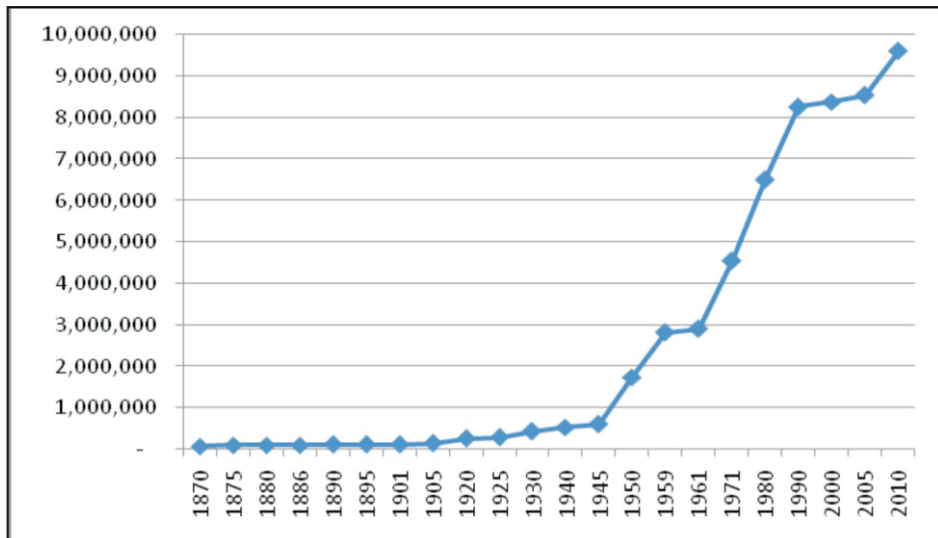
Implikasi dari maju pesatnya pembangunan di DKI Jakarta dari sisi pembangunan fisik, sarana dan prasarana perkotaan serta ekonomi menyebabkan wilayah ini terus menjadi tujuan migrant meskipun trennya menurun dari tahun ke tahun. Saat ini Jakarta menjadi pusat segala aspek kehidupan di Indonesia. Selain sebagai pusat pemerintahan RI, juga sebagai pusat perdagangan, keuangan, jasa, hiburan, olahraga, budaya, transportasi, dan penelitian. Sehingga tidak mengherankan dengan peran sebagai pusat berbagai aktivitas di Indonesia itu, Jakarta mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat. Penduduk JABODETABEK bertambah dari 16,8 juta pada tahun 1990 menjadi 28,0 juta jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk ini sebanyak

hampir 12 % dari total penduduk Indonesia, tetapi hanya menempati 0.3 % dari total wilayah Indonesia. Sehingga kepadatan penduduknya sangat tinggi terutama di daerah-daerah yang memiliki daerah pusat bisnis. Pesatnya urbanisasi di JABODETABEK ini ternyata tidak dapat diimbangi oleh tersedianya fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai, sehingga berbagai masalah seperti, banjir, kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh menjadi semakin sulit diatasi. Ketidakberdayaan Jakarta untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan seringkali dijadikan salah satu pertimbangan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta.

3.2 KONDISI KEPENDUDUKAN

Data migrasi dari perdesaan dan perkotaan tidak tersedia, namun besarnya jumlah dan pertumbuhan penduduk di perkotaan dapat menjadi indikasi dari perkembangan migrasi desa-kota. Ketika angka kelahiran secara nasional bisa diturunkan dari 5,6 pada tahun 1970an menjadi hanya 2,34 pada tahun 2007, angka yang sama juga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Namun beberapa wilayah kota seperti DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, padahal angkat TFR dan IMR sudah turun cukup signifikan, maka yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk yang lebih banyak dipengaruhi oleh migrasi masuk.

Gambar 2
Jumlah Penduduk DKI Jakarta 1870 - 2010



Sumber: *Sejarah DKI Jakarta*
SP 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2005 dan 2010.

Menarik untuk diperhatikan pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dari waktu ke waktu. Sebagai kota inti yang menjadi pusat pemerintah sejak masih jaman penjajahan sampai kemerdekaan di proklamirkan, jumlah penduduk DKI Jakarta tumbuh sangat lambat sejak tahun 1870 sampai dengan tahun 1945. Namun sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1980 penduduk meningkat dengan pesat. Penetapan DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan berbagai pembangunan yang dilakukan menjadikan kota ini seperti magnet bagi penduduk di sekitar terutama Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur untuk masuk ke wilayah ini. Kebijakan pembangunan tahun 1970-1980, dengan industrialisasi manufaktur serta berbagai infrastruktur baik pendidikan, ekonomi, kesehatan semakin menarik kaum migrant untuk memanfaatkan Jakarta sebagai sumber kehidupan mereka. Penduduk DKI Jakarta yang sebagian besar berada pada posisi kesejahteraan yang cukup baik, menyebabkan penduduk lain untuk datang dan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh penduduk Jakarta pada kelompok kesejahteraan tinggi seperti tukang air, sopir pedagang kakilima dan lain sebagainya. Lowongan ini segera diisi oleh kaum migrant dari seputaran DKI Jakarta. Jelinek (1986) mengatakan bahwa sebagian besar petani yang masuk ke DKI hanya mempunyai ongkos untuk perjalanan, sehingga akomodasi dan lain-lain tergantung pada teman atau anggota keluarga sekampung untuk menampung mereka. Pondok-pondok semacam ini banyak ditemukan pada waktu itu untuk menampung penduduk sekampung. Inilah yang disebut dengan budaya pangkalan, di pangkalan inilah penduduk yang tidak memiliki keahlian apapun dididik dan diberi modal oleh tauke-tauke yang lebih dulu berhasil.

Namun kemudian terjadi titik balik, ketika kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Jakarta mengharuskan sebagian besar penduduk DKI tergusur dan terpaksa pindah ke wilayah lain di sekitar DKI Jakarta. Sementara itu sebagai konsekuensi pengembangan Botabek sebagai wilayah penyangga, menyebabkan terjadinya pembangunan perumahan besar-besaran di Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Harga rumah yang masih murah di sekitar Jakarta serta kebijakan penggusuran menyebabkan penduduk Jakarta memilih untuk tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Inilah yang disebut dengan *spill over*.

Tabel 3.1 menunjukkan jumlah penduduk JABODETABEK dari tahun 1971 sampai dengan 2010, tetapi tahun 1990 tidak ditampilkan karena tidak ada data publikasi menurut kabupaten/kota. Dari tabel tersebut nampak bahwa Laju pertumbuhan rata-rata per tahun di DKI Jakarta untuk semua wilayah menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan untuk wilayah Jakarta Pusat telah mengalami penurunan dari 1.260.297 jiwa pada tahun 1971 turun

menjadi hanya 874.595 jiwa pada tahun 2010. Kondisi ini disebabkan karena kebijakan pembangunan DKI Jakarta pada tahun tersebut adalah mengembangkan wilayah kota seperti wilayah Kemayoran, wilayah Senen dan lain sebagainya menjadi pusat-pusat pelayanan public seperti perkantoran dan pusat perdagangan, menyebabkan sebagian penduduk tergusur dan pindah ke wilayah-wilayah pinggiran seperti Depok, Bekasi dan Tangerang. Harga tanah yang mahal serta pertumbuhan pembangunan perumahan juga diduga menjadi penyebab migrasi penduduk dari Jakarta ke luar Jakarta. Sementara wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur justru mengalami peningkatan jumlah penduduk, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mengembangkan industrialisasi yang mengarah ke Jakarta Barat dan Jakarta Timur menyebabkan penduduk mulai memadati wilayah tersebut. Jakarta Selatan meskipun mengalami penambahan jumlah penduduk tetapi tidak sebesar ke dua wilayah diatas. Kebijakan untuk menjadikan wilayah ini sebagai resapan air bagi DKI Jakarta pada awalnya bisa menekan pertumbuhan penduduk, namun kemudian pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan di wilayah ini telah mengakibatkan daerah ini juga berpenduduk cukup besar.

Tabel 3.1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk JABODETABEK 1971 - 2010
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk		
	1971	1980	2000	2010	1971-80	1980-00	2000-10
Kepulauan Seribu	na	na	na	21,082	na	na	na
Jakarta Selatan	1,050,859	1,579,795	1,784,044	2,062,232	4.5	0.6	1.4
Jakarta Timur	802,133	1,456,750	2,347,917	2,693,896	6.6	2.4	1.4
Jakarta Pusat	1,260,297	1,236,876	874,595	899,515	-0.2	-1.7	0.3
Jakarta Barat	820,756	1,231,188	1,904,191	2,281,945	4.5	2.2	1.8
Jakarta Utara	612,447	976,045	1,436,336	1,645,659	5.2	1.9	1.4
Total DKI Jakarta	4,546,492	6,480,654	8,347,083	9,604,329	3.9	1.3	1.4
Kabupaten Bogor	1,667,687	2,493,843	3,502,098	4,771,932	4.5	1.7	3.1
Kabupaten Bekasi	830,838	1,143,463	1,665,490	2,630,401	3.5	1.9	4.6
Kabupaten Tangerang	1,066,695	1,529,024	2,781,428	2,834,376	4.0	3.0	0.2
Kota Bogor	195,142	246,946	747,842	891,467	2.6	5.5	1.8
Kota Tangerang	na	na	1,325,854	1,451,595			0.9
Kota tangerang Selatan	na	na	na	129,322			
Kota Bekasi	na	na	1,657,512	1,993,478			1.8
Kota Depok	na	na	1,141,416	1,374,903			1.9
Total JABODETABEK	8,306,854	11,893,930	21,168,723	26,663,414	3.99	2.88	2.31

Sumber: SP 1971, 1980, 2000, 2010

Wilayah lain di Bogor, Tangerang dan Bekasi juga mengalami pertambahan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan penduduk sepanjang 1971 sampai dengan 2010 untuk Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor mencapai 4,06 persen per tahun selama 40 tahun, Kabupaten Bogor mencapai 2,7 persen per tahun, Kabupaten Bekasi 2,96 persen per tahun dan Kabupaten Tangerang 2,51persen. Namun jika diperhatikan LPP periode 10 tahunan, menunjukkan penurunan yang signifikan. Kabupaten Tangerang misalnya hanya tumbuh sekitar 0,9 persen per tahun.

3.3 KONDISI PEREKONOMIAN

3.3.1 Konsisi Makro Ekonomi JABODETABEK

Secara makro PDRB per kapita menunjukkan gambaran kasar mengenai kemampuan rata-rata nilai tambah ekonomi per kapita dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Secara umum rata-rata pendapatan per kapita daerah-daerah JABODETABEK jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Kabupaten Wonogiri maupun Kabupaten Tegal sebagai contoh daerah pengirim migran. Pendapatan per kapita di DKI Jakarta merupakan yang tertinggi yakni mencapai sekitar Rp 82 juta per kapita pertahun dengan nilai tertinggi berada di wilayah Jakarta Pusat. Nilainya yang cukup besar menjadi faktor penarik bagi pencari kerja dari beberapa daerah untuk bekerja di wilayah DKI Jakarta. Urutan kedua berikutnya adalah pendapatan perapita untuk wilayah Kabupaten Bekasi Rp 38,9 juta atau mencapai enam kali lipat pendapatan perkapita salah satu contoh daerah pengirim miran, Kabupaten Tegal yang hanya Rp sekitar 5 juta/kapita/tahun. Selanjutnya yang pendapatan perkapita menempati urutan ketiga adalah kabupaten Tangerang Rp. 31,7 juta.

Tabel 3.2
PDRB per kapita HB JABODETABEK 2005-2009 (ribuan rupiah)

JABODETABEK	2005	2006	2007	2008	2009
Kab. Bogor	9.955	11.475	12.913	14.491	16.172
Kab. Bekasi ¹⁾	28.336	31.802	34.420	37.137	38.655
Kota Bogor	6.891	7.795	8.874	10.127	11.570
Kota Bekasi	9.625	10.802	11.839	13.301	13.722
Kota Depok	5.469	6.292	7.139	8.164	8.851
Kab. Tangerang	7.483	8.330	9.488	10.409	11.106
Kota Tangerang	20.630	23.706	26.090	29.177	31.727
Kab. Kepulauan Seribu ¹⁾	10.305	11.481	12.440	14.166	16.292
Kota Jakarta Selatan	48.253	53.876	61.285	71.040	78.405
Kota Jakarta Timur	30.956	35.456	41.229	48.322	53.151
Kota Jakarta Pusat	126.766	144.796	163.094	199.565	222.549
Kota Jakarta Barat	30.910	34.713	39.254	45.858	51.099
Kota Jakarta Utara	56.826	65.486	74.216	88.389	96.613
DKI Jakarta	48.665	55.197	62.665	74.165	81.998
Kab. Wonogiri *	3.534	4.129	4.644	5.361	5.822
Kab. Tegal*	2.734	3.480	3.925	4.526	4.990

1) Tanpa migas

**. Contoh kabupaten yang banyak mengirimkan migrant ke wilayah DKI Jakarta*

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten/Kota 2005-2009,

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota Menurut HK 2000 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Daerah Penerima Migran					
Kab. Bogor	5,85	5,95	6,05	5,58	4,14
Kab. Bekasi ¹⁾	5,84	6,02	6,14	6,10	5,07
Kota Bogor	6,12	6,03	6,09	5,98	6,01
Kota Bekasi	5,65	6,07	6,44	5,94	4,13
Kota Depok	6,96	6,65	7,04	6,42	6,22
Kab. Tangerang	7,32	6,88	14,03	6,32	5,27
Kota Tangerang	6,89	6,85	6,86	6,37	5,74
Kab. Kepulauan Seribu ¹⁾	2,57	3,71	3,83	5,32	5,14
Kota Jakarta Selatan	5,76	6,27	6,41	6,21	5,34
Kota Jakarta Timur	6,04	5,93	6,35	5,69	4,62
Kota Jakarta Pusat	6,08	6,03	6,50	6,35	5,43
Kota Jakarta Barat	6,03	5,95	6,33	5,97	4,98
Kota Jakarta Utara	6,02	5,90	6,36	5,81	4,03
Jml Kab./Kota Total of Reg./Mun.	1) 5,98	6,03	6,40	6,05	4,94
PROVINSI/PROVINCE 1)	6,06	5,96	6,46	6,24	5,03
Kasus Daerah Pengirim Migran					
Kab. Wonogiri	4,31	4,07	5,07	4,27	4,73
Kab. Tegal	4,72	5,19	5,59	5,32	5,49
Nasional					

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten/Kota 2005-2009,

Pertumbuhan perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 suatu daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kemampuan perekonomiannya. Walaupun tidak terlepas dari kondisi perekonomian secara makro, pertumbuhan ini juga terkait dengan meningkatnya investasi, dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan produktifitas tenaga kerja. Nampak bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah JABODETABEK bervariasi dari 4 persen hingga 6,22 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Kota Depok kemudian diikuti oleh Kota Bogor untuk tahun 2009. Beberapa kabupaten/kota di wilayah JABODETABEK mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan ada kecenderungan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pengirim migran. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung tinggi terdapat di Kota Depok dan Kota Bogor. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi untuk kasus di Kab Tegal dan Kab Wonogiri mencapai 5,49 persen dan 4,73 persen di tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi untuk kab Wonogiri termasuk kategori yang tidak rendah.

Tabel 3.4
PDRB Kabupaten Kota se JABODETABEK Harga Berlaku 2005-2009

Kab/Kota/Prov	2005	2006	2007	2008	2009
Kab. Bogor	38.182	44.793	51.280	58.389	66.084
Kab. Bekasi	57.176	66.520	74.498	82.978	89.013
Kab. Bekasi1)	56.250	65.347	73.173	81.469	87.469
Kota Bogor	6.192	7.258	8.558	10.090	11.905
Kota Bekasi	19.226	22.376	25.419	29.525	31.475
Kota Depok	7.542	9.005	10.599	12.542	14.064
PROVINSI Jabar 1)	370.694	448.251	501.445	572.339	627.535
Kab. Tangerang	24.416	28.042	32.955	37.202	40.833
Kota Tangerang	30.021	35.123	39.355	44.689	49.331
PROVINSI BANTEN1)	84.623	97.867	107.500	122.491	133.048

1) Tidak termasuk migas

Sumber: BPS. PDRB Kab/Kota 2005-2009.

3.3.2 Kondisi Ketenagakerjaan JABODETABEK

Jumlah penduduk yang bekerja di wilayah JABODETABEK sebanyak 12.249.109 orang atau sekitar 12 persen dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sebanyak 109.670.399 orang. Jumlah pekerja yang tinggal di DKI Jakarta sebanyak 4.588.418 orang atau sekitar 38 persen dari seluruh pekerja di wilayah JABODETABEK, kemudian yang terbanyak kedua terdapat di kabupaten Bogor dengan proporsi sebesar 15 persen dari seluruh pekerja di wilayah JABODETABEK, kemudian urutan berikutnya adalah kabupaten Tangerang dengan proporsi sebesar 10 persen.

Tempat tinggal pekerja belum menunjukkan tempat bekerja dari pekerja yang bersangkutan. Kusumosuwidho, Toersilaningsih dan Sudaryatmo (2007) menemukan bahwa sebagian pekerja melakukan komuter diantara kota besar denengan kota-kota penyangga di sekitarnya, seperti misalnya DKI Jakarta dengan Bodetabek. Perilaku komuter tersebut disebabkan oleh perpindahan penduduk yang berasal dari DKI Jakarta ke Bodetabek, telah memiliki pekerjaan di DKI Jakarta, atau orang yang dating dari luar wilayah Bodetabek, tinggal di bodetabek dan bekerja di DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa komuter dan migrasi non permanen menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan. Mereka yang melakukan migrasi non permanen lebih sejahtera dibandingkan dengan yang tidak melakukan migrasi.

TABEL 3.5
Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di JABODETABEK 2008-2010

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	JENIS PEKERJAAN (*)										TOTAL
		0/1	2	3	4	5	6	7/8/9	X/00	47		
Kepulauan Seribu	2008	517	14	485	1.117	416	1.247	3.138	47	6.981		
	2009	603	15	428	1.161	439	3.007	1.738	0	7.391		
	2010	902	54	610	1.330	951	3.366	1.928	19	9.160		
	2011	1.332	0	724	2.036	1.067	2.292	1.477	92	9.020		
Jakarta Selatan	2008	87.962	43.225	127.913	265.183	177.767	5.991	259.823	11.590	979.454		
	2009	99.570	39.962	122.555	212.474	111.321	1.421	365.228	9.333	961.864		
	2010	145.170	42.832	159.913	203.589	139.824	401	326.728	8.976	1.027.433		
	2011	122.485	19.897	168.353	258.238	210.891	809	203.076	5.348	989.097		
Jakarta Timur	2008	125.210	27.327	134.509	311.859	156.709	2.138	319.279	14.117	1.091.148		
	2009	138.986	53.603	103.604	238.871	73.768	2.988	387.724	25.597	1.025.141		
	2010	178.829	44.288	173.517	270.089	125.275	2.312	394.126	31.984	1.220.420		
	2011	148.019	39.050	200.594	342.236	171.529	7.100	357.606	9.182	1.275.316		
Jakarta Pusat	2008	29.724	12.331	65.914	129.944	81.637	1.595	101.735	1.203	424.083		
	2009	34.505	17.750	52.304	112.024	48.303	214	154.239	1.778	421.117		
	2010	43.225	22.216	67.715	123.834	41.405	375	129.619	1.869	430.258		
	2011	43.296	14.623	72.481	116.625	79.382	0	104.433	2.924	433.764		
Jakarta Barat	2008	62.964	38.041	124.094	261.730	168.983	4.107	348.437	4.803	1.013.159		
	2009	68.970	38.132	102.126	248.470	90.636	4.775	459.492	7.688	1.020.289		
	2010	102.300	43.497	135.894	292.775	76.081	3.274	505.359	15.645	1.174.825		
	2011	91.424	10.903	195.422	296.922	190.448	2.822	305.819	3.057	1.096.817		
Jakarta Utara	2008	36.337	11.040	79.266	194.144	100.729	4.227	249.573	1.825	677.141		
	2009	42.018	15.408	64.863	170.419	62.393	7.025	317.449	3.013	682.588		
	2010	65.664	27.864	102.510	160.216	93.473	8.343	364.773	4.822	827.665		
	2011	54.475	7.200	126.494	204.063	102.881	9.882	266.068	13.341	784.404		
Kab Bogor	2008	82.817	9.936	52.818	317.974	90.675	282.975	630.750	2.542	1.470.487		
	2009	86.234	15.849	50.032	287.587	52.317	198.658	836.973	6.729	1.534.379		
	2010	99.356	18.491	66.231	375.379	129.596	258.182	774.136	974	1.722.345		
	2011	96.678	20.077	79.052	416.698	144.643	233.178	852.116	9.723	1.852.165		
Kab Bekasi	2008	53.185	12.276	44.335	231.416	55.925	122.428	334.839	0	854.404		
	2009	48.805	17.242	42.676	169.327	43.867	86.017	500.914	2.867	911.715		
	2010	79.648	9.431	62.880	289.579	74.517	119.906	503.315	4.541	1.143.817		
	2011	79.892	22.950	73.527	200.273	86.156	119.722	492.379	0	1.074.899		

TABEL 3.6
Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan di JABODETABEK 2008-2010 (LANJUTAN)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	JENIS PEKERJAAN (*)										TOTAL
		0/1	2	3	4	5	6	7/8/9	X/00	736		
Kota Bogor	2008	28.534	9.720	31.075	97.066	50.444	15.759	144.054		736	377.388	
	2009	31.663	13.357	29.808	80.146	30.323	7.383	189.604		3.204	385.488	
	2010	22.254	6.841	45.501	83.532	43.807	5.476	135.485		3.831	346.727	
	2011	45.118	17.853	48.140	96.039	56.875	4.254	122.013		929	391.221	
Kota Bekasi	2008	98.665	20.313	112.067	175.951	112.908	35.204	338.567		7.366	901.041	
	2009	134.873	48.448	91.951	153.421	36.148	13.630	425.877		6.774	911.122	
	2010	118.856	31.092	139.389	179.637	104.780	6.695	303.106		9.321	892.876	
	2011	146.132	37.441	198.176	179.868	103.990	1.564	317.615		5.844	990.630	
Kota Depok	2008	66.583	13.471	79.715	149.358	108.576	27.019	208.740		3.588	657.050	
	2009	99.270	24.029	73.816	122.835	67.891	15.285	246.230		3.815	653.171	
	2010	93.167	13.823	103.033	138.983	108.797	10.884	243.310		2.894	714.891	
	2011	70.187	19.773	87.201	189.803	106.807	14.425	230.285		10.194	728.675	
Kab Tangerang	2008	99.849	23.586	100.911	351.940	122.048	141.506	563.261		2.800	1.405.901	
	2009	87.504	26.918	93.424	254.672	67.228	89.512	735.265		5.804	1.360.327	
	2010	82.363	6.812	91.427	270.432	114.943	59.315	608.993		4.837	1.239.122	
	2011	61.185	17.742	84.807	246.175	74.802	71.676	653.837		2.198	1.212.422	
Kota Tangerang	2008	54.366	11.953	91.731	169.524	64.232	6.736	241.687		1.820	642.049	
	2009	70.301	13.883	75.531	129.531	33.840	5.227	373.678		3.421	705.412	
	2010	92.125	8.612	144.524	165.235	91.969	4.226	337.326		5.307	849.324	
	2011	92.749	23.703	97.436	146.253	113.828	6.370	341.173		2.004	823.516	
Kota Tangerang Selatan	2008											
2009												
2010	88.314	15.644	70.661	121.501	92.367	5.893		161.756		3.942	560.078	
2011	95.339	16.605	97.959	116.835	106.155	1.907		149.575		2.788	587.163	

*) 0/1. Tenaga profesional, teknis dan yang sejenis, 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis, 4. Tenaga usaha penjualan, 5. Tenaga usaha jasa, 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, X/00. Lainnya

Pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah yang terbanyak adalah sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar yaitu sebanyak 4.397.472 orang atau 36 persen dari seluruh pekerja di JABODETABEK. Sebagian besar pekerja ini tinggal di wilayah kabupaten Bogor dengan proporsi sebesar 19 persen, kemudian terbanyak kedua berada di kabupaten Tangerang dengan proporsi sebesar 15 persen, dan pada urutan terbanyak ketiga yaitu berada di kabupaten Bekasi sebesar 11 persen dari seluruh pekerja di JABODETABEK. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap di wilayah JABODETABEK merupakan tenaga kerja dengan kualifikasi menengah ke bawah atau tenaga trampil dan tidak trampil yakni pada jenis pekerjaan di proses produksi, sebagai pengemudi dan pekerja srabutan atau pekerja kasar yang tidak terlalu memerlukan ketrampilan.

Pekerja berdasarkan jenis pekerjaan dengan jumlah terbanyak kedua adalah sebagai tenaga tata usaha dan yang sejenis yaitu sebanyak 2.812.064 orang atau 23 persen dari seluruh pekerja di JABODETABEK. Sebagian besar pekerja ini tinggal di wilayah kabupaten Bogor yaitu sebanyak 15 persen, kemudian terbanyak kedua dengan proporsi 12 persen yang berada di wilayah Jakarta timur dan terbanyak ketiga berada di wilayah Jakarta barat dengan proporsi sebesar 11 persen dari seluruh pekerja dengan jenis pekerjaan tenaga tata usaha dan yang sejenis di wilayah JABODETABEK. Pekerja dengan jumlah terbanyak ketiga berdasarkan jenis pekerjaan adalah sebagai tenaga usaha penjualan yaitu sebanyak 1.549.454 orang atau 13 persen dari seluruh pekerja di JABODETABEK dengan sebagian besar pekerja ini tinggal di wilayah Jakarta selatan yaitu sekitar 14 persen dari seluruh pekerja dengan jabatan sebagai tenaga usaha penjualan di wilayah JABODETABEK.

Tabel 3.7

Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Di JABODETABEK, 2008-2010

Kabupaten/Kota	Tahun	Lapangan Usaha (*)									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kepulauan Seribu	2008	1.261	27	2.297	60	159	1.508	252	13	1.404	6.981
	2009	3.455	0	294	101	247	1.586	187	31	1.490	7.391
	2010	3.527	16	395	55	288	2.020	577	16	2.266	9.160
	2011	2.492	76	372	226	239	1.944	759	65	2.847	9.020
Jakarta Selatan	2008	6.340	6.623	74.256	3.436	55.170	372.003	87.229	102.544	271.853	979.454
	2009	3.619	8.636	80.815	4.047	43.070	348.865	102.003	95.400	275.409	961.864
	2010	2.307	6.293	72.448	1.602	43.692	373.206	94.306	106.245	327.334	1.027.433
	2011	2.427	5.481	71.264	1.690	35.289	369.157	73.962	145.281	284.546	989.097
Jakarta Timur	2008	2.138	3.532	185.740	3.794	43.055	378.886	114.434	77.993	281.576	1.091.148
	2009	2.988	4.594	166.344	3.454	62.020	339.045	107.537	69.477	269.682	1.025.141
	2010	2.868	6.116	165.097	7.319	47.105	439.983	117.444	73.253	361.235	1.220.420
	2011	9.199	4.011	194.249	8.277	58.326	404.455	105.438	116.248	375.113	1.275.316
Jakarta Pusat	2008	1.595	752	40.686	727	14.135	186.374	43.081	34.091	102.642	424.083
	2009	379	595	39.428	490	13.002	189.621	45.302	32.051	100.249	421.117
	2010	1.324	2.751	36.484	1.403	10.652	206.867	45.602	33.527	91.648	430.258
	2011	413	1.816	43.042	1.057	6.743	178.946	39.884	62.786	99.077	433.764
Jakarta Barat	2008	4.107	734	226.482	2.252	40.533	364.527	91.343	54.544	228.637	1.013.159
	2009	5.796	2.059	234.987	1.470	49.182	380.845	74.478	57.785	213.687	1.020.289
	2010	6.763	2.739	276.481	5.968	59.128	438.922	78.141	58.424	248.259	1.174.825
	2011	5.991	0	218.073	3.088	42.757	418.367	74.048	78.267	256.226	1.096.817
Jakarta Utara	2008	4.227	1.826	145.488	3.469	25.616	252.508	80.340	32.308	131.359	677.141
	2009	9.227	889	146.015	2.003	23.471	256.974	71.378	23.234	149.397	682.588
	2010	11.688	1.269	204.080	1.126	30.628	272.633	89.561	40.948	175.732	827.665
	2011	9.882	3.900	163.816	1.556	19.679	269.251	99.193	38.178	178.949	784.404
Kab Bogor	2008	289.653	12.355	329.034	869	83.298	357.880	144.937	16.933	235.528	1.470.487
	2009	291.468	11.952	334.238	2.774	68.520	396.236	150.948	24.496	253.747	1.534.379
	2010	266.315	25.774	417.133	8.524	102.343	429.965	144.213	31.099	296.979	1.722.345
	2011	239.325	52.143	526.357	2.545	97.193	493.234	126.366	54.768	260.234	1.852.165
Kab Bekasi	2008	123.686	3.134	230.721	706	31.637	250.794	89.597	21.032	103.097	854.404
	2009	130.995	802	251.961	3.777	25.994	274.664	99.972	14.405	109.145	911.715
	2010	120.896	1.864	367.403	4.497	44.842	321.393	92.178	25.606	165.138	1.143.817
	2011	120.737	477	403.826	1.880	28.386	243.862	84.340	24.352	167.039	1.074.899

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Di JABODETABEK, 2008-2010 (LANJUTAN)

Kabupaten/Kota	Tahun	Lapangan Usaha (*)									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kota Bogor	2008	15.759	368	65.587	2.244	21.826	112.454	42.964	12.881	103.305	377.388
	2009	12.137	454	68.605	3.581	30.391	111.737	48.712	13.849	96.022	385.488
	2010	6.920	1.339	63.597	1.444	18.010	108.820	33.597	13.969	99.031	346.727
	2011	4.703	449	60.857	993	30.987	112.774	36.143	30.618	113.697	391.221
Kota Bekasi	2008	37.249	5.506	184.053	9.239	54.602	241.307	111.167	44.388	213.530	901.041
	2009	21.422	6.503	191.259	5.457	56.184	234.774	111.662	42.156	241.705	911.122
	2010	8.603	5.926	183.256	11.316	65.388	213.873	81.787	68.684	254.043	892.876
	2011	3.416	2.922	205.758	4.424	55.869	229.742	71.551	99.497	317.451	990.630
Kota Depok	2008	28.117	3.535	85.006	3.041	42.755	188.321	64.629	50.296	191.350	657.050
	2009	18.008	4.796	98.253	4.462	39.602	173.315	68.788	46.258	199.689	653.171
	2010	11.519	4.917	118.051	7.842	43.683	191.306	55.071	51.745	230.757	714.891
	2011	15.710	3.222	85.515	3.921	52.642	252.340	57.220	57.723	200.382	728.675
Kab Tangerang	2008	145.309	8.608	349.890	5.345	56.831	406.632	137.926	45.698	249.662	1.405.901
	2009	118.861	11.739	391.361	4.753	51.934	367.135	132.038	52.667	229.839	1.360.327
	2010	62.289	5.910	433.879	5.060	64.678	318.958	118.690	38.227	191.431	1.239.122
	2011	75.426	3.223	544.270	4.183	48.583	278.954	64.463	34.277	159.043	1.212.422
Kota Tangerang	2008	7.275	1.385	179.282	2.093	27.841	206.355	79.591	26.787	111.440	642.049
	2009	7.013	1.433	241.737	3.716	17.016	205.555	71.822	26.833	130.287	705.412
	2010	4.226	2.221	277.916	727	20.747	245.062	81.577	43.155	173.693	849.324
	2011	14.635	2.151	268.959	6.788	30.228	216.598	64.669	47.220	172.268	823.516
Kota Tangerang Selatan	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	6.255	3.406	50.923	3.941	40.720	180.031	46.357	46.438	182.007	560.078
	2011	5.591	5.762	59.290	2.584	34.317	164.381	39.082	83.117	193.039	587.163

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Di JABODETABEK, 2008-2010 (LANJUTAN)

DAERAH PENGIRIM

Kabupaten/Kota	Tahun	Lapangan Usaha(*)									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kab Wonogiri	2008	334.331	6.762	28.139	292	26.972	70.034	16.418	1.605	40.994	525.347
	2009	341.399	3.886	27.853	477	29.312	83.520	15.886	4.238	44.305	550.876
	2010	310.895	7.201	32.913	810	28.863	60.046	12.202	2.367	39.998	495.295
	2011	271.942	2.366	48.953	409	32.476	64.740	11.862	4.457	47.653	484.858
Kab Tegal	2008	189.233	2.823	111.789	467	27.590	166.471	46.062	2.772	60.972	608.179
	2009	192.773	4.912	102.188	490	21.690	158.678	41.602	3.006	65.200	590.539
	2010	185.337	1.350	97.409	0	30.385	153.758	48.731	6.561	62.087	585.618
	2011	167.397	5.061	123.313	0	53.164	170.779	42.504	6.893	85.224	654.335
Kota Tegal	2008	12.698	0	14.683	105	5.749	45.775	8.300	996	16.852	105.158
	2009	12.618	102	13.350	81	6.608	38.544	7.985	1.935	21.362	102.585
	2010	12.114	0	16.447	270	5.489	42.993	9.131	1.147	20.022	107.613
	2011	9.131	0	17.138	0	8.657	49.796	6.688	2.431	21.346	115.187

*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa kemasyarakatan

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha yang terbanyak di wilayah JABODETABEK adalah pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel yaitu sebanyak 3.634.005 orang atau sebanyak 30 persen dari seluruh penduduk yang bekerja di JABODETABEK. Proporsi terbanyak tinggal di wilayah DKI Jakarta, kemudian kabupaten Bogor dan kabupaten Tangerang dengan besaran berturut-turut sebanyak 45 persen, 14 persen dan 8 persen.

Terdapat variasi dominasi lapangan pekerja antar kabupaten kota di wilayah JABODETABEK. Misalnya jumlah pekerja di industri pengolahan sebagian besar terdapat di kabupaten Tangerang yaitu sebesar 19 persen dari seluruh pekerja industri pengolahan di wilayah JABODETABEK. Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbanyak kedua sedangkan yang untuk sektor jasa kemasyarakatan sebagian pekerja tinggal di wilayah Jakarta Timur yaitu sebesar 14 persen dari seluruh pekerja jasa kemasyarakatan di wilayah JABODETABEK. Sektor jasa kemasyarakatan ini merupakan lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbanyak ketiga di wilayah JABODETABEK.

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan JABODETABEK,
2008-2012

KABUPATEN/ KOTA	TAHUN	PENDIDIKAN (*)						TOTAL
		SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Dip loma I/II/III/ Akademi	Univer- sitas	
Kepulauan Seribu	2008	3.564	1.217	1.339	360	298	203	6.981
	2009	3.464	1.698	1.309	323	204	393	7.391
	2010	4.464	1.663	1.743	597	145	548	9.160
	2011	3.649	2.090	1.806	336	256	883	9.020
Jakarta Selatan	2008	215.831	195.293	205.411	159.892	66.905	136.122	979.454
	2009	182.664	181.743	201.701	189.139	70.191	136.426	961.864
	2010	179.986	207.757	230.480	203.132	75.008	131.070	1.027.433
	2011	162.418	148.296	252.551	216.259	69.418	140.155	989.097
Jakarta Timur	2008	198.437	207.113	295.930	178.930	80.048	130.690	1.091.148
	2009	169.126	170.427	252.823	213.847	69.996	148.922	1.025.141
	2010	188.484	245.339	292.002	261.753	88.145	144.697	1.220.420
	2011	243.002	253.904	290.350	264.431	102.880	120.749	1.275.316
Jakarta Pusat	2008	99.447	84.010	105.567	65.166	22.412	47.481	424.083
	2009	93.731	82.029	105.201	71.792	23.908	44.456	421.117
	2010	77.906	93.605	117.939	65.918	26.382	48.508	430.258
	2011	75.212	94.636	100.451	69.556	35.186	58.723	433.764
Jakarta Barat	2008	305.795	242.872	193.620	145.386	32.988	92.498	1.013.159
	2009	282.300	227.916	224.705	152.006	32.528	100.834	1.020.289
	2010	315.618	279.269	244.284	191.213	45.144	99.297	1.174.825
	2011	223.518	253.399	278.177	172.651	60.918	108.154	1.096.817
Jakarta Utara	2008	194.461	168.217	145.171	100.018	22.993	46.281	677.141
	2009	183.265	155.510	148.652	111.597	32.928	50.636	682.588
	2010	193.153	200.097	194.448	152.313	30.776	56.878	827.665
	2011	182.866	173.526	177.137	148.539	45.417	56.919	784.404
Kab Bogor	2008	819.948	283.334	173.791	118.210	30.729	44.475	1.470.487
	2009	821.755	303.011	188.972	146.771	26.878	46.992	1.534.379
	2010	900.003	338.397	222.215	173.511	33.125	55.094	1.722.345
	2011	989.012	361.470	206.571	191.364	42.983	60.765	1.852.165
Kab Bekasi	2008	399.570	166.971	137.548	94.399	21.886	34.030	854.404
	2009	390.211	173.088	151.806	139.975	32.058	24.577	911.715
	2010	461.169	210.686	197.494	191.127	35.846	47.495	1.143.817
	2011	452.558	181.639	199.524	148.803	48.840	43.535	1.074.899

TABEL 3.10
JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA BERDASARKAN
PENDIDIKAN JABODETABEK, 2008-2012 (LANJUTAN)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	PENDIDIKAN (*)						TOTAL
		≤SD	SMTp	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
Kota Bogor	2008	126.758	80.063	74.285	52.838	18.669	24.775	377.388
	2009	133.528	78.184	65.958	58.717	22.485	26.616	385.488
	2010	112.863	66.240	61.170	62.316	19.491	24.647	346.727
	2011	95.465	73.399	95.391	55.047	28.048	43.871	391.221
Kota Bekasi	2008	225.004	149.403	217.219	138.114	68.556	102.745	901.041
	2009	188.770	163.715	206.246	166.796	69.791	115.804	911.122
	2010	140.589	164.948	224.931	172.515	69.113	120.780	892.876
	2011	131.047	159.758	266.109	193.500	76.478	163.738	990.630
Kota Depok	2008	155.079	123.361	152.809	93.461	52.869	79.471	657.050
	2009	136.494	112.835	138.163	111.443	54.056	100.180	653.171
	2010	128.625	117.508	161.984	148.072	54.855	103.847	714.891
	2011	179.336	165.237	149.277	145.120	33.230	56.475	728.675
Kab Tangerang	2008	586.304	291.106	235.747	154.656	54.283	83.805	1.405.901
	2009	533.704	294.261	245.185	169.649	37.920	79.608	1.360.327
	2010	448.077	289.045	240.654	174.339	37.389	49.618	1.239.122
	2011	441.063	284.107	246.416	179.005	25.910	35.921	1.212.422
Kota Tangerang	2008	126.394	134.126	176.491	113.701	36.262	55.075	642.049
	2009	132.639	151.313	178.012	159.107	38.492	45.849	705.412
	2010	151.099	158.003	238.949	177.121	45.599	78.553	849.324
	2011	174.206	171.429	230.325	128.604	41.197	77.755	823.516
Kota Tangerang Selatan	2008	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0
	2010	107.882	95.692	122.109	105.318	39.221	89.856	560.078
	2011	90.213	108.068	125.804	93.543	62.880	106.655	587.163

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan terbagi menjadi pendidikan kurang dari atau tamat SD, SMTP, SMTA Umum, SMTA Kejuruan, Diploma I/II/III/Akademi dan Universitas. Jumlah penduduk yang bekerja di wilayah JABODETABEK berdasarkan pendidikan terbanyak adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi adalah tidak tamat atau tamat SD yaitu sebanyak 3.443.565 orang atau sekitar 28 persen dari seluruh penduduk yang bekerja di JABODETABEK. Sebagian besar pekerja tinggal di kabupaten Bogor dengan proporsi sebesar 29 persen dari seluruh pekerja lulusan SD di wilayah JABODETABEK.. Penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir SMTA Umum adalah sebesar 21 persen dan proporsi tersebut merupakan jumlah pekerja terbanyak kedua dari seluruh pekerja di wilayah JABODETABEK. Sebagian besar pekerja tinggal di wilayah Jakarta Timur yaitu dengan proporsi sebesar 11 persen dari seluruh pekerja lulusan SMTA Umum di wilayah JABODETABEK. Pekerja berdasarkan pendidikan terbanyak ketiga adalah pekerja dengan pendidikan SMTP yaitu sebesar 20 persen dari seluruh pekerja di wilayah JABODETABEK dan sebagian besar pekerja tinggal di kabupaten Bogor dengan proporsi 15 persen dari seluruh pekerja dengan lulusan SMTP di wilayah JABODETABEK.

Tabel 3.11.
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Di JABODETABEK 2008-2012

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	STATUS PEKERJAAN (*)							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
Kepulauan Seribu	2008	3.434	668	190	2.190	0	83	416	6.981
	2009	3.632	527	108	2.640	12	235	237	7.391
	2010	4.641	448	201	3.273	0	182	415	9.160
	2011	3.332	303	90	4.268	0	443	584	9.020
Jakarta Selatan	2008	220.925	75.948	49.820	577.125	0	11.130	44.506	979.454
	2009	244.956	61.091	42.250	552.958	0	22.442	38.167	961.864
	2010	216.133	82.359	43.011	627.803	0	23.583	34.544	1.027.433
	2011	161.373	52.491	40.383	648.684	0	31.776	54.390	989.097
Jakarta Timur	2008	249.279	117.038	33.925	622.606	0	14.854	53.446	1.091.148
	2009	232.991	79.156	35.207	621.139	616	14.167	41.865	1.025.141
	2010	293.360	105.359	32.661	713.878	1.036	16.843	57.283	1.220.420
	2011	261.098	60.627	40.246	840.588	0	35.177	37.580	1.275.316
Jakarta Pusat	2008	102.808	36.821	17.067	222.126	0	18.073	27.188	424.083
	2009	108.359	31.746	20.644	215.359	0	16.566	28.443	421.117
	2010	95.924	35.853	22.239	235.580	0	14.621	26.041	430.258
	2011	68.371	31.151	18.905	279.681	0	8.099	27.557	433.764
Jakarta Barat	2008	223.867	80.488	47.005	604.658	734	13.816	42.591	1.013.159
	2009	225.435	80.825	44.475	606.395	0	12.790	50.369	1.020.289
	2010	250.615	95.018	57.033	675.398	0	30.930	65.831	1.174.825
	2011	177.186	86.143	71.307	684.107	0	16.367	61.707	1.096.817
Jakarta Utara	2008	150.001	65.613	29.721	364.582	2.429	19.096	45.699	677.141
	2009	165.250	54.158	30.275	378.766	954	16.757	36.428	682.588
	2010	188.093	76.307	36.114	464.661	0	22.314	40.176	827.665
	2011	126.725	50.264	22.045	520.816	631	24.216	39.707	784.404
Kab Bogor	2008	356.612	186.175	60.146	597.182	62.457	96.196	111.719	1.470.487
	2009	374.914	182.686	55.727	637.375	74.301	104.324	105.052	1.534.379
	2010	449.131	187.585	66.639	708.265	93.284	110.743	106.698	1.722.345
	2011	432.410	242.880	63.943	794.186	83.543	118.161	117.042	1.852.165

Tabel 3.12

Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Di JABODETABEK 2008-2012 (Lanjutan)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	STATUS PEKERJAAN (*)							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
Kab Bekasi	2008	303.208	66.550	27.991	324.140	47.795	54.058	30.662	854.404
	2009	283.383	102.596	22.969	367.614	36.549	54.150	44.454	911.715
	2010	353.796	115.122	39.157	521.389	22.277	37.606	54.470	1.143.817
	2011	272.884	83.059	19.011	590.464	48.810	28.380	32.291	1.074.899
	2008	106.288	22.899	14.782	199.867	2.741	18.569	12.242	377.388
Kota Bogor	2009	95.277	31.518	11.790	206.215	2.166	26.321	12.201	385.488
	2010	85.200	32.976	8.952	190.528	2.313	14.932	11.826	346.727
	2011	74.153	32.577	18.176	236.174	2.088	18.797	9.256	391.221
	2008	219.026	69.697	25.933	514.930	638	38.641	32.176	901.041
	2009	183.612	77.110	43.134	539.038	1.414	28.718	38.096	911.122
Kota Bekasi	2010	159.257	74.039	28.793	577.727	890	30.904	21.266	892.876
	2011	111.574	41.068	52.269	752.652	0	17.869	15.198	990.630
	2008	148.540	55.561	33.764	374.740	1.933	13.961	28.551	657.050
	2009	133.825	52.565	30.789	393.278	2.589	15.568	24.557	653.171
	2010	138.813	68.411	17.281	450.320	892	12.246	26.928	714.891
Kab Tangerang	2011	131.639	43.902	29.821	457.534	0	30.030	35.749	728.675
	2008	394.106	155.675	45.824	693.760	18.616	40.267	57.653	1.405.901
	2009	343.373	117.684	45.168	758.355	16.481	35.217	44.049	1.360.327
	2010	372.687	98.319	22.033	649.608	16.967	40.130	39.378	1.239.122
	2011	229.655	90.868	27.960	759.938	14.497	43.313	46.191	1.212.422
Kota Tangerang	2008	146.490	54.063	22.074	381.201	453	17.953	19.815	642.049
	2009	142.186	41.980	16.975	466.493	0	12.884	24.894	705.412
	2010	181.882	72.596	20.369	524.909	0	32.368	17.200	849.324
	2011	155.316	41.766	25.489	538.995	707	35.772	25.471	823.516
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Tangerang Selatan	2009	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	141.322	37.503	7.594	357.439	1.316	6.680	8.224	560.078
	2011	77.857	15.038	14.240	451.259	0	15.187	13.582	587.163

*) 1. Berusaha sendiri, 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3. Berusaha dibantu buruh tetap, 4. Buruh/Karyawan/Pegawai, 5. Pekerja bebas di Pertanian, 6. Pekerja bebas di Non Pertanian, 7. Pekerja tidak dibayar

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan terbanyak pada status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 7.559.346 orang atau sekitar 62 persen dari seluruh penduduk yang bekerja di wilayah JABODETABEK. Sebagian besar pekerja tinggal di Jakarta timur dengan proporsi 11 persen dari seluruh pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai di wilayah JABODETABEK. Pekerja berdasarkan status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri yaitu sebanyak 2.283.573 orang atau sekitar 19 persen dari seluruh pekerja di wilayah JABODETABEK dan sebagian pekerja tinggal di kabupaten Bogor dengan proporsi sebesar 18 persen dari seluruh pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri di wilayah JABODETABEK. Jumlah pekerja terbanyak ketiga adalah dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu sebanyak 872.137 orang atau sekitar 7 persen dari seluruh pekerja di wilayah JABODETABEK dan sebagian pekerja tinggal di kabupaten Bogor dengan proporsi sebesar 29 persen.

Tabel 3.13
Rata-Rata Upah Berdasarkan Pendidikan Di JABODETABEK, 2008-2010

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	PENDIDIKAN (*)						Unversitas	RATA - RATA
		≤SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/ Akademi			
Kepulauan Seribu	2008	979.571	1.246.451	1.240.640	1.514.814	2.601.685	2.547.550	1.442.260	
	2009								
	2010	829.101	1.548.507	1.210.695	1.307.375	1.230.952	2.161.562	1.313.140	
Jakarta Selatan	2011	596.616	1.540.787	2.079.027	1.203.320	1.141.190	4.140.025	1.941.106	
	2008	884.114	1.110.820	1.563.129	1.344.153	2.108.413	3.622.721	1.738.680	
	2009								
Jakarta Timur	2010	900.592	2.153.240	1.703.414	1.629.458	2.751.814	4.895.132	2.245.485	
	2011	899.597	1.756.249	1.741.648	1.619.613	3.328.362	6.436.272	2.564.788	
	2008	740.207	1.088.861	1.584.643	1.440.432	2.422.970	3.414.911	1.742.794	
	2009								
	2010	789.271	1.612.841	1.807.180	1.628.136	3.129.777	4.355.488	2.150.406	
	2011	886.195	1.636.521	1.689.142	1.479.477	2.667.454	3.758.531	1.879.845	
Jakarta Pusat	2008	643.610	955.918	1.291.439	1.220.020	2.899.325	3.188.602	1.498.042	
	2009								
	2010	790.936	1.467.852	1.646.397	1.442.562	2.616.456	3.564.638	1.853.154	
Jakarta Barat	2011	837.981	1.498.347	1.586.033	1.740.375	3.053.824	5.918.420	2.367.709	
	2008	803.384	1.088.566	1.461.672	1.381.530	2.658.117	4.153.042	1.536.328	
	2009								
	2010	909.962	1.443.145	1.644.044	1.490.747	2.646.150	3.838.776	1.696.464	
	2011	934.745	1.515.210	1.785.917	1.406.825	2.497.016	4.081.638	1.843.983	
	2008	842.812	1.052.907	1.326.262	1.331.311	1.799.872	3.745.925	1.374.383	
	2009								
	2010	999.955	1.315.718	1.678.461	1.624.091	3.165.551	3.856.227	1.732.035	
	2011	857.255	1.468.681	1.767.355	1.583.642	2.386.869	3.447.790	1.714.336	
Kab Bogor	2008	549.860	768.493	1.150.384	1.078.113	1.666.952	2.654.521	871.594	
	2009	607.463	936.704	1.264.672	1.332.021	1.507.046	2.548.179	979.080	
	2010	684.215	1.078.442	1.256.238	1.136.288	2.031.401	2.906.927	1.061.242	
	2011	741.167	962.526	1.462.235	1.436.599	3.447.310	3.446.870	1.196.742	
	2008	333.494	502.403	1.093.380	561.582	1.354.000	1.966.158	672.560	
	2009	830.156	1.022.994	1.736.668	1.753.121	2.278.754	3.313.103	1.451.326	
	2010	847.569	1.362.877	1.806.826	1.743.120	2.001.811	3.050.276	1.530.464	
	2011	991.794	1.351.678	1.797.285	2.009.530	2.206.546	2.732.977	1.639.549	

Tabel 3.14
Rata-Rata Upah Berdasarkan Pendidikan Di JABODETABEK, 2008-2010 (Lanjutan)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	PENDIDIKAN (*)						RATA - RATA
		≤SD	SMTP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
Kota Bogor	2008	450.797	601.626	1.146.838	715.429	1.242.639	2.347.484	688.387
	2009	598.731	847.009	1.342.366	1.074.668	1.996.265	3.764.492	1.273.465
	2010	583.723	1.028.938	1.322.557	1.168.804	1.789.767	3.290.068	1.270.475
	2011	991.524	1.259.974	1.501.409	1.879.682	2.917.470	3.809.050	1.924.566
Kota Bekasi	2008	570.930	569.004	811.200	831.114	1.108.536	1.540.035	732.816
	2009	748.921	1.116.958	1.736.741	1.591.711	2.742.001	3.608.779	1.873.393
	2010	841.239	1.508.355	1.984.220	1.616.061	2.444.244	3.465.692	1.985.940
	2011	1.001.917	2.084.650	2.329.620	2.043.171	3.466.224	3.787.284	2.441.304
Kota Depok	2008	475.988	599.789	754.665	1.003.647	1.130.487	1.773.015	719.291
	2009	779.098	1.030.098	1.485.878	1.379.282	2.743.876	4.667.074	2.057.158
	2010	795.384	1.488.797	1.522.155	1.530.356	3.535.042	4.108.185	2.075.951
	2011	818.275	1.686.659	1.682.390	1.675.898	2.513.691	3.839.476	1.801.664
Kab Tangerang	2008	703.083	985.259	1.677.836	994.153	1.817.799	3.902.345	1.351.494
	2009	889.568	1.096.986	1.553.614	1.598.870	2.061.115	3.250.424	1.412.093
	2010	862.397	1.138.724	1.448.502	1.525.756	2.065.211	2.769.758	1.326.305
	2011	933.095	1.210.109	1.534.046	1.431.156	2.619.252	3.262.660	1.371.656
Kota Tangerang	2008	664.448	848.236	1.079.270	1.110.369	1.728.327	2.506.652	1.183.849
	2009	992.105	1.228.898	1.643.106	1.707.268	2.729.463	3.086.814	1.695.489
	2010	890.519	1.202.043	1.484.491	1.565.441	2.309.279	2.977.388	1.599.166
	2011	1.162.429	1.300.128	1.441.042	1.459.655	2.580.156	2.651.718	1.583.987
Kota Tangerang Selatan	2008	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0
	2010	945.772	1.765.068	1.528.978	1.854.490	2.561.029	4.681.174	2.256.986
	2011	956.337	1.628.173	2.019.652	1.720.363	3.018.848	6.750.056	2.913.028

Rata-rata upah pekerja di wilayah JABODETABEK sebesar Rp1.941.733 dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata upah di tingkat nasional pada tahun 2011 sebesar Rp1.342.594. rupiah. Rata-rata upah tertinggi di wilayah JABODETABEK adalah kota Tangerang yaitu sebesar Rp2.913.028 kemudian diikuti oleh Jakarta selatan dan Kota Bekasi dengan besaran berturut-turut Rp2.564.788 rupiah dan Rp2.441.304.

Perbedaan upah ini akan merupakan faktor penarik migran untuk bekerja ke daerah-daerah yang mempunyai upah yang lebih tinggi. Namun dengan menggunakan data Sakernas ini, dimana survey dilakukan di daerah tempat tinggal responden sehingga mencerminkan rata-rata upah pekerja yang tinggal di daerah survey. Dalam realitanya, banyak pekerja-pekerja JABODETABEK yang tinggal di Bodetabek dan bekerja di wilayah DKI Jakarta sehingga upah yang diterima sebenarnya merupakan upah di tempat mereka bekerja.

Rata-rata upah tertinggi berdasarkan jenis pekerjaan adalah jenis tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan yaitu sebesar Rp 5.116.214, kemudian jenis pekerjaan lainnya sebesar Rp 3.144.200 dan tenaga professional, teknisi dan yang sejenis sebesar Rp3.046.959.

Rata-rata upah berdasarkan lapangan usaha tertinggi adalah pada pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp4.761.377. Rata-rata upah tertinggi berikutnya berdasarkan lapangan usaha ada pada sektor listrik, gas dan air sebesar Rp2.640.099 kemudian sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan sebesar Rp2.427.521.

Rata-rata upah menurut pendidikan yang tertinggi adalah pada pendidikan terakhir Universitas yaitu sebesar Rp4.147.341. Rata-rata upah tertinggi berikutnya berdasarkan pendidikan ada pada pendidikan Diplomal/II/III/Akademi sebesar Rp2.703.158 kemudian SMTA Umum sebesar Rp1.744.057.

Rata-rata upah berdasarkan status pekerjaan tertinggi adalah pada buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar Rp1.999.958. Rata-rata upah tertinggi berikutnya berdasarkan status pekerjaan adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar Rp1.087.700 kemudian pekerja bebas di pertanian sebesar Rp347.008.

Tabel 3.15
Rata-rata Upah Pekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan, 2008 - 2010

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	JENIS PEKERJAAN (*)										RATA - RATA
		0/1	2	3	4	5	6	7/8/9	X/00			
Kepulauan Seribu	2008	2.371.775	6.240.000	1.675.714		0	1.006.110	881.451	1.105.157	1.835.745	1.442.260	
	2009	1.975.280	3.050.000	1.510.888	882.653	1.305.811	1.564.119	1.024.329	0		1.398.542	
	2010	1.815.080	1.500.000	1.691.704	407.083	914.609	1.003.210	1.153.882	2.850.000		1.313.140	
	2011	2.799.702	0	3.832.101	436.766	594.613	810.018	1.423.264	3.375.000		1.941.106	
	2008	2.646.313	2.283.740	1.456.169	742.882	578.209	1.059.891	860.878	4.470.000		1.090.191	
Jakarta Selatan	2009	3.078.101	11.007.393	2.427.114	1.572.374	1.548.050	1.150.000	1.151.535	3.376.248		2.289.730	
	2010	3.857.017	7.571.202	2.534.469	1.794.163	1.425.699	15.000.000	1.672.815	2.602.306		2.245.485	
	2011	4.502.518	14.163.302	2.692.168	2.098.650	1.446.769	0	1.572.817	4.487.588		2.564.788	
	2008	3.016.274	5.454.722	2.043.901	1.400.717	1.160.050	0	1.178.777	2.600.969		1.742.794	
	2009	2.868.145	4.254.844	2.275.880	1.373.689	1.594.985	300.000	1.185.302	3.031.302		1.942.304	
Jakarta Timur	2010	3.518.577	4.618.226	2.486.544	1.763.450	1.057.103	609.548	1.467.243	3.425.281		2.150.406	
	2011	2.548.033	3.505.177	2.605.693	1.829.960	974.796	194.012	1.373.542	2.941.129		1.879.845	
	2008	2.954.435	3.161.364	2.117.417	1.025.289	915.716	0	1.069.890	2.383.890		1.498.042	
	2009	2.835.026	4.720.434	1.963.446	1.185.526	1.286.956	0	929.328	2.394.882		1.609.425	
	2010	3.010.437	5.835.458	2.385.299	1.413.661	1.257.179	0	1.292.916	2.078.438		1.853.154	
Jakarta Pusat	2011	3.869.989	6.904.443	2.853.086	2.696.465	1.551.530	0	1.299.082	4.220.349		2.367.709	
	2008	2.879.014	5.777.680	2.200.442	1.793.669	1.032.336	850.000	1.061.989	2.176.433		1.536.328	
	2009	3.312.958	7.865.250	2.438.619	1.339.419	1.276.247	819.949	1.051.781	2.062.793		1.705.023	
	2010	3.789.051	4.208.329	2.176.970	1.601.863	1.048.973	1.134.783	1.232.062	2.538.655		1.696.464	
	2011	3.327.334	4.519.330	2.654.339	1.452.199	1.119.693	0	1.316.103	3.272.105		1.843.983	
Jakarta Utara	2008	3.155.579	7.206.290	1.737.833	1.114.496	974.624	1.914.787	1.084.106	3.248.915		1.374.383	
	2009	2.380.081	10.086.297	1.999.213	1.487.557	1.095.092	2.350.982	1.125.840	2.979.625		1.592.144	
	2010	2.679.388	7.108.811	2.255.366	1.870.631	1.067.820	1.231.999	1.377.068	3.302.126		1.732.035	
	2011	2.258.352	4.223.218	2.456.414	1.262.749	1.115.634	941.271	1.397.337	2.980.783		1.714.336	
	2008	1.576.216	2.304.596	1.956.880	804.089	813.017	392.047	752.389	2.535.399		871.594	
Kab Bogor	2009	1.673.836	3.938.721	1.423.464	831.584	1.070.666	632.310	810.280	3.086.017		979.080	
	2010	1.863.643	4.274.732	1.891.130	754.171	883.743	482.957	996.534	1.100.000		1.061.242	
	2011	2.662.441	2.354.677	2.043.309	886.904	1.027.639	453.571	1.023.965	2.138.500		1.196.742	
	2008	2.304.945	4.337.046	1.745.010	888.538	944.550	689.895	1.209.788	0		1.316.511	
	2009	2.404.665	4.035.627	1.717.326	1.663.397	1.266.625	740.528	1.230.796	2.926.342		1.451.326	
Kab Bekasi	2010	2.242.396	4.521.101	1.994.819	1.361.735	1.291.121	531.888	1.457.091	2.838.301		1.530.464	
	2011	2.202.899	3.246.870	1.970.387	1.780.464	1.299.959	609.748	1.660.416	0		1.639.549	

Tabel 3.16
Rata Rata Upah Berdasarkan Lapangan Usaha di JABODETABEK 2008-2011

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	LAPANGAN USAHA (*)										RATA - RATA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Kepulauan Seribu	2008	879.324	3.662.222	1.103.359	813.333	1.105.664	1.314.876	1.280.674	390.000	1.748.955	1.442.260	
	2009	1.309.173	0	1.034.146	1.221.484	1.222.908	1.484.494	0	1.275.806	1.526.840	1.398.542	
	2010	957.138	1.900.000	1.447.253	445.455	1.272.525	1.319.726	1.162.298	4.900.000	1.377.870	1.313.140	
	2011	810.018	5.042.434	1.454.240	492.594	1.070.921	595.607	1.224.127	1.155.000	2.559.789	1.941.106	
Jakarta Selatan	2008	1.059.891	0	1.069.736	2.880.094	935.441	814.437	1.126.712	1.823.206	1.108.060	1.090.191	
	2009	3.715.609	4.390.862	3.557.845	2.859.829	2.375.458	1.705.930	3.187.218	3.313.703	1.657.616	2.289.730	
	2010	5.299.475	7.637.224	2.134.920	2.849.543	2.119.921	1.801.543	3.265.352	2.776.652	1.991.698	2.245.485	
	2011	2.625.000	9.736.294	4.057.509	1.577.367	2.466.455	1.793.237	3.361.375	2.912.230	2.311.404	2.564.788	
Jakarta Timur	2008	0	6.562.571	1.319.867	1.475.266	2.442.579	1.374.962	2.458.706	2.666.420	1.638.847	1.742.794	
	2009	300.000	6.274.038	1.673.412	2.264.679	1.850.636	1.561.265	2.521.328	2.709.718	1.948.485	1.942.304	
	2010	609.548	3.827.126	2.185.507	1.857.491	2.124.885	2.024.914	2.302.574	2.528.592	2.064.471	2.150.406	
	2011	939.703	4.825.000	1.396.360	1.821.671	1.787.018	1.711.411	2.400.115	2.385.132	1.915.816	1.879.845	
Jakarta Pusat	2008	0	3.978.732	1.538.920	1.784.154	1.621.023	1.215.003	2.036.642	2.298.897	1.268.204	1.498.042	
	2009	0	2.874.538	1.794.667	514.388	1.471.883	1.419.582	1.838.829	2.641.050	1.281.592	1.609.425	
	2010	2.471.075	4.631.588	2.119.064	2.319.743	3.176.791	1.563.171	1.897.684	2.431.465	1.613.541	1.853.154	
	2011	2.825.000	2.288.767	2.040.935	1.025.000	2.739.679	2.158.778	2.898.674	3.260.876	1.887.291	2.367.709	
Jakarta Barat	2008	850.000	24.940.000	1.395.748	1.813.105	1.931.546	1.747.044	1.448.881	1.990.189	1.248.510	1.536.328	
	2009	1.850.768	7.346.192	1.602.060	1.851.020	1.766.590	1.825.041	1.589.742	2.774.835	1.358.294	1.705.023	
	2010	4.013.626	2.018.839	1.473.965	1.696.291	2.380.822	1.704.454	1.829.795	2.598.627	1.819.151	1.696.464	
	2011	4.949.446	0	1.713.469	1.417.422	2.241.093	1.544.828	2.121.795	2.617.168	1.819.151	1.843.983	
Jakarta Utara	2008	1.914.787	3.330.460	1.331.133	1.711.941	1.687.598	1.137.241	1.637.149	1.934.702	1.246.270	1.374.383	
	2009	2.231.803	1.250.000	1.515.704	1.880.954	1.632.581	1.911.361	1.767.108	2.228.325	1.298.080	1.592.144	
	2010	1.207.248	3.185.028	1.668.699	4.500.000	1.981.748	1.742.483	2.010.477	2.282.202	1.492.555	1.732.035	
	2011	941.271	4.435.564	1.470.499	2.400.000	1.793.515	1.359.103	2.433.314	2.060.698	1.754.162	1.714.336	
Kab Bogor	2008	420.809	814.404	809.938	1.250.000	695.221	860.763	1.237.723	1.416.887	1.167.622	871.594	
	2009	455.717	925.857	1.098.855	1.494.978	866.356	937.733	886.249	1.322.342	1.146.194	979.080	
	2010	495.482	1.156.609	1.013.126	1.233.658	1.092.926	874.234	1.265.318	1.683.787	1.451.315	1.061.242	
	2011	472.887	1.703.051	1.050.538	1.669.165	1.211.372	1.042.412	1.539.470	2.381.093	1.410.686	1.196.742	
Kab Bekasi	2008	689.894	1.087.653	1.500.920	750.000	1.323.740	922.977	2.121.628	1.514.563	1.071.731	1.316.511	
	2009	701.694	4.990.000	1.653.285	2.334.133	1.439.147	1.396.452	1.572.489	1.980.988	1.307.270	1.451.326	
	2010	531.888	913.305	1.687.330	1.961.630	1.829.718	1.188.466	1.869.802	1.994.791	1.372.611	1.530.464	
	2011	623.932	1.365.000	1.844.423	4.387.872	1.588.752	1.538.776	1.661.289	1.648.557	1.555.729	1.639.549	

Tabel 3.16
Rata-rata Upah Berdasarkan Lapangan Usaha di Jabodetabek 2008 - 2011 (Lanjutan)

KABUPATEN/ KOTA	TAHUN	LAPANGAN USAHA (*)									RATA - RATA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Kota Bogor	2008	1.059.891	0		1.069.736	2.880.093	935.441	814.436	1.126.711	1.823.205	1.108.059	1.090.190
	2009	894.911	140.000		1.220.809	1.624.948	948.333	843.386	1.043.619	1.866.935	1.571.564	1.273.465
	2010	1.182.821	2.954.444		1.309.449	858.352	1.131.010	1.001.966	2.133.583	1.522.545	1.258.969	1.270.475
	2011	1.312.517	0		1.376.836	540.000	2.375.838	1.535.244	1.812.568	2.321.228	2.111.071	1.924.566
	2008	1.609.583	3.857.920		1.518.550	5.715.129	1.709.196	1.494.791	2.010.447	2.412.154	1.396.480	1.668.110
Kota Bekasi	2009	1.553.528	6.726.974		1.683.297	2.821.332	2.285.040	1.891.901	2.445.684	3.364.199	1.468.519	1.873.393
	2010	693.858	4.052.555		2.028.969	1.625.978	2.095.105	1.600.104	2.179.882	2.986.543	1.729.583	1.985.940
	2011	6.473.477	4.714.699		2.554.041	3.117.667	2.035.228	1.857.748	3.048.350	2.943.608	2.290.795	2.441.304
	2008	3.353.537	5.100.469		1.327.935	1.181.193	1.630.487	1.151.367	2.340.284	2.426.065	1.272.242	1.573.955
	2009	1.151.732	12.944.583		1.735.399	1.792.362	3.129.730	1.459.533	2.698.573	3.303.672	1.586.004	2.057.158
Kota Depok	2010	2.087.221	6.258.168		1.946.580	1.715.766	2.471.190	1.659.892	3.050.101	2.678.199	1.839.875	2.075.951
	2011	479.928	3.182.539		1.519.228	10.064.779	1.437.564	1.460.760	3.177.196	2.309.068	1.685.217	1.801.664
	2008	2.200.963	5.333.068		961.824	926.903	1.069.847	2.104.213	1.601.499	2.185.082	1.111.998	1.351.494
	2009	721.949	2.308.729		1.336.118	1.729.863	1.409.108	1.374.431	1.879.270	1.891.525	1.549.770	1.412.093
	2010	713.098	1.119.365		1.292.925	1.640.619	1.462.043	1.176.710	1.432.304	2.242.452	1.351.600	1.326.305
Kota Tangerang	2011	654.130	3.125.000		1.328.493	1.166.164	1.454.010	1.194.376	1.818.394	1.905.154	1.510.135	1.371.656
	2008	492.752	1.432.490		1.021.697	791.044	1.122.653	940.308	1.969.602	1.575.563	1.302.901	1.183.849
	2009	1.535.581	10.425.188		1.532.387	1.985.500	1.754.250	1.462.871	2.634.706	2.170.792	1.601.978	1.695.489
	2010	1.350.000	6.664.791		1.415.791	4.500.000	1.511.609	1.343.289	2.403.453	2.286.731	1.520.389	1.599.166
	2011	1.952.621	7.222.771		1.474.217	2.506.273	2.058.501	1.486.250	1.647.859	1.754.630	1.550.191	1.583.987
Kota Tangerang Selatan	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	870.898	8.578.274		3.127.715	2.635.879	1.892.953	1.875.632	2.286.652	2.682.224	2.023.887	2.256.986
	2011	6.837.281	19.018.160		2.183.222	4.775.418	2.473.682	2.005.230	2.948.764	4.330.849	2.474.721	2.913.028

Tabel 3.17
Rata-Rata Upah Berdasarkan Status Pekerjaan Di JABODETABEK, 2008-2011

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	STATUS PEKERJAAN (*)							RATA - RATA	
		1	2	3	4	5	6	7		
Kepulauan Seribu	2008	0	0	0	0	1.457.975	0	1.027.590	0	1.442.260
	2009	0	0	0	0	1.475.758	1.050.000	548.894	0	1.398.542
	2010	0	0	0	0	1.359.435	0	480.604	0	1.313.140
	2011	0	0	0	0	1.998.594	0	1.387.246	0	1.941.106
	2008	0	0	0	0	1.147.666	550.938	551.158	0	1.090.191
Jakarta Selatan	2009	0	0	0	0	2.345.324	0	919.914	0	2.289.730
	2010	0	0	0	0	2.278.863	0	1.356.924	0	2.245.485
	2011	0	0	0	0	2.644.677	0	933.915	0	2.564.788
	2008	0	0	0	0	1.767.024	0	727.161	0	1.742.794
	2009	0	0	0	0	1.971.073	300.000	752.367	0	1.942.304
Jakarta Timur	2010	0	0	0	0	2.181.512	400.000	939.644	0	2.150.406
	2011	0	0	0	0	1.912.283	0	1.104.698	0	1.879.845
	2008	0	0	0	0	1.550.321	0	855.506	0	1.498.042
	2009	0	0	0	0	1.687.245	0	597.754	0	1.609.425
	2010	0	0	0	0	1.916.919	0	825.754	0	1.853.154
Jakarta Barat	2011	0	0	0	0	2.393.289	0	1.484.375	0	2.367.709
	2008	0	0	0	0	1.553.778	850.000	809.113	0	1.536.328
	2009	0	0	0	0	1.725.495	0	734.444	0	1.705.023
	2010	0	0	0	0	1.732.267	0	914.661	0	1.696.464
	2011	0	0	0	0	1.859.574	0	1.192.286	0	1.843.983
Jakarta Utara	2008	0	0	0	0	1.405.925	1.326.081	778.338	0	1.374.383
	2009	0	0	0	0	1.625.054	2.970.335	769.801	0	1.592.144
	2010	0	0	0	0	1.773.501	0	868.574	0	1.732.035
	2011	0	0	0	0	1.747.373	600.000	1.032.840	0	1.714.336
	2008	0	0	0	0	973.671	361.655	568.996	0	871.594
Kab Bogor	2009	0	0	0	0	1.121.089	354.327	556.423	0	979.080
	2010	0	0	0	0	1.174.277	441.219	860.596	0	1.061.242
	2011	0	0	0	0	1.353.154	433.045	685.417	0	1.196.742
	2008	0	0	0	0	1.541.297	571.913	626.994	0	1.316.511
	2009	0	0	0	0	1.609.895	554.408	980.214	0	1.451.326
Kab Bekasi	2010	0	0	0	0	1.604.776	558.900	1.075.699	0	1.530.464
	2011	0	0	0	0	1.760.753	611.123	886.570	0	1.639.549

Tabel 3.18
Rata-Rata Upah Berdasarkan Status Pekerjaan Di JABODETABEK, 2008-2011

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	STATUS PEKERJAAN (*)							RATA - RATA	
		1	2	3	4	5	6	7		
Kota Bogor	2008	0	0	0	0	1.147.666	550.938	551.158	0	1.090.191
	2009	0	0	0	0	1.356.901	404.026	691.319	0	1.273.465
	2010	0	0	0	0	1.336.018	512.957	551.502	0	1.270.475
	2011	0	0	0	0	2.001.612	720.000	1.090.336	0	1.924.566
	2008	0	0	0	0	1.725.115	400.000	929.404	0	1.668.111
Kota Bekasi	2009	0	0	0	0	1.919.011	450.000	1.087.223	0	1.873.393
	2010	0	0	0	0	2.040.806	400.000	1.005.939	0	1.985.940
	2011	0	0	0	0	2.472.785	0	1.115.302	0	2.441.304
	2008	0	0	0	0	1.614.037	393.088	661.595	0	1.573.956
	2009	0	0	0	0	2.111.415	781.185	898.701	0	2.057.158
Kota Depok	2010	0	0	0	0	2.102.921	500.000	1.199.005	0	2.075.951
	2011	0	0	0	0	1.860.606	0	903.617	0	1.801.664
	2008	0	0	0	0	1.397.268	730.863	849.787	0	1.351.494
	2009	0	0	0	0	1.453.984	414.104	977.059	0	1.412.093
	2010	0	0	0	0	1.368.989	727.013	888.747	0	1.326.305
Kota Tangerang	2011	0	0	0	0	1.419.026	493.948	834.300	0	1.371.656
	2008	0	0	0	0	1.196.645	650.000	925.636	0	1.183.850
	2009	0	0	0	0	1.727.340	0	542.257	0	1.695.489
	2010	0	0	0	0	1.654.732	0	698.068	0	1.599.166
	2011	0	0	0	0	1.613.037	2.000.000	1.138.055	0	1.583.987
Kota Tangerang Selatan	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	2.277.160	788.526	1.466.787	0	2.256.986
	2011	0	0	0	0	2.962.642	0	1.438.846	0	2.913.028

*) 1. Berusaha sendiri, 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3. Berusaha dibantu buruh tetap, 4. Buruh/Karyawan/Pegawai, 5. Pekerja bebas di Pertanian, 6. Pekerja bebas di Non Pertanian, 7. Pekerja tidak dibayar

BAB 4.

POLA MIGRASI MASUK DAN URBANISASI

4.1. PERBEDAAN PENGERTIAN MIGRASI DAN URBANISASI

Secara populer urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun urbanisasi sesungguhnya bermakna sebagai tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu negara ataupun suatu wilayah (region). Biasanya hal tersebut diukur sebagai proporsi jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan terhadap total penduduk. Hal ini perlu juga dibedakan dari pertumbuhan kota (*urban growth*), yang diartikan sebagai laju (rate) kenaikan penduduk kota, baik untuk masing-masing kota secara individu maupun perkotaan secara nasional. Namun demikian, sesungguhnya keduanya saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) Migrasi penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan; (2) pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan itu sendiri; dan (3) adanya reklasifikasi wilayah dari perdesaan ke perkotaan. Dengan demikian, secara demografis, urbanisasi tidak sama dengan migrasi dari perdesaan ke perkotaan, meski di dalamnya terdapat proses migrasi perdesaan ke perkotaan.

Pada contoh di Bab 2 dijelaskan jika suatu daerah memiliki angka urbanisasi dari 30 persen pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 42 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu lima tahun daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar 12 persen. Angka 12 persen ini tidak berarti sama dengan terjadinya perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan sebesar 12 persen. Angka 12 persen merupakan hasil dari kombinasi tiga faktor penyebab urbanisasi yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini terlibat pula adanya faktor pertumbuhan alamiah (selisih antara angka kelahiran dan angka kematian) dan adanya reklasifikasi wilayah.

Reklasifikasi wilayah berarti terjadinya perubahan karakteristik suatu wilayah (biasanya desa) yang semula bersifat perdesaan menjadi perkotaan. Peningkatan urbanisasi bisa jadi disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah desa-desa yang berubah karakteristik dari perdesaan ke bersifat perkotaan.

Badan Pusat Statistik telah beberapa kali membuat definisi desa pekotaan, yaitu tahun 1961; tahun 1871; 1980 dan 1990; dan terakhir tahun 2000.

Dari uraian ini jelas bahwa migrasi (terutama dari wilayah perdesaan ke perkotaan) merupakan salah satu faktor penentu dalam proses urbanisasi (peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan). Migrasi juga merupakan salah satu komponen dinamika kependudukan di antara dua komponen lainnya (kelahiran dan kematian). Dalam kajian demografis, variabel kelahiran dan kematian telah mempunyai konsep konsep yang baku dan relatif mudah ditentukan karena merupakan kejadian biologis. Sementara itu migrasi merupakan kejadian perilaku yang dapat sangat variatif. Manusia sebagai makhluk hidup dapat sangat *mobile*. Dari waktu ke waktu manusia dapat berada di tempat yang berbeda-beda dengan segala cara dan berbagai alasan pindah. Mobilitas manusia ini bisa dalam jangka waktu yang lebih lama (mobilitas permanen), maupun dalam waktu yang relatif sebentar (mobilitas non permanen).

Dalam literatur demografi, istilah migrasi dapat dipertukarkan dengan istilah mobilitas. Namun secara umum istilah migrasi biasanya mengacu kepada istilah mobilitas yang bersifat permanen. Shryock dan Siegel (1976) memberi penjelasan istilah migrasi mengacu kepada mobilitas horizontal atau mobilitas keruangan (*spatial mobility*) ataupun mobilitas geografis (*geographical mobility*), bukan mobilitas vertikal (*social mobility*), meskipun antara mobilitas spasial dan mobilitas sosial bisa saling berkaitan.

United Nations (1970) memberi pengertian migrasi sebagai perubahan tempat tinggal secara permanen dari satu unit geografis tertentu ke unit geografis yang lain. Dalam definisi tersebut tercakup dua unsur pokok yaitu dimensi waktu dan dimensi geografis. Dalam hal ini UN memberi unsur waktu dengan permanenitas dan unsur jarak yang dibatasi dengan unit geografis. Dengan demikian, seseorang dikatakan sebagai migran jika ia berpindah tempat kediaman dari suatu unit geografis atau unit politis tertentu ke unit geografis atau politis lainnya.

Mantara (1978) menyatakan adanya dua jenis migrasi, yaitu migrasi permanen dan non permanen. Kedua istilah dibedakan menurut lamanya tinggal di daerah tujuan. BPS (1980) memberi batasan migrasi permanen jika seseorang tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut atau berniat tinggal di daerah tujuan selama enam bulan secara berturut-turut.

4.2. FAKTOR PENENTU MIGRASI

Dalam keputusan bermigrasi terkandung keinginan untuk memperbaiki salah satu aspek kehidupan, sehingga keputusan seseorang melakukan migrasi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menurut Lee (1966) ada empat faktor yang patut diperhatikan dalam studi migrasi penduduk, yaitu (1) faktor-faktor yang terkait dengan daerah asal; (2) faktor-faktor yang terkait dengan daerah tujuan; (3) rintangan antara; dan (4) faktor-faktor yang bersifat individual.

Selanjutnya Lee mengungkapkan bahwa masing-masing daerah terdapat faktor-faktor yang menahan seseorang untuk tidak meninggalkan daerahnya atau menarik orang untuk pindah ke daerah lain (faktor ‘plus’ di daerah asal maupun tujuan). Ada pula faktor yang memaksa mereka untuk meninggalkan daerah tersebut atau tidak mendatangi daerah lain (faktor ‘minus’ di daerah asal maupun daerah tujuan). Selain itu ada pula faktor-faktor yang bersifat netral yang tidak memberikan pengaruh baik positif maupun negatif.

Besarnya jumlah pendatang untuk menetap pada suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya faktor penarik (*pull factor*). Biasanya semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan menciptakan berbagai faktor penarik, seperti perkembangan industry, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Kondisi ini diminati oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk bermigrasi ke luar daerahnya. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas, jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang terbatas dan kurang memadai, serta fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Todaro bersama rekannya John Harris (dalam Todaro, 1976) memanfaatkan sekaligus memperluas kerangka dasar Todaro untuk membangun model pertukaran internal dua sektor tentang migrasi dan pengangguran yang memungkinkan perhatian yang lebih eksplisit mengenai dampak migrasi terhadap pendapatan di perdesaan (daerah asal), tingkat output di perkotaan maupun di perdesaan serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kedua sektor tersebut adalah sektor perkotaan dan perdesaan yang dibedakan menurut produksi dan pendapatan.

Diasumsikan bahwa sektor perdesaan memproduksi barang-barang pertanian, sebagian diperdagangkan ke sektor perkotaan dengan balas jasa berupa barang-barang manufaktur yang merupakan hasil produksi sektor perkotaan. Sektor perdesaan memiliki pilihan antara menggunakan seluruh persediaan tenaga kerjanya untuk memproduksi barang-barang pertanian atau hanya menggunakan sebagian dan mengeksport sebagian lainnya ke sektor perkotaan (melalui migrasi) dengan balas jasa upah yang dibayarkan berupa barang-barang manufaktur. Dengan kata lain diasumsikan bahwa pendapatan yang diperoleh migran di perkotaan ditransfer seluruhnya ke perdesaan. Asumsi dasar model Todaro mengenai perilaku migrasi yang berdasar pada selisih positif antara pendapatan riil di perkotaan (yaitu tingkat upah dikali dengan probabilitas mendapatkan pekerjaan) dengan pendapatan di sektor perdesaan tetap digunakan dalam model ini.

Model Harris-Todaro (HT) merupakan perluasan dari model perdagangan dua sektor neoklasik. Dengan demikian asumsi dan proposisi model neoklasik tetap digunakan antara lain yang menyangkut adanya keragaman proporsi tingkat teknologi produksi di perkotaan dan perdesaan, perilaku neoklasik dalam penentuan tingkat penggunaan faktor produksi dan tingkat output, dan mekanisme teori perdagangan untuk menentukan nilai tukar antara barang-barang pertanian dan barang-barang manufaktur. Perluasan yang dilakukan adalah adanya persamaan migrasi di dalam model perdagangan dua sektor tersebut.

Meski secara teoritis perluasan yang dilakukan oleh Harris-Todaro telah mencakup aspek-aspek penting dalam interaksi pasar tenaga kerja antara perdesaan dan perkotaan, dari sisi penerapan empiris ternyata ditemukan banyak kelemahan dalam asumsi-asumsi yang, baik secara eksplisit maupun implisit, terkandung di dalam model tersebut. Sabot (1975) dalam Todaro (1976) misalnya, dalam penelitiannya yang menganalisis secara komparatif pasar kerja perdesaan-perkotaan di berbagai negara sedikitnya mengungkapkan tujuh asumsi yang perlu dimodifikasi agar sesuai dengan aspek institusional dan kenyataan empiris di negara-negara berkembang, yaitu:

1. Transfer pendapatan dari perdesaan ke perkotaan oleh migran kurang tepat bagi migran yang tidak memiliki aset di perdesaan dengan adanya lembaga *landlordship* (tuan tanah).
2. Asumsi homogenitas tenaga kerja tidak konsisten dengan sifat migran yang selektif.

3. Asumsi immobilitas kapital hanya berlaku bagi modal fisik, tidak bagi modal manusia yang terkandung dalam investasi pendidikan yang melengkapi investasi dalam bermigrasi.
4. Penyederhanaan ekonomi menjadi dua sektor tidak memadai karena pilihan yang dihadapi migran di perkotaan bukan hanya antara bekerja di sektor industri atau menganggur saja tapi ada sektor informal yang besar yang mampu menyerap sebagian besar dari mereka.
5. Sektor modern di perkotaan terbagi ke dalam dua atau lebih komponen pasar kerja dengan perbedaan-perbedaan yang berarti dalam karakteristik pekerja dan upah yang dibayarkan.
6. Sektor pertanian tidak homogen, utamanya di Asia, di mana terdapat stratifikasi yang besar dalam kepemilikan tanah.
7. Asumsi implisit bahwa informasi mengenai kesempatan-kesempatan yang ada tersedia di mana-mana, akurat dan dapat diperoleh secara gratis sangatlah tidak tepat. Ketidaksempurnaan sistem informasi perlu diperhitungkan dampaknya terhadap keputusan bermigrasi, terutama berkaitan dengan masalah pembiayaan untuk pindah.

Beberapa ahli lain terus menyempurnakan model migrasi HT ini. Dapat disebut antara lain Stiglitz di tahun 1974 (Basu, 2000), memperkenalkan adanya kesenjangan upah antara perkotaan dan perdesaan sebagai variabel endogen. Di samping itu ia juga mempertimbangkan adanya kemungkinan *labor turn over* dalam pasar kerja.

Namun secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian dan pengkajian ekonomi terhadap proses migrasi terutama di negara-negara berkembang setidaknya mencakup tiga hal. Pertama adalah mengenai penentu terjadinya migrasi. Teori ini memandang perpindahan penduduk sebagai respons dari adanya tingkat pendapatan yang lebih tinggi di daerah tujuan dibandingkan dengan di daerah asal, sehingga dalam jangka panjang dapat mengkompensasi biaya kebatalan (*opportunity cost*) yang timbul akibat proses migrasi dan mencari pekerjaan di tempat baru tersebut.

Terkait dengan teori tersebut, studi tentang keadaan pasar kerja di daerah tujuan menjadi hal kedua yang mendapat perhatian besar dalam analisis ekonomi mengenai migrasi. Kondisi pasar kerja di daerah tujuan, secara

khusus di perkotaan, merupakan faktor penting yang menentukan besar kecilnya rasio antara keuntungan social yang diperoleh akibat migrasi dengan biaya yang ditimbulkannya. Sepanjang teori menyatakan bahwa penawaran dan permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah nyata, maka diasumsikan bahwa pergerakan tingkat upah akan secara otomatis menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja di perkotaan. Namun kenyataan timbulnya tingkat pengangguran yang besar di perkotaan menyebabkan masalah penyesuaian tingkat upah tersebut menjadi bahasan yang menarik dalam analisis dan formulasi kebijakan pembangunan.

Aliran lain untuk menganalisis timbulnya minat melakukan migrasi adalah “*dual labor market theory*”, yang mengemukakan bahwa migrasi penduduk terjadi karena adanya tenaga kerja yang bersifat hakiki (intrinsic labour demand) pada masyarakat industry moderen (Piore, 1979). Menurut paham ini migrasi terjadi karena adanya keperluan terhadap kualifikasi tenaga kerja tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Dengan demikian migrasi terjadi bukan karena *Push Factor* yang di daerah asal, melainkan lebih karena adanya *Pull Factor* pada daerah tujuan, yaitu adanya keperluan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu tidak terelakkan.

Dari berbagai teori di atas, tampaknya pembangunan ekonomi merupakan pemicu utama dalam terjadinya arus mobilitas atau perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang dianggap menjanjikan kehidupan yang lebih baik lagi badi dirinya dan keluarganya, yang tidak lain adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonoin dibandingkan dengan tempat asalnya.

Banyak teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk khususnya mobilitas tenaga kerja sebagai akibat dari semakin meningkatnya teknologi informasi dan sarana transportasi yang lebih memungkinkan semakin luasnya informasi antar daerah, terutama yang berkaitan dengan informasi upah tenaga kerja.

4.3. MIGRASI MASUK DI WILAYAH JABODETABEK

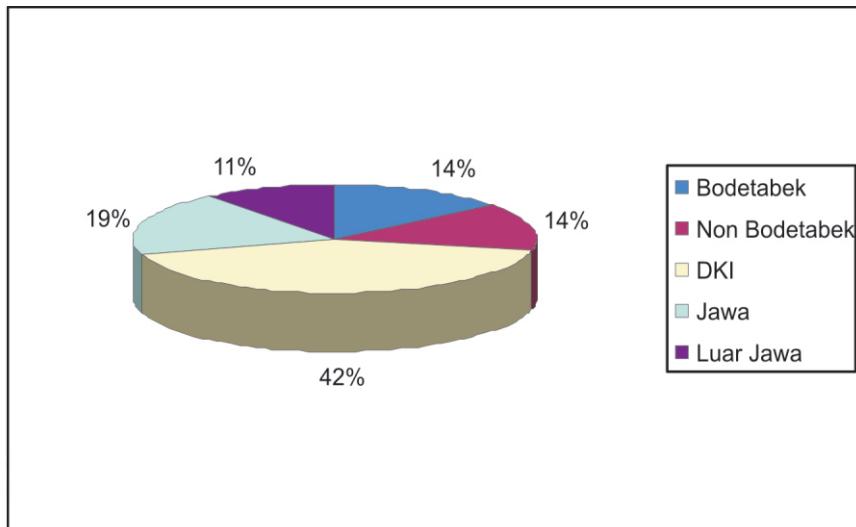
Sumber data untuk keperluan analisis migrasi di Indonesia yang relatif dapat dipertanggungjawabkan secara *scientific* adalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Dengan demikian sumber data migrasi untuk keperluan analisis ini idealnya adalah Sensus Penduduk 2010. Namun karena terkendala oleh aspek waktu dalam pengolahannya, maka

untuk sementara tulisan ini menggunakan data SUPAS 2005 yang pengolahannya dilakukan oleh Saepudin (2007), memperlihatkan analisis migrasi masuk tenaga kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) ke wilayah Bodetabek (Bogor – Depok - Tangerang – Bekasi).

Menurut analisis tersebut migran risen tenaga kerja yang masuk ke wilayah Bodetabek berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Proporsi daerah asal terbesar adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 42 persen, kemudian disusul oleh migran yang berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa sebesar 19 persen; migran yang berasal dari internal wilayah Bodetabek sebesar 14,4 persen; dari provinsi Jawa Barat dan Banten sebesar 14,2 persen; dan dari wilayah lain di Indonesia (luar Jawa) sebesar 10,8 persen (lihat Gambar 1).

Dari gambar tersebut terlihat adanya keterkaitan antara pola migrasi dan jarak sebagaimana dikemukakan oleh Ravenstein (1985). Terlihat pada gambar bahwa semakin dekat daerah asal dengan daerah tujuan, semakin besar proporsi migran yang masuk ke daerah tujuan. Kemudahan mencapai daerah tujuan (aksesibilitas) secara otomatis mengurangi biaya perjalanan bagi si individu, baik dari segi waktu maupun finansial bagi si migran sesuai dengan teori Todaro (1976).

Gambar 3
Distribusi Wilayah Asal Migran Tenaga Kerja ke Bodetabek (SUPAS 2005)



Sumber: Saepudin (2007)

Ketika melakukan keputusan bermigrasi, setiap individu memiliki alasan yang berbeda antara satu migran dengan migran lainnya. Hasil pengolahan data oleh Saepudin (2007) dalam hal alasan seseorang bermigrasi, ternyata berkaitan dengan daerah asal si migran. Alasan migran masuk berasal dari internal Bodetabek didominasi oleh faktor keluarga (ikut suami/istri/orang tua atau anak), yaitu sebesar 43,77 persen. Alasan lain adalah karena faktor pekerjaan (pindah kerja (29,3 persen); alasan ketiga karena faktor perumahan/pindah rumah (11,64 persen).

Migran berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten terutama juga disebabkan karena alasan keluarga, yaitu ikut suami/istri/orang tua atau anak (33,25 persen); karena alasan pekerjaan (35,46 persen); dan alasan karena mencari pekerjaan (18,40 persen). Sementara untuk migran yang berasal dari provinsi lain di Jawa maupun Luar Jawa lebih didominasi oleh karena alasan mencari pekerjaan, kemudian diikuti oleh alasan karena ikut suami/istri/orang tua/anak.

Khusus migran berasal dari DKI Jakarta, migran yang masuk ke wilayah Bodetabek lebih didominasi oleh alasan keluarga, yaitu ikut suami/istri/orang tua/anak (43,45 persen) dan karena alasan perumahan (21,45 persen); serta karena alasan pekerjaan/pindah kerja (sekitar 16 persen). Banyaknya penduduk DKI Jakarta masuk ke wilayah Bodetabek bukan karena alasan mencari pekerjaan, melainkan karena ketiga faktor di atas. Para migran ini masuk ke wilayah Bodetabek umumnya telah memiliki pekerjaan di DKI Jakarta. Hal inilah yang kemudian memunculkan fenomena arus mobilitas non permanen, yaitu commuting (ulang alik) antara wilayah pinggiran DKI Jakarta menuju DKI Jakarta.

Gejala pergeseran fungsi kota ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) atau yang disebut dengan *urban sprawl*, yaitu proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar telah diamati oleh Giyarsih, 2001. Gejala ini muncul karena DKI Jakarta sebagai ibukota negara mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi, penduduknya padat, dan bangunan-bangunan semakin banyak sehingga mengakibatkan kota tersebut tidak mampu menampung lebih banyak penduduk lagi.

Gejala migrasi masuk ke Kota Depok sebagai salah satu tempat tujuan utama di wilayah Bodetabek telah dilakukan oleh Wulandari (2012) berdasarkan data Sensus Penduduk 2010. Perkembangan Kota Depok sebagai daerah permukiman penduduk DKI Jakarta terlihat dari alasan migran masuk

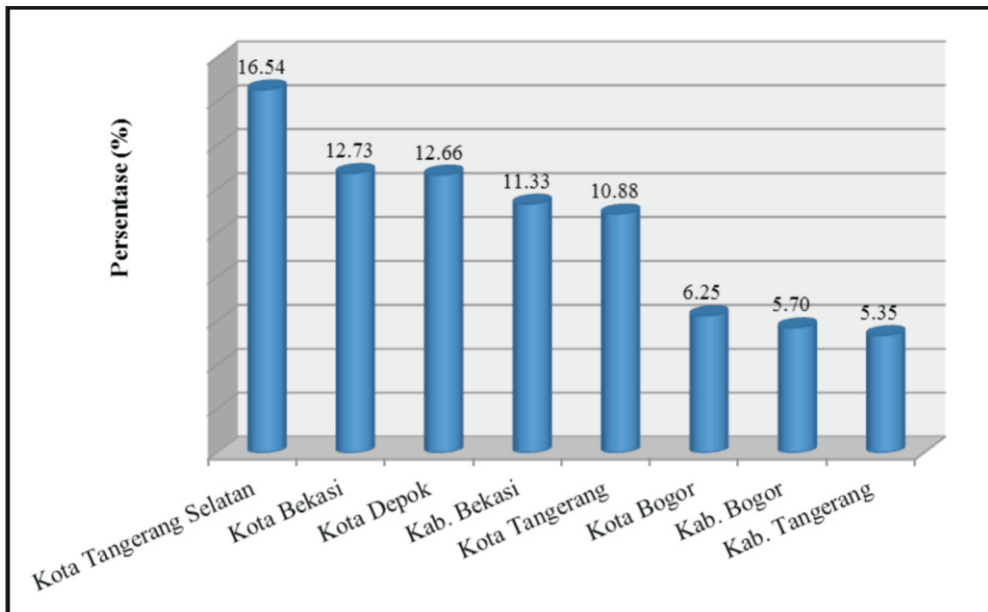
ke Kota Depok yang berasal dari DKI Jakarta. Jika dilihat menurut alasan pindah, pada umumnya para migran masuk ke Kota Depok adalah karena alasan keluarga dan perumahan terutama migran yang berasal dari DKI Jakarta. Alasan lainnya adalah karena pindah pekerjaan dan mencari pekerjaan, terutama pada migran yang berasal dari non DKI Jakarta (Chotib, 2008). Hal ini merupakan konsekuensi dari peran Kota Depok sebagai daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta sehingga Kota Depok turut berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang telah menarik penduduk desa untuk datang ke kota dalam upaya mendapatkan kesempatan kerja, terlebih ketika lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas. Fenomena ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (1976).

Berdasarkan data SUPAS 1995 dan SUPAS 2005, Chotib (2008) memperlihatkan migran masuk ke Kota Depok tidak hanya berasal dari DKI Jakarta saja, melainkan dari daerah lain di Indonesia. Menurut data SUPAS 1995, selain berasal dari DKI Jakarta (54,39 persen), migran yang masuk ke Kota Depok berasal dari Jawa Barat (28,07 persen) dan selebihnya dari Jawa Tengah (7,02 persen), Jawa Timur (7,02 persen), Lampung (1,75 persen) serta Kalimantan Barat (1,75 persen). Sedangkan menurut data SUPAS 2005, daerah asal migran ke Kota Depok relatif beragam walaupun DKI Jakarta dan Jawa Barat masih tetap mendominasi sebagai daerah asal migran, yaitu masing-masing 56,59 persen dan 19,09 persen.

Lebih lanjut Wulandari (2012) juga mengemukakan analisisnya berdasarkan publikasi hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS (<http://sp2010.bps.go.id>), yaitu sekitar 63,85 persen penduduk yang tinggal di Kota Depok terdiri kaum migran seumur hidup, artinya 63,85 persen penduduknya tidak dilahirkan di Kota Depok. Hanya sekitar 36,15 persen penduduk saja yang dilahirkan di Kota Depok. Demikian halnya dengan migrasi risen (*recent migration*) yang menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai migran jika provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang (saat pencacahan). Hasil Sensus Penduduk 2010 (<http://sp2010.bps.go.id>), sekitar 12,67 persen penduduk Kota Depok berstatus migran risen dan 87,33 persennya berstatus non migran. Dengan total penduduk Kota Depok yang berumur 5 tahun ke atas saat ini yang mencapai 1.567.702 jiwa, maka 198.423 jiwa merupakan penduduk pendatang baru atau lima tahun yang lalu belum tinggal di Kota Depok. Angka ini menggambarkan kondisi atau pola migrasi terkini yang terjadi di Kota Depok.

Demikian halnya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota Botabek lainnya maka menurut status migran risen dalam publikasi hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 oleh BPS (<http://sp2010.bps.go.id>), persentase migran masuk ke Kota Depok menempati urutan ketiga (12,66 persen) setelah Kota Tangerang Selatan (16,54 persen) dan Kota Bekasi (12,73 persen).

Gambar 4
Persentase Migran Risen Masuk ke Wilayah Bodetabek (SP 2010)



Sumber: Wulandari (2012).

Sumber data lain untuk analisis migrasi berasal dari registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tingkat kabupaten/kota. Data ini biasanya menyediakan informasi tentang jumlah penduduk yang datang (sebagai migrasi masuk) dan jumlah penduduk yang keluar (sebagai migrasi keluar). Selain itu, khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta setiap tahun selalu melakukan perhitungan jumlah penduduk yang melakukan mudik setiap menjelang lebaran (hari raya Idul Fitri) dan jumlah penduduk yang balik ke DKI Jakarta. Perhitungan ini menggunakan metode monitoring atau pengamatan di beberapa titik pantauan yang dianggap strategis dengan menghitung jumlah

kendaraan yang lewat keluar dari DKI Jakarta selama beberapa hari menjelang lebaran (mulai H-7 hingga H-1). Hal yang sama juga dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat masuk ke DKI Jakarta selama beberapa hari setelah lebaran (mulai H+1 hingga H+7).

Terlepas dari kelemahan yang ada pada metode ini, namun hasil perhitungan setidaknya dapat dijadikan acuan untuk memperkirakan jumlah penduduk yang melakukan mudik dari DKI Jakarta dan balik ke DKI Jakarta. Hasilnya cukup menarik untuk disimak, yaitu jumlah yang balik selalu lebih besar daripada jumlah yang mudik. Hal ini berarti setiap tahun selalu ada pendatang baru yang tinggal di provinsi ini dengan memanfaatkan jaringan sosial dan kekerabatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup melalui migrasi ke DKI Jakarta.

Tabel 4.1. Trend Jumlah Pemudik, Arus Balik dan Pendatang Baru ke Provinsi DKI Jakarta: 2004-2012

Tahun	Jumlah Pemudik	Jumlah Arus Balik	Jumlah Pendatang Baru
2004	2 213 812	2 404 168	190 356
2005	2 136 973	2 317 740	180 767
2006	2 439 992	2 564 419	124 427
2007	2 614 163	2 723 780	109 617
2008	2 828 508	2 916 981	88 473
2009	3 064 704	3 134 258	69 554
2010	3 291 492	3 350 707	59 215
2011	5 116 368	5 168 243	51 875
2012	5 701 619*)	5 738 466*)	36 847*)

Keterangan: *) Angka masih sangat sementara
 Sumber: Dinas Dukcapil DKI Jakarta (2012)

Tabel 4.1. di atas memperlihatkan jumlah pemudik, jumlah arus balik dan jumlah pendatang baru hasil pengamatan di beberapa titik pantauan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sejak tahun 2004 hingga 2012. Pada tabel terlihat jumlah pemudik terus mengalami peningkatan secara absolut selama periode 2004-2012 dari 2,2 juta hingga 5,70 juta jiwa. Begitu pula dengan jumlah yang balik ke DKI Jakarta, secara absolut mengalami peningkatan dari 2,4 juta jiwa hingga 5,74 juta jiwa selama periode 2004-2012. Pada tabel terlihat jumlah yang balik selalu lebih besar daripada yang mudik, dan selisihnya merupakan jumlah pendatang baru

yang tinggal di DKI Jakarta. Terlihat pula bahwa jumlah pendatang baru yang tinggal di DKI Jakarta mengalami penurunan secara absolut dari 190 ribu jiwa menjadi 36,8 ribu jiwa selama periode 2004-2012.

Penurunan trend migrasi ke DKI Jakarta bisa berarti bahwa DKI Jakarta bukan lagi menjadi tujuan utama para migran dari berbagai daerah. Ada kecenderungan peningkatan trend migran masuk ke wilayah-wilayah pinggiran DKI Jakarta (daerah Bodetabek). Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan memperlihatkan jumlah migran (pendatang baru) pasca lebaran tahun 2011 di tiap kecamatan di kota ini. Sayangnya, data ini tidak memperlihatkan perbandingan antartahun, melainkan perbandingan antarkecamatan sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Penduduk Urban yang Datang ke Wilayah Kota Tangerang Selatan
Pasca Idul Fitri 2011

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Serpong	394	183	577
2	Serpong Utara	434	343	777
3	Pondok Aren	465	288	753
4	Ciputat	619	504	1 123
5	Ciputat Timur	1 021	959	1 980
6	Pamulang	316	253	569
7	Setu	56	59	115
	Total	3 305	2 589	5 894

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Tangsel (2012)

Terlihat pada tabel di atas, para pendatang baru kebanyakan masuk ke Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur. Kedua kecamatan ini tampaknya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk juga industri, yang dapat menjadi daya tarik bagi para pendatang di wilayah sekitar Kota Tangerang Selatan, khususnya dari luar Bodetabek.

Sementara itu data dari Kantor Dinas Dukcapil Kota Tangerang memperlihatkan trend yang meningkat dari para migran yang datang ke Kota Tangerang. Data tahun 2009 memperlihatkan jumlah pendatang hanya sekitar 2,3 ribu jiwa. Namun pada tahun 2010, jumlahnya melonjak menjadi 13 ribu jiwa lebih dan tahun 2012 jumlahnya turun lagi menjadi 11 ribu jiwa lebih.

Kenaikan yang melonjak antara tahun 2009 hingga 2010 bisa jadi disebabkan oleh makin meningkatnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di samping memang adanya peningkatan jumlah migran. Sementara itu jumlah yang lebih rendah di tahun 2012 bisa jadi hanya fluktuasi sesaat.

Tabel 4.3
Jumlah Pendatang yang Masuk ke Kota Tangerang

Kecamatan	2009	2010	2012
Tangerang	208	729	986
Neglasari	104	255	320
Batucapeper	87	1577	907
Benda	26	889	415
Cipondoh	28	618	206
Pinang	244	1192	667
Ciledug	14	1639	290
Karang Tengah	693	906	1586
Larangan	35	553	1356
Karawaci	116	874	1911
Cibodas	591	553	1195
Periuk	21	1539	1372
Jatiuwung	128	1897	174
	2295	13221	11385

Sumber: Kantor Dinas Dukcapil Kota Tangerang (2012)

Tabel di atas memperlihatkan jumlah pendatang yang masuk ke Kota Tangerang terbanyak adalah menuju Kecamatan Karawaci, Kecamatan Periuk, Kecamatan Karang Tengah, kemudian diikuti oleh Kecamatan Cibodas dan Larangan. Sisanya para pendatang masuk ke kecamatan-kecamatan lain di Kota Tangerang.

Daerah lain yang menjadi magnet para pendatang adalah Kota Bekasi yang angka pertumbuhannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor migrasi. Berdasarkan data kependudukan Kota Bekasi tahun 2010, angka migrasi masuk sebesar 63,81 per 1000 penduduk. Artinya, di antara 1.000 penduduk terdapat 64 orang sebagai migran masuk ke kota ini. Jika diestimasi lebih lanjut, jumlah migran yang masuk ke kota ini sebanyak 148,988 jiwa (Dinas Dukcapil Kota Bekasi dan PT Intimulya Multikencana, 2011).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Bekasi dan PT Intimulya Multikencana (2011), pemilihan Kota Bekasi sebagai daerah tujuan migran dipertimbangkan antara lain karena memiliki aksesibilitas yang tinggi ke Kota Jakarta dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, kota ini juga tengah berkembang sebagai wilayah industri yang pertumbuhannya berlangsung stabil.

Sementara itu alasan para migran masuk ke Kota Bekasi di antaranya adalah karena alasan untuk bekerja di Kota Bekasi (28 persen); dekat dengan Kota Jakarta (25 persen); ikut keluarga (21 persen); pendidikan (10 persen) dan alasan politik dan lain-lain sebanyak 3 persen. Pendatang yang menjadikan Kota Bekasi sebagai tempat bermukim juga tidak sedikit, dan banyak berasal dari Jakarta. Hal ini yang menyebabkan terjadinya arus pergerakan ulang alik dari Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya yang jelas terlihat pada saat jam keberangkatan kerja dan waktu pulang kerja.

Daerah lain yang tidak kalah pentingnya yang juga berperan sebagai magnet para migran baik yang berasal dari luar JABODETABEK maupun internal JABODETABEK, adalah Kota Depok. Harian Pikiran Rakyat tanggal 21 September 2012 melaporkan hasil liputannya berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kependudukan Dinas Dukcapil Kota Depok. Menurut harian ini, Pemerintah Kota Depok telah menghasilkan pendapatan daerah sebesar Rp 2,06 milyar dari retribusi warga pendatang yang ingin menjadi penduduk Depok sejak Januari-Agustus 2012. Berdasarkan Peraturan Daerah no. 8 Tahun 2012, bagi setiap orang yang masuk ke Depok dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000 per jiwa.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa sejak Januari sampai dengan 24 Agustus 2012 terdapat 20.624 orang yang bermigrasi ke Depok. Sementara jumlah warga yang keluar dari Kota Depok sebanyak 11.823 orang. “Kalau dilihat di sini perbandingannya antara yang masuk dan keluar yaitu 2 banding satu,” ujar Epiyanti Kepala Bidang Kependudukan Dinas Dukcapil Kota Depok. Menurut Epi, adanya peraturan mengenai retribusi bagi warga pendatang tersebut bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebab perbandingan pertumbuhan penduduk akibat migrasi dengan kelahiran yaitu tiga banding satu. Retribusi itu memang berlaku sejak Januari tahun 2012.

Meskipun demikian, Epi mengakui adanya retribusi itu merupakan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun ini PAD dari retribusi tersebut ditargetkan sebesar Rp 1,1 miliar. Dengan demikian, jumlah retribusi

saat ini sudah jauh melampaui target. Jumlah itu kemungkinan tidak termasuk dengan warga pendatang yang baru masuk Depok sejak Idul Fitri yang lalu. Menurut Epi, pendatang tersebut biasanya belum mengurus administrasi di Dinas Kependudukan.

Sementara itu jumlah migran yang masuk ke Kota Bogor menurut data dari Kantor Dinas Dukcapil Kota Bogor tahun 2010 sebesar 2996 jiwa. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun 2008 dan 2009. Perbedaan jumlah yang sangat mencolok ini bisa jadi karena adanya tertib administrasi kependudukan yang terus menerus digalakkan, sehingga jumlah penduduk – khususnya pendatang – yang melapor ke kantor dinas ini jauh lebih besar. Umumnya para pendatang masuk ke Kota Bogor tinggal di Kecamatan Bogor Tengah, Tanah Sereal, dan Bogor Tengah. Sisanya masuk ke kecamatan-kecamatan lain di Kota Bogor.

Tabel 4.4
Jumlah Pendatang yang Masuk ke Kota Bogor

Kecamatan	2008	2009	2010
Bogor Selatan	1	1	474
Bogor Timur	0	0	497
Bogor Utara	12	12	451
Bogor Tengah	6	6	535
Bogor Barat	0	0	516
Tanah Sareal	1	1	523
Kota Bogor	20	20	2996

Sumber: Kantor Dinas Dukcapil Kota Bogor (2012).

Data-data diatas sebenarnya belum menunjukkan kondisi sesungguhnya, karena masih terdapat migrasi masuk yang tidak tercatat dalam system pendataan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah JABODETABEK. Migran masuk non permanen merupakan masalah tersendiri yang perlu segera dicari solusinya, karena faktanya mereka masuk dan arusnya cukup besar. Penelitian LDFEUI (1996) menunjukkan bahwa sekitar 48 persen penduduk di RW-RW padat dan kumuh merupakan pelaku mobilitas non permanen.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan melakukan operasi yustisi, namun upaya ini tidak akan efektif, jika akar persoalan kaum migran tidak tertangani dengan baik. Operasi yustisi hanya

memberikan *shock therapy* sesaat dan kemudian diabaikan. Mobilitas non permanen dalam peraturan perundangan administrasi kependudukan dan turunannya tidak diatur sama sekali. Hal ini yang juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah setempat. Sehingga penanganan untuk pelaku mobilitas non permanen menjadi lebih sulit bagi pemerintah daerah. Memaksa pelaku mobilitas non permanen untuk pindah penduduk, tidak dapat dilakukan karena berkaitan dengan HAM.

Mengapa mobilitas non permanen tidak tercatat adalah selain peraturannya belum ada, system pendaftaran penduduk menganut stelsel aktif, dimana masyarakat yang harus aktif melaporkan diri, sementara masyarakat sendiri tidak melapor karena tidak merasakan manfaat langsung dari pelaporan tersebut. Model ini seharusnya ditambah dengan pelayanan jemput bola, untuk memperoleh data pasti berapa banyak migrasi masuk yang tidak terdata tersebut. Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah mengaktifkan partisipasi masyarakat melalui RT dan jajarannya untuk memperoleh data penduduk pindah datang di wilayah masing-masing.

4.4. Urbanisasi di JABODETABEK

tingkat urbanisasi suatu negara atau wilayah sangat sensitif terhadap batasan (definisi) wilayah urban yang dipakai sebagai acuan. Pada bab terdahulu telah disampaikan adanya beberapa perubahan definisi wilayah urban yang digunakan dalam survei-survei ataupun pencacahan lengkap yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Batasan wilayah urban yang digunakan pada tahun 1971 berbeda dengan tahun 1980, demikian juga berbeda dengan batasan yang digunakan pada tahun 2000. Sejauh ini kriteria wilayah urban masih tetap menggunakan kriteria yang ditetapkan tahun 2000 berdasarkan scoring system dari tiga persyaratan, yaitu kepadatan penduduk 5000 orang atau lebih per kilometer persegi; jumlah rumah tangga pertanian 25 persen atau lebih kecil; dan adanya aksesibilitas terhadap sedikitnya delapan jenis fasilitas perkotaan.

Meski memiliki kelemahan, namun pada dasarnya definisi ‘desa-urban’ dan penduduk ‘desa-urban’ dapat dijadikan indikator bagi pengukuran tingkat urbanisasi di Indonesia. Perkembangan tingkat urbanisasi di Indonesia dapat diindikasikan dengan fakta bahwa pada tahun 1920 proporsi penduduk perkotaan baru mencapai 5,8 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan (Soegijoko dan Bulkin, 1994). Data terakhir dari SP 2010 menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 49,8 persen (BPS, 2012). Ini

berarti hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di wilayah-wilayah yang masuk klasifikasi perkotaan. Hasil sensus penduduk di Indonesia maupun SUPAS memperlihatkan adanya kecenderungan urbanisasi yang makin meningkat.

Proyeksi penduduk yang dibuat oleh Ananta dan Anwar (1994) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan terus meningkat menjadi 140,3 juta jiwa pada tahun 2020 dan 150 juta jiwa pada tahun 2025. Dilihat dari proporsinya atas jumlah penduduk secara keseluruhan maka pada waktu tersebut, persentase penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai kira-kira 55 dan 57 persen. Dengan demikian, lebih dari separuh penduduk Indonesia akan berada di wilayah perkotaan dan akan terus meningkat di masa-masa mendatang.

Tabel 4.5.
Proyeksi Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan
Di Indonesia, 2000-2025

Tahun	Jumlah	Proporsi (%)
2000	87.577,1	41,80
2005	102.534,1	46,01
2010	116.481,0	49,55
2015	129.245,3	52,60
2020	140.309,9	55,19
2025	150.052,0	57,39

Sumber: Ananta dan Anwar (1994)

Menurut Firman (1996), karakteristik dan perkembangan urbanisasi di Indonesia cenderung didominasi oleh Pulau Jawa, baik dari segi jumlah absolut, proporsi maupun pangsa. Pada tahun 1994 proporsi penduduk perkotaan di Jawa hampir mencapai 40 persen, sementara di wilayah luar Jawa baru mencapai 26 persen saja. Namun seiring berjalannya waktu, tampak ada peningkatan pangsa penduduk perkotaan di luar Jawa. Indikasi dari fakt ini adalah munculnya beberapa wilayah aglomerasi perkotaan di luar Jawa seperti Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang) di Sumatera. Di Indonesia Bagian

Timur bahkan muncul wilayah metropolitan Sarbagita dengan Kota Denpasar sebagai wilayah intinya dan dikelilingi oleh Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan. Demikian juga di Sulawesi Selatan muncul wilayah metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai wilayah inti yang dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten Takalar, Goa dan Maros.

Dari sejumlah wilayah metropolitan yang ada di Indonesia, tampaknya wilayah JABODETABEK merupakan wilayah terbesar dan ‘tertua’ di Indonesia. Perkembangan wilayah metropolitan JABODETABEK sesungguhnya telah terjadi sejak tahun 1980-an dimana Pemerintah menerapkan dekonsentrasi planologis dengan menetapkan wilayah-wilayah pinggiran Kota Jakarta. Ketika itu wilayah-wilayah pinggiran Jakarta baru meliputi kabupaten-kabupaten bogor, Bekasi, dan dan Bekasi. Angka urbanisasi di ketiga wilayah ini baru mencapai masing-masing sekitar 25, 16 dan 15 persen.

Terlepas dari perbedaan definisi wilayah urban yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada tahun 1980 Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah inti sudah memiliki angka urbanisasi sebesar hampir 94 persen dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 1995 hingga saat ini. Hal yang sama juga terjadi pada bagian-bagian wilayah DKI Jakarta seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Sementara itu wilayah-wilayah pinggiran DKI Jakarta juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah penduduk secara absolut maupun angka urbanisasi. Perkembangan angka urbanisasi terlihat jelas manakala perbandingan data tahun 2000 dan 2005 dicermati, karena kedua tahun ini memiliki kriteria wilayah urban yang sama. Untuk wilayah Kabupaten Bogor, persentase urban mengalami sedikit penurunan dari 57,4 persen menjadi 57 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya perluasan wilayah kabupaten ini dimana bagian yang diperluas ini masih terklasifikasi sebagai wilayah perdesaan. Hal yang sama juga terjadi di Kota Bekasi dari 97,5 persen pada tahun 2000 menjadi 97,3 persen di tahun 2005; dan Kota Depok dari 98 persen pada tahun 2000 menjadi 97,4 persen di tahun 2005. Kedua wilayah kota ini mengalami perluasan wilayah dimana bagian perluasan ini masih merupakan wilayah perdesaan.

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Perkotaan di JABODETABEK

Kabupaten/kota	1980		1995		2000		2005	
	Total Penduduk	% Perkotaan	Total Penduduk	% Perkotaan	Total Penduduk	% Perkotaan	Total Penduduk	% Perkotaan
Kepulauan Seribu	—	—	—	—	—	—	18,644	100.0
Jakarta Selatan	1,579,795	97.0	2,041,025	100.0	1,784,044	100.0	2,001,353	100.0
Jakarta Timur	1,456,750	84.3	2,383,394	100.0	2,347,917	100.0	2,391,166	100.0
Jakarta Pusat	1,236,876	100.0	978,894	100.0	874,595	100.0	889,448	100.0
Jakarta Barat	1,231,188	92.0	2,146,824	100.0	1,904,191	100.0	2,093,013	100.0
Jakarta Utara	976,045	96.5	1,562,515	100.0	1,436,336	100.0	1,445,623	100.0
DKI Jakarta	6,480,654	93.7	9,112,652	100.0	8,347,083	100.0	8,839,247	100.0
Kab. Bogor	2,493,843	25.6	4,415,195	65.4	3,502,098	57.4	3,829,053	57.0
Kab. Bekasi	1,143,463	16.5	2,757,376	77.5	1,665,490	57.9	1,983,815	64.1
Kab. Tangerang	1,529,024	14.9	2,401,216	52.4	2,781,428	69.8	3,259,063	70.3
Kota Bogor	246,946	100.0	285,114	100.0	747,842	99.5	891,467	100.0
Kota Tangerang	—	—	1,188,102	82.1	1,325,854	100.0	1,451,595	100.0
Kota Bekasi	—	—	—	—	1,657,512	97.5	1,993,478	97.3
Kota Depok	—	—	—	—	1,141,416	98.0	1,374,903	97.4

Sumber: BPS (berbagai tahun)

Kecenderungan ke depan migrasi penduduk baik antar wilayah, antar desa kota maupun migrasi non permanen masih akan meningkat terus dimasa depan, meskipun arah dan arus migrasi tersebut berubah. Daerah yang sudah jenuh menerima arus migrasi masuk, secara alamiah akan mengalami peningatan migrasi keluar menuju ke wilayah-wilayah yang secara ekonomi masih menguntungkan. Zelinsky mengatakan bahwa pada transisi mobilitas tahap akhir, penduduk lebih banyak melakukan mobilitas non permanen untuk jarak yang lebih jauh. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan menyebabkan manusia tidak perlu lagi melakukan mobilitas keruangan, karena semuanya dapat dilakukan di satu tempat tetapi berhubungan secara luas dengan berbagai belahan bumi ini.

4.5 KEBIJAKAN PEMERINTAH

Proses urbanisasi dan arus migrasi desa kota tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di bidang pembangunan baik fisik maupun kebijakan kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan untuk menyusun kebijakan mobilitas penduduk adalah mengapa penduduk melakukan perpindahan? Banyak teori yang membahas tentang sebab/alasan seseorang pindah dari tempat asalnya, sebagian besar mengatakan bahwa perpindahan penduduk disebabkan oleh faktor ekonomi (Todaro, Taylor (1968) dan Stark (1991) sebagaimana dikutip Tjiptoherijanto (2000) mengatakan bahwa migrasi bukan hanya dipengaruhi oleh perbedaan tingkat upah dan lapangan kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keputusan bermigrasi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keputusan keluarga berada pada posisi yang lebih mampu menangani resiko ekonomi rumah tangga seperti misalnya alokasi tenaga kerja. Pembagian tenaga kerja yang tetap berada di daerah asal dan yang bermigrasi digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalisasi kerugian yang mungkin terjadi.

Tjiptoherijanto (2000) menuliskan bahwa pembangunan makro ekonomi Indonesia pada tahun 1967 – 1980, yang dilakukan dengan kombinasi kebijakan substitusi impor dan investasi asing di sektor manufaktur, telah menyebabkan polarisasi pembangunan yang terpusat di wilayah Metropolitan Jakarta. Sumbangan DKI Jakarta dan Jawa Barat pada pertumbuhan sektor manufaktur meningkat dari 38 persen pada tahun 1974 menjadi 42 persen pada tahun 1979. Akibatnya arus migrasi masuk dari berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta Banten dan berbagai wilayah di Sumatra dan pulau-pulau lainnya semakin besar ke wilayah ini.

Untuk mengatasi persoalan ini kemudian ditetapkan kebijakan penyediaan perumahan di wilayah BODETABEK, untuk menyediakan kebutuhan perumahan bagi penduduk JABODETABEK. Pembangunan perumahan ini ternyata telah mampu menurunkan laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dari 5,6 persen pertahun menjadi hanya sekitar 1 persen per tahun, namun akibatnya laju pertumbuhan penduduk wilayah BODETABEK meningkat lebih cepat khususnya Depok, Kota Bekasi dan Kota Tangerang. Meskipun banyak himbauan untuk tidak datang ke JABODETABEK, namun kebijakan untuk terus membangun berbagai infrastruktur perkotaan tetap menjadi daya tarik penduduk untuk masuk ke wilayah ini. Hal lain yang juga menjadi daya tarik adalah ketika mudik pada hari raya Idul Fitri, semua

pemberi layanan publik di Jakarta memanjakan pendatang dengan menyediakan transportasi umum untuk mengantarkan pemudik ke daerah asal masing-masing.

Selain kebijakan pembangunan infrastruktur, pemerintah JABODETABEK telah menyusun peraturan daerah yang mengatur administrasi kependudukan. DKI Jakarta pernah memberlakukan Jakarta Kota Tertutup pada tahun 1970-an, yang hanya memperbolehkan penduduk yang memiliki KTP DKI Jakarta yang boleh menetap di wilayah ini. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rasio pendatang, yang kemudian dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Namun, kebijakan ini kemudian tidak lagi populer karena penduduk tetap berdatangan dengan cara apapun. Operasi pendatang disatu sisi dan kemudahan memperoleh kartu identitas disisi yang lain melalui jalur-jalur tidak resmi, menyebabkan penduduk tetap berdatangan.

Berbagai persyaratan telah diterapkan bagi pendatang untuk memperoleh identitas kependudukan dengan antara lain surat pindah dari daerah asal, surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan bebas G30S/PKI, surat jaminan tempat tinggal, surat jaminan bekerja dan harus membayar jaminan 2 kali biaya transportasi ke daerah asal. Biaya jaminan ini akan dikembalikan bilamana penduduk yang bersangkutan gagal berusaha di DKI Jakarta. Aturan ini kemudian juga diterapkan di wilayah BODETABEK, namun ternyata tidak efektif untuk menahan laju perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Dengan ditetapkannya UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap penduduk dikenakan kewajiban untuk melaporkan diri dimanapun dia berada. Penduduk juga diberi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang unik, tunggal dan berlaku seumur hidup. Dengan NIK tersebut diharapkan semua penduduk bisa menggunakan untuk memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dimanapun berada. Namun penggunaan NIK harus dibarengi dengan penyempurnaan system pelayanan administrasi kependudukan yang *online* antarkabupaten/kota dan antarkabupaten/kota dengan pusat. Dengan cara seperti ini, maka keberadaan seseorang akan terdeteksi dan tidak lagi muncul KTP ganda.

Sampai saat ini system pendaftaran penduduk belum online antar kabupaten/kota, tetapi sebagian sudah online dengan pusat. Diharapkan melalui pendataan semacam ini akan diketahui secara pasti jumlah penduduk JABODETABEK yang syah sebagai penduduk, dan penduduk yang dianggap

tidak syah sebagai penduduk JABODETABEK. Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan baru dibidang pengarahannya mobilitas penduduk.

BAB 5

DAMPAK MIGRASI DAN URBANISASI

5.1 DAMPAK TERHADAP KONDISI DEMOGRAFI DAN SOSIAL

Terjadinya arus migrasi yang terjadi di wilayah JABODETABEK memiliki keterkaitan dengan proses urbanisasi yang terjadi wilayah bodetabek itu sendiri. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk di wilayah bodetabek, berimplikasi pada makin meningkatnya persentase penduduk wilayah perkotaan sebagaimana telah di bahas pada Bab 4.

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah pinggiran DKI Jakarta menunjukkan terjadinya arus migrasi keluar DKI Jakarta menuju wilayah-wilayah pinggiran ini. Namun perpindahan penduduk tersebut ternyata tidak dibarengi dengan perpindahan tempat kerja dan fasilitas publik yang memadai. Kondisi ini kemudian memberikan implikasi kepada terjadinya mobilitas non permanen, terutama mobilitas ulang alik (*commuting*). Adanya mobilitas non permanen ini memunculkan istilah penduduk siang dan penduduk malam terutama di wilayah DKI Jakarta.

Pada tabel di bawah ini bahwa penduduk siang di DKI Jakarta lebih besar daripada penduduk malamnya. Selisih antara penduduk siang dan penduduk malam ini merupakan pelaku mobilitas ulang alik, yaitu sebesar 1,9 juta orang atau sekitar 13,45 persen. Sebaliknya jumlah penduduk siang di wilayah-wilayah pinggiran DKI Jakarta terlihat lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang terdata secara formal. Selisih antara penduduk siang dan penduduk terdata merupakan pelaku ulang alik dari wilayah pinggiran ke wilayah inti di DKI Jakarta.

Tabel 5.1
Jumlah Pelaku Komuter di JABODETABEK, 2005

Kab/Kota	# Penduduk	# Komuter	% Komuter	Penduduk Siang
Kep. Seribu	18 644	40	0.23	
DKI Jakarta	8 860 381	1 092 538	13.45	10 051 369
Kab Bogor	3 835 563	230 791	6.76	3 704 653
Kab Bekasi	1 985 145	217 108	12.04	1 841 333
Kota Bogor	898 492	75 442	9.14	844 834
Kota Bekasi	1 997 525	382 636	20.65	1 655 676
Kota Depok	1 378 937	327 085	26.52	1 079 084
Kab Tangerang	3 262 727	184 316	6.24	3 158 905
Kota Tangerang	1 455 185	149 645	11.40	1 338 100
Bodetabek	14 813 574	1 567 023	11.70	13 622 586
JABODETABEK	23 673 955	2 659 561	12.36	23 673 955

Sumber: Handiyatmo (2009)

Tabel 5.1. memperlihatkan persentase pelaku ulang alik menurut wilayah kabupaten/kota. Terlihat bahwa penduduk Kota Depok merupakan pelaku komuter terbesar (26 persen) di antara penduduk wilayah lainnya di JABODETABEK, meskipun dari segi absolut jumlahnya tidak sebanyak penduduk Kota Bekasi yang menempati urutan kedua dalam hal proporsi.

Implikasi dari fenomena ulang alik ini adalah makin meningkatnya jumlah kendaraan yang mengalir dari wilayah pinggiran ke wilayah inti pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hingga malam hari. Hal ini berdampak pada kemacetan lalu lintas yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Berdasarkan analisis data Sakernas 2008, Sahara (2010) menghitung rata-rata waktu tempuh perjalanan antara tempat tinggal ke tempat bekerja para pelaku mobilitas ulang alik berkisar antara 30 menit hingga 1 jam (Sahara, 2010). Namun secara intuitif, waktu tempuh antara daerah pinggiran Jakarta dengan pusat kota inti di JABODETABEK pada pagi hari ataupun sore hari bisa menghabiskan waktu 2,5 jam di perjalanan.

Lamanya waktu tempuh di perjalanan dalam kehidupan sehari-hari membuat para pekerja hampir tidak lagi memiliki waktu untuk bersosialisasi di lingkungan keluarga maupun tempat tinggal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chotib (2012) menemukan bahwa semakin lama perjalanan dari rumah tempat tinggal di Kota Depok ke tempat bekerja, semakin rendah kohesi sosial di tempat tinggal para pekerja tersebut. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kohesi sosial di lingkungan tempat tinggal antara para pekerja migran dan non migran di Kota Depok, dimana para pekerja migran memiliki tingkat kohesi sosial yang lebih rendah dibanding pekerja non migran.

Rendahnya tingkat kohesi sosial di wilayah pinggiran Jakarta terlihat dari ketidakpedulian warga masyarakat dengan sesama warga lain di lingkungan tempat tinggal. Dampak yang sangat berbahaya atas rendahnya tingkat kohesi/solidaritas sosial di wilayah pinggiran Jakarta seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme untuk melakukan rencana aksi-aksi mereka di tengah permukiman masyarakat. Beberapa contoh mutakhir menjadi berita penting ketika ditemukannya bahan peledak di rumah kontrakan di Bekasi, beberapa kali di Kota Depok dan termasuk juga di tengah Kota Jakarta.

Nasution (2009) mengemukakan masyarakat desa transisi (daerah pinggiran wilayah metropolitan) memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) terjadinya tumpang tindih antara nilai-nilai tradisional dan proses modernisasi. Pada satu sisi nilai-nilai modern yang mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat desa untuk meninggalkan nilai-nilai tradisional seperti solidaritas sosial dan gotong royong; (b) masyarakat menjadi heterogen, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan kepercayaannya; (c) terjadinya pembangunan perumahan baru di desa pinggiran yang tidak memerhatikan kondisi masyarakat sekitar, mengakibatkan bisa terjadinya pertentangan antara nilai-nilai yang dibangun masyarakat pendatang dengan masyarakat asli, dan kecemburuan sosial; (d) kawasan desa pinggiran kota merupakan tempat bertumbuhnya kawasan-kawasan industri, perdagangan dan perumahan bisa memberikan dampak positif, yakni memberikan kesempatan kerja non pertanian bagi masyarakat di wilayah tersebut; (e) masyarakat desa mengalami peralihan dari mata pencaharian di bidang agraris menuju mata pencaharian yang bersifat non agraris.

Di samping memiliki dampak yang negatif, ternyata para migran dan disertai dengan proses urbanisasi memiliki dampak yang positif terhadap daerah tujuan yang ditempati. Wulandari (2012) memperlihatkan adanya

tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi pada para migran, khususnya yang telah memiliki karir puncak di tempat kerjanya di Kota Depok.

Para migran yang umumnya relatif lebih sejahtera dan memiliki pekerjaan di sektor formal biasanya membawa nilai-nilai positif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah (2011) berdasarkan data SUPAS 2005 yang melihat adanya perbedaan fertilitas yang lebih rendah pada penduduk migran dibanding non migran. Dalam hubungan antara migrasi dan fertilitas, Nasrullah (2011) mengemukakan beberapa teori yang menjelaskan perbedaan tersebut, yaitu:

1. *Social Disorganization Theory*

Teori ini menyatakan bahwa migrasi desa-kota disebabkan secara mendasar oleh faktor-faktor pendorong atau karena tekanan penduduk asal. Selanjutnya, migran diidentikkan dengan kemiskinan, buta aksara, dan tidak memiliki keahlian tertentu. Kondisi ekonomi daerah perkotaan sedikitnya memberikan harapan bagi mereka. Mereka kemudian cenderung tidak terorganisir secara sosial. Akibatnya, norma-norma tradisional perdesaan terbawa ke perkotaan, termasuk dalam hal pembatasan jumlah anak (fertilitas). Sehingga, fertilitas mereka jauh lebih tinggi daripada penduduk perkotaan dan bahkan lebih tinggi daripada fertilitas penduduk non migran di daerah asal.

2. *Assimilation Theory*

Teori ini menyatakan migran desa-kota berasimilasi ke dalam budaya urban terlepas dari setiap selektivitas atau efek isolasi masyarakat migran di perkotaan. Dibutuhkan waktu, bagaimanapun, sebelum migran melepaskan nilai-nilai budaya perdesaan dan menggantikannya dengan nilai-nilai urban, termasuk nilai-nilai tentang ukuran keluarga (*family size*). Oleh karena itu, selama tahun-tahun pertama segera setelah perpindahan, migran desa-kota meneruskan pola fertilitas perdesaan mereka ke perkotaan. Hasilnya adalah tingkat fertilitas migran desa-kota adalah rata-rata fertilitas antara penduduk perdesaan (non migran) dan penduduk pribumi perkotaan.

3. *Social Mobility Theory*

Teori ini mengatakan bahwa migran desa-kota adalah perpindahan yang selektif ke strata yang lebih tinggi secara sosial yang

menyebabkan mereka pindah ke kota. Oleh karena itu, mereka mengadopsi norma-norma budaya perkotaan, termasuk tentang keluarga kecil. Mereka sangat termotivasi untuk menjadi seperti penduduk pribumi perkotaan untuk pindah strata sosial yang lebih tinggi dalam sistem stratifikasi sosial perkotaan. Akibatnya, mereka mempunyai fertilitas rendah, bahkan lebih rendah daripada penduduk pribumi perkotaan.

5.2 DAMPAK EKONOMI

Dampak ekonomi migrasi tidak hanya terjadi di daerah tujuan melainkan juga di daerah asal migran. Di daerah asal migran, migrasi keluar akan menyebabkan penduduk usia kerja cenderung berkurang dan yang tinggal cenderung penduduk muda atau penduduk tua. Tenaga kerja potensial akan berupaya untuk mencari pekerjaan di daerah tujuan migran yang mempunyai ekspektasi akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya proporsi tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi yang lebih baik bisa lebih banyak di daerah JABODETABEK. Dari segi ekonomi, tenaga kerja yang berkualitas tentunya mempunyai produktifitas yang lebih baik dan bisa mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Sebaliknya kelangkaan tenaga kerja yang berkualitas di daerah asal migran akan menyebabkan produktifitas tenaga kerja masih belum mampu mengejar ketertinggalanya dengna produktifitas di tenaga kerrrja daerah tujuan. Implikasinya upah di daerah tujuan migran akan lebih baik dibandingkan dengna upah di daerah tujuan migran.

Migrasi dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat sebagai sesuatu yang bisa dinilai positif karena migrasi bagi daerah asal akan menambah tenagakerja atau meningkatkan supply tenagakerja. Bagi sektor-sektor yang memerlukan tenagakerja, maka penambahan tenagakerja akan meningkatkan ouput dalam perekonomian. Pada sektor-sektor yang relatif labor intensif seperti sektor perdagangan dan beberapa sub sektor di industri pengolahan akan banyak diuntungkan karena tidak mengalami kesulitan tenaga kerja. Hal ini yang mendorong sektor industri dan perdagangan tumbuh berkembang di JABODETABEK.

Banyaknya migran yang masuk ke JABODETABEK bisa menyebabkan pekerja sektor informal non pertanian menjadi semakin banyak. Hal ini disebabkan karena migran yang tidak atau yang belum terserap di sektor formal di wilayah JABODETABEK akan mengawali kegiatan di pasar kerja di sektor informal seperti usaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap atau

mereka sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Ketika ada kesempatan untuk masuk kerja di sektor formal sebagai buruh/karyawan maka mereka akan segera masuk bekerja di sektor formal yang biasanya mempunyai upah, dan jaminan sosial dan serta jaminan hidup yang lebih baik. Namun manakala mereka tidak terserap di pasar kerja formal, maka mereka tetap bekerja di sektor informal.

Migrasi mempunyai konsekuensi pada biaya yang harus ditanggung oleh migrant dibandingkan dengan jika mereka tinggal di daerah asal. Biaya ekonomi yang harus ditanggung antara lain biaya transportasi dari daerah asal dan daerah tujuan, perbedaan biaya hidup antara daerah tujuan dengan daerah asal. Apabila biaya migrasi masih lebih besar dengan ekspektasi yang diterima maka migrant akan tetap tinggal di daerah tujuan. Dengan semakin bertambahnya migrant, maka akan bertambah juga kebutuhan akan perumahan. Biasanya dalam tahun-tahun awal migrasi, para migrant tinggal di tempat relasi atau tinggal di rumah kontrakan atau kost-kostan. Permintaan yang semakin meningkat pada sektor perumahan ini membuat para pemilik uang berupaya untuk membuka usaha kontrakan sehingga menjadi sumber pendapatan. Pemilik kost-kostan tersebut juga sebenarnya migrant yang sudah lama menetap dan kondisi ekonominya lebih mapan sehingga mereka menginvestasikan uang mereka untuk membeli lahan-lahan untuk kemudian dibangun rumah.

Permintaan akan perumahan yang semakin meningkat akibat migrant yang masuk ke JABODETABEK memerlukan fasilitas tempat tinggal, sementara luas lahan semakin langka, maka hal ini akan menyebabkan harga lahan menjadi semakin mahal dan implikasinya harga rumah atau sewa rumah menjadi semakin mahal. Kemungkinan rasio sewa rumah antara daerah Jabodetabek dengan daerah asal migrant menjadi semakin membesar. Untuk mengatasi kelangkaan peningkatan harga perumahan dan tanah serta untuk lebih meningkatkan daya tampung penduduk di lahan yang terbatas, diperlukan upaya untuk membenahi perumahan baik dengan pembangunan rumah bertingkat maupun perbaikan kampung-kampung kumuh agar menjadi daerah yang layak huni.

5.3 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

Migrasi dan proses urbanisasi yang sangat pesat di kawasan JABODETABEK membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi positif diantaranya adalah perkembangan perkotaan yang menjadi barometer

pertumbuhan kota-kota metropolitan lain di Indonesia. Selain itu, penduduk yang ikut tinggal baik permanen maupun sementara bisa berfungsi sebagai *agent of change* bagi warga di daerah asalnya masing-masing. Namun demikian, dampak negatifnya juga ada terutama terhadap lingkungan baik social maupun lingkungan fisik.

Jumlah penduduk JABODETABEK dengan luas sekitar 664 km² (0,04% wilayah Indonesia) didiami tidak kurang dari 28 juta orang pada tahun 2010. *United national Councill for Human Settlement* menyatakan bahwa pada tahun 1980 Jakarta masih urutan ke 21 kota terbesar di dunia, namun pada tahun 2000 naik menjadi urutan ke 14 dan pada tahun 2010 Jakarta berada diurutan ke 10 dengan jumlah penduduk 15,3 juta. Perkiraan ini ternyata meleset karena jumlah penduduk Jakarta tahun 2010 hanya mencapai 9,4 juta jiwa.

Jumlah penduduk yang besar, lahan yang tidak bertambah menyebabkan adanya persaingan penggunaan lahan, baik untuk pemukiman maupun untuk pusat-pusat bisnis dan perkantoran. Kebijakan pemerintah DKI Jakarta pada masa lampau adalah menggusur pemukiman-pemukiman padat penduduk untuk dialihfungsikan sebagai pusat bisnis maupun pemukiman mewah. Sebagai contoh adalah Kemayoran, Kelapa Gading, Sunter dan lain sebagainya. Sementara beberapa pemukiman padat dan kumuh masih terus bertahan di DKI Jakarta dan wilayah penyangganya. Kebijakan pemerintah DKI untuk memindahkan penduduk di pemukiman kumuh ke perumahan susun sewa maupun milik, seringkali terkendala dengan ulah beberapa oknum, yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memperoleh fasilitas dan kemudian menjualnya ke pihak-pihak lain. Sementara oknum tersebut kembali tinggal di pemukiman kumuh. Selain persoalan tersebut pembangunan rumah-rumah susun untuk kelompok masyarakat bawah masih belum setara dengan kebutuhan akan perumahan tersebut.

Pemukiman kumuh yang berada di tanah-tanah illegal atau pemukiman informal perkotaan juga merupakan dampak dari migrasi masuk ke wilayah Jabodetabek. Pemukiman semacam ini banyak yang berdiri diatas lahan bukan milik sendiri tetapi lahan pemerintah, perusahaan maupun lahan-lahan yang secara fisik tidak diperuntukkann bagi bangunan seperti bantaran sungai, daerah rawan bencana maupun diatas rawa-rawa yang berfungsi sebagai tempat luapan air Jakarta. Tris Eryando, dkk (2011) menemukan bahwa 63 persen RW kumuh dibangun diatas lahan bukan milik sendiri tetapi milik institusi atau lahan terbengkalai.

Pemakaian tanah-tanah milik institusi terjadi karena lahan di Jakarta sudah sangat mahal sementara pengawasan penggunaan tanah tidak ada sehingga rumah-rumah tidak legal tumbuh secara sporadic. Pemanfaatan tersebut terjadi karena sebagian besar migran masuk berada pada kondisi ekonomi yang lebih rendah. Tulus Tambunan dari LP3E Kadin Indonesia dalam makalah “*Urban Poverty, Informal Sektor and Poverty Alleviation Policies in Indonesia*” (KOMPAS, 2005), juga menyebutkan sumber utama kemiskinan di perkotaan adalah kemiskinan dan kemunduran ekonomi di perdesaan. Karena ekonomi perdesaan didominasi oleh pertanian, maka sumber utama kemiskinan perdesaan adalah sektor pertanian yang dulu menjadi rumah bagi 70 persen penduduk Indonesia.

Hidup dalam lingkungan yang padat dan kumuh menyebabkan penurunan kondisi lingkungan, karena pada umumnya wilayah seperti ini tidak banyak sirkulasi udara, *septic tank* yang berdekatan dengan sumber air bersih serta kekurangan infrastruktur pemukiman berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakatnya baik fisik maupun mental. Secara fisik penyakit ISPA, TB, kulit, diare dan cacingan menjadi penyakit yang umum ditemukan pada wilayah seperti ini terutama anak-anak. Sementara dari sisi mental, anak-anak yang tumbuh di wilayah ini seringkali bermasalah akibat tidak adanya area bermain dan bersosialisasi secara wajar. Kasus narkoba, kasus kriminal dan lain sebagainya banyak ditemukan di wilayah ini.

Kebutuhan air bersih juga menjadi salah satu hal yang mulai terasa akhir-akhir ini. Intrusi air laut telah masuk ke wilayah daratan bahkan sampai kekawasan Monas dan Senen, sehingga masyarakat semakin sulit memperoleh air bersih. PDAM DKI Jakarta terpaksa harus mengolah air sungai yang sudah tercemar baik oleh cemaran rumah tangga maupun industry, sehingga memerlukan banyak bahan kimia untuk menjadikan air tersebut sebagai sumber air bersih yang layak minum. Memang di kawasan pemukiman elit Pantai Indah Kapuk yang terletak di patai utara Jakarta sudah berhasil mengolah air laut menjadi air layak minum, namun upaya tersebut masih terbatas untuk lingkungan pemukiman tersebut.

Pembangunan sarana dan prasarana fisik yang meningkat cepat juga menyebabkan penurunan tanah di Jakarta yang mencapai 10 – 20 cm per tahun. Kasus jalan RE Martadinata di Jakarta Utara yang amblas sepanjang 120m, kemudian penurunan dermaga Muara Angke seluas 400m yang mengalami penurunan 20 cm. Yayat Supriyatna (www.indosiar.com/fokus/penurunan-permukaan-tanah-jakarta-kian-parah_87658), mengatakan bahwa penurunan

tanah di Jakarta sudah semakin parah, hal ini terlihat dari nampaknya gedung-gedung yang retak serta menurunnya sejumlah jalan di Jakarta. Eksploitasi air tanah hingga ke bagian terdalam untuk kepentingan hotel, gedung-gedung perkantoran dan perumahan apartemen semakin meningkat, karena peraturan untuk tidak menggunakan air tanah tidak diperhatikan baik oleh pengembang maupun pemerintah sendiri. Tris Eryando (2011) menemukan bahwa dari 38 RW yang diamati sebanyak 5 RW tidak terpenuhi kebutuhan air bersihnya sepanjang tahun. Kementerian kesehatan menetapkan bahwa standar rumah sehat harus memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vector penyakit dan tikus.

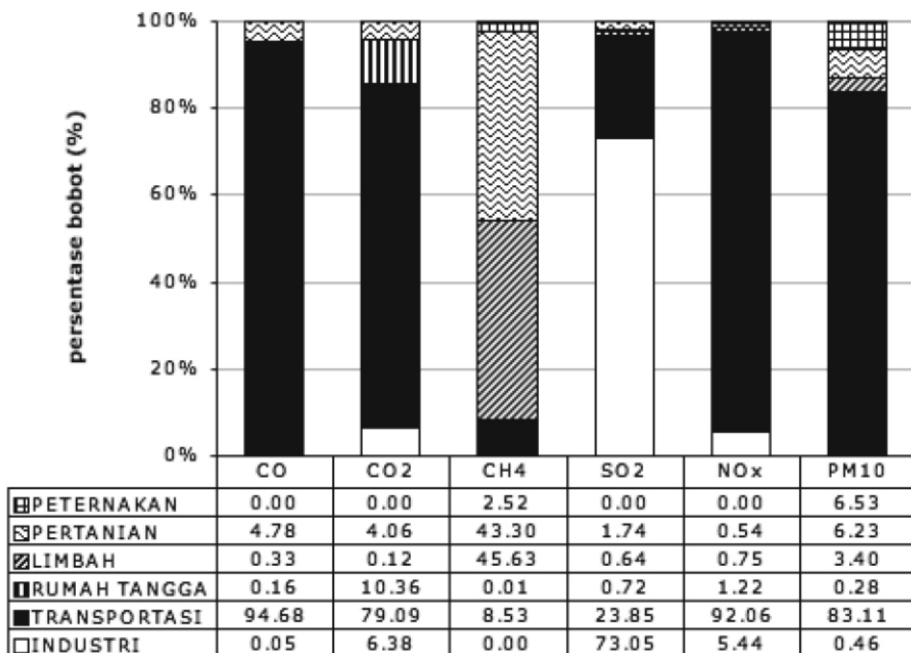
Menghilangnya ruang terbuka hijau sebagai akibat dari pembangunan mal dan apartemen terus terjadi di DKI Jakarta, sehingga mengurangi ruang untuk beekspresi dan bersosialisasi. Penggusuran pemukiman penduduk yang padat dan kumuh seringkali dilakukan atas dasar untuk membangun ruang terbuka hijau dan fasilitas public, namun kenyataannya yang dibangun adalah mall maupun perumahan mewah dan apartemen. Raung terbuka hijau banyak dipindahkan ke dalam mal dengan ukuran yang lebih kecil dan dibuat menjadi taman-taman palsu yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan seringkali bertentangan dengan ebutuhan masyarakat banya akan tempat-tempat rekreasi yang murah dan sehat seperti ruang terbuka hijau tersebut.

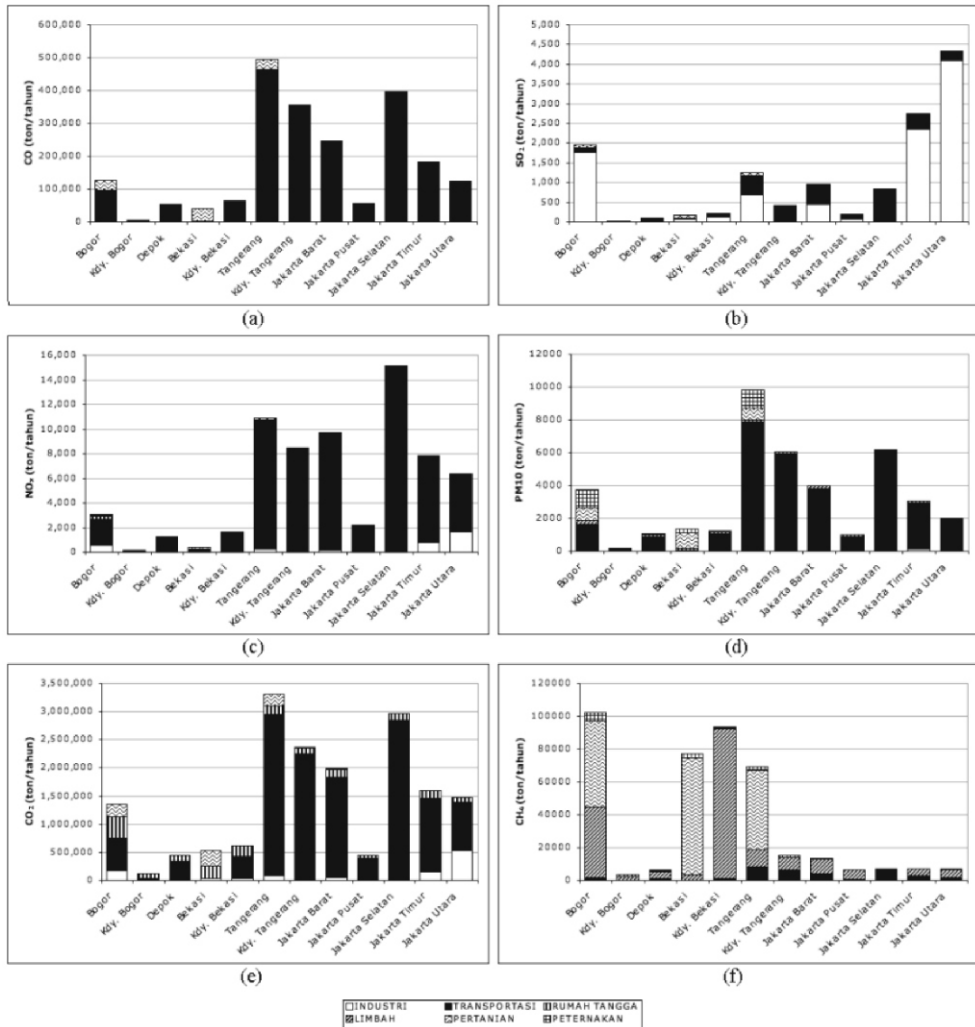
Pemukiman yang padat, ditambah dengan kerusakan lingkungan di wilayah Botabekpunjur karena pembangunan perumahan, juga mejadi salah satu penyebab rusaknya wilayah Jakarta. Banjir setiap tahun pasti terjadi di Jakarta, apakah itu banjir biasa maupun sikus banjir lima tahunan. Upaya untuk mengurangi banjir dengan pembangunan kanal-kanal baik kanal Barat maupun kanal Timur belum bisa mengurangi resiko banjir yang diakibatkan oleh limpahan air dari Depok, Bogor, Puncak dan Cianjur. Hal ini juga sudah mulai terasa di wilayah Bogor, Depok, Tangerang maupun Bekasi. Setiap tahun selalu muncul banjir di musim penghujan dan kesulitan air bersih di musim kemarau.

Di lain pihak pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan bermotor juga menyebabkan kerusakan lingkungan terutama pada kualitas udara di wilayah DKI Jakarta maupun wilayah penyangganya. Pencemaran udara akibat gas buangan kendaraan bermotor dan industry menyebabkan penipisan ozon, pemanasan global, persebaran penyakit paru-paru, jantung,

darah tinggi dan penyakit degenerative lainnya termasuk fungsi-fungsi reproduktif. Kandungan timbal di wilayah udara Jakarta sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan WHO, yaitu sebesar 2 mikrogram per meter kubik. Hasil pemantauan yang dilakukan BPLH Kota Bekasi menunjukkan kandungan gas karbondioksida yang ada di Rawa Panjang mencapai 30.861 μ gram per liter sudah melewati ambang batas baku mutu 30.000 μ gram per liter. Kendaraan bermotor tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga memicu agresi penduduk DKI Jakarta.

Gambar 5
Kontribusi tiap sektor Kegiatan Terhadap Total Emisi Pencemar Spesifik di JABODETABEK, 2008





Sumber: Hadiyha Asma Noor A dan Asep Sofyan, 2008

DK. Halim (2008) mengatakan bahwa peningkatan kendaraan bermotor memicu agresifitas penduduk DKI Jakarta dan wilayah BODETABEK. Selanjutnya dikatakan bahwa terjebak dalam kemacetan setiap hari tidak saja menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran tetapi juga biaya dalam bentuk uang. Dalam sebuah studi yang dilakukan stasiun televisi pada bulan Juli 2007, ditemukan bahwa rata-rata seorang karyawan yang bekerja di Jakarta dan tinggal di wilayah Bodetabek, dengan mengendarai sendiri menghabiskan kurang lebih 3 juta rupiah per bulan hanya untuk biaya transportasi, dengan

waktu tempuh kurang lebih 4 jam ulang alik di jalanan. Atinya setengah waktu kerja produktifnya dihabiskan dengan sangat tidak produktif. Lebih lanjut Hilman mengatakan bahwa Tahun 2006 indeks kepadatan sepeda motor di DKI Jakarta 2,6 artinya setiap 1 sepeda motor diperuntukkan bagi 2 – 3 penduduk. Namun di tingkat negara, Indonesia memiliki indeks kendaraan bermotor mencapai 10,2 diatas China (13,9), India (25) dan Singapura (37,85). Sampai dengan Maret tahun 2007 jumlah kendaraan yang beroperasi di Jakarta sebesar 5.498.869 dengan rincian 3.325.790 sepeda motor, 1.508.934 mobil penumpang, 407.845 mobil barang dan 256.300 bus.

Proses urbanisasi di JABODETABEK juga mengakibatkan pertumbuhan sampah yang luar biasa. Persoalannya pemerintah JABODETABEK belum memiliki tempat pembuangan sampah maupun tempat pengolahan sampah yang memadai. Sebagian besar tempat pembuangan sampah akhir di JABODETABEK merupakan tempat sampah terbuka. Penyediaan lahan untuk pembuangan sampah ini seringkali mengakibatkan konflik antar pemerintah daerah, karena salah satu pihak tidak mematuhi komitmen yang dibuat, misalnya TPA Bantar Gebang pernah akan ditutup oleh pemerintah Kota Bekasi.

Masalah lingkungan yang sering terjadi adalah kebakaran. Pemukiman padat dan kumuh, penggunaan listrik yang tidak aman dan kepedulian masyarakat yang rendah menjadi penyebab kebakaran tersebut. Data Dinas Kebakaran DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran (60%) terjadi karena arus pendek hubungan listrik. Selama Ramadhan dan 2010, tercatat 77 kasus kebakaran di DKI Jakarta, kemudian meningkat drastis pada ramadhan 2011 yaitu sebanyak 203 kasus. Selama tahun 2011 Jakarta mengalami peristiwa 890 kasus kebakaran (Kompasiana, 24 Agustus 2012). Pemanfaatan listrik tanpa dibarengi dengan pemakaian infrastruktur yang tidak standar, pencurian listrik dari aliran kabel induk maupun penggunaan diluar batas. Kasus kebakaran di DKI Jakarta dan wilayah Bodetabek pada umumnya terjadi di area padat penduduk, pemukiman sekitar pasar dan lain sebagainya.

Gambaran diatas ternyata tidak hanya dialami oleh DKI Jakarta, tetapi sudah merembet ke wilayah-wilayah Bogor, Depok, Tangerang maupun Bekasi. Pembangunan mal, perkantoran, pusat-pusat perdagangan dan pemukiman telah terjadi. Penduduk yang sebagian merupakan limpahan dari DKI Jakarta, yang tinggal di keempat wilayah ini sebagian besar masih bekerja di Jakarta dan sebagian masih berstatus sebagai penduduk DKI Jakarta.

5.4 DAMPAK TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN

DKI Jakarta sebagai ibukota negara beserta dengan lingkungan di sekitarnya merupakan barometer bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Oleh sebab itu pengamanan terhadap DKI Jakarta menjadi prioritas tertinggi dalam system pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai ibukota Jakarta dianggap sebagai pusat peradaban tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, kesenian, hukum dan keadilan, etika, estetika, maupun moral. Jakarta telah berkembang sedemikian rupa karena fungsinya sebagai pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi pasar dalam program pembangunan nasional. Dampak lain dari perkembangan ini, Jakarta bukan saja sebagai pusat peradaban, lebih dari itu Jakarta telah berkembang menjadi sebuah ibukota negara dengan berbagai masalah sosial yang berdampak pada kemerosotan peradaban dan derajat kemanusiaan manusia, kehancuran lingkungan, pemujaan terhadap uang secara berlebihan, dan kerakusan yang mencerminkan ungkapan kuno *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya).

Pertambahan jumlah penduduk yang besar meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun, serta tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi menyebabkan masalah social tersendiri seperti kriminalitas, kenakalan remaja, tawuran, penyerobotan tanah, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Munculnya hunian kumuh dan padat dengan menyerobot tanah-tanah milik negara, perusahaan maupun perorangan seringkali dibarengi dengan kekuatan illegal yang menjadi backing dari hal tersebut. Hunian padat, kumuh dan liar ini seringkali menjadi kantong-kantong kemiskinan yang dekat dengan persoalan kriminalitas, pelacuran, kenakalan remaja, kejahatan, obat-obatan terlarang maupun minuman keras.

Berbagai permasalahan sosial ini kian berkembang tidak terkendali diakibatkan ketidak mampuan daya dukung lingkungan perkotaan. Secara keseluruhan masalah-masalah tersebut juga turut mendorong terwujudnya lingkungan hidup perkotaan yang tidak kondusif bagi Jakarta. Bahkan dapat meresahkan karena berbagai persoalan terus menerus muncul, berkembang, dan menjadi laten dalam kehidupan masyarakat ibukota Jakarta. Persoalan ini kian pelik tatkala berhadapan dengan kondisi masyarakat Jakarta yang sangat heterogen Dengan demikian penanganan masalah-masalah yang muncul di Jakarta pun tidak bisa diseragamkan atau disamaratakan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, atau satu masalah dengan masalah lainnya.

Menurut Polda Metro Jaya (2012) dari sisi kriminalitas, di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat 4 empat katagori kejahatan. Pertama, kejahatan konvensional (pencurian, perampokan, perkelahian). Kedua, transnasional crime (kejahatan transnasional) yang terkadang lintas negara, seperti narkoba, illegal logging, terorisme, dan lainnya. Ketiga, kejahatan yang berkaitan dengan kerugian terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal mining, illegal fishing). Keempat, kejahatan yang berimplikasi pada masalah-masalah rasial. Sama seperti di daerah lain, kejahatan yang paling menonjol di Jakarta dari waktu ke waktu adalah kejahatan konvensional, khususnya kejahatan jalanan.

Keempat katagori kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang bersama permasalahan kontijensi yang muncul, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini. Dari analisa dan evaluasi yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya tersimpulkan bahwa di dalam wilayah hukum Polda Metrojaya (DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi) terdapat tiga permasalahan kontijensi yang patut diwaspadai. Yaitu permasalahan kontijensi yang disebabkan manusia, permasalahan kontijensi yang disebabkan alam. dan permasalahan kontijensi yang diakibatkan kerusakan infrastruktur.

Permasalahan kontijensi yang disebabkan manusia merupakan kejadian yang meresahkan dan menimbulkan ketakutan atau trauma masyarakat, sehingga dapat menghambat serta menghancurkan produktifitas masyarakat, Yang dapat dikategorikan sebagai permasalahan kontijensi yang disebabkan manusia adalah teror bom, konflik sosial, demonstrasi yang melibatkan masa besar, kerusuhan sosial, dan isu-isu sosial lainnya.

Teror bom adalah tindakan yang dilakukan para teroris untuk menghancurkan tata kehidupan sosial masyarakat, dengan menggunakan bahan peledak dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, harta benda, serta trauma berat bagi masyarakat. Teror ini bertujuan menjatuhkan kewibawaan pemerintah, baik di mata masyarakat maupun dunia. Sasarannya adalah masyarakat sipil dan tempat-tempat yang menjadi fasilitas diplomatik. Beberapa tahun terakhir ini terror bom banyak dilakukan untuk mengacaukan keamanan DKI Jakarta dan wilayah penyangga, beberapa teroris bahkan sudah ditangkap di wilayah Bekais dan Depok, namun terror ini masih akan terus berlangsung jika akar permasalahannya tidak ditangani dengan lebih baik. Bom di kedutaan Australia dan Hotel JW Marriot menunjukkan bahwa system keamanan DKI Jakarta masih rawan dan belum maksimal.

Hal lain yang juga mengganggu adalah demonstrasi yang melibatkan massa besar dalam konteks ini dikaitkan dengan adanya masalah politik, masalah keadilan, pekerjaan maupun yang berkaitan harkat dan martabat masyarakat banyak. Demonstrasi yang melibatkan masa besar dapat diprediksi adanya masalah politik, yang berkaitan dengan perburuhan, atau peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang dinilai controversial. Mekanisme demonstrasi dianggap sebagai suatu cara untuk menekan pemerintah melakukan apa yang dituntut oleh kelompok masa tersebut, dan ketika saluran aspirasi melalui cara ini tidak didapat, yang terjadi adalah kerusakan dan pengrusakan.

Sangat disadari bahwa kondisi lingkungan baik fisik maupun social telah menyebabkan potensi konflik diantara masyarakat DKI Jakarta. Kehidupan ekonomi yang sulit bagi kelompok masyarakat bawah, ruang yang semakin sumpek, serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagian masyarakat menyebabkan sifat agresifitas warga DKI Jakarta dan BODETABEK pada umumnya. Sebab setiap warga mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi yang dalam pemenuhannya dapat mengorbankan kepentingan warga lainnya. Tawuran antar kampung karena perebutan daerah kekuasaan preman, pasar narkoba maupun karena persoalan yang tidak jelas menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga JABODETABEK, tawuran antar pelajar, tawuran antar etnis bahkan agama terjadi akibat kurang berjalannya system hokum di wilayah ini.

Selain migrasi internal DKI Jakarta dan sekitarnya mulai banyak didatangi migrant internasional, baik yang akan bekerja di Indonesia maupun melakukan aktifitas perdagangan dan plesiran. Penduduk dari Taiwan, Korea, Jepang, Cina, Malaysia, Timur Tengah dan Afrika banyak berdatangan dan eringkali menimbulkan persoalan baru. Sebagian dari mereka datang membawa investasi, sehingga banyak pabrik-pabrik besar bermunculan di wilayah pinggiran Jakarta. Di kawasan Cibitung, Bekasi misalnya di awal 2006 saja sudah ada 2.000 pabrik. Sebagai daya dukung dari geliat perekonomian tersebut, bermunculan pula mal, hotel-hotel berbintang, dan berbagai tempat hiburan lainnya.

Potensi ekonomi ini menjadi penarik bagi masyarakat daerah maupun internasional untuk datang ke wilayah ini. Bagi pendatang dari luar negeri Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk-produk mereka. Sementara migrant internal ingin memanfaatkan peluang ekonomi dengan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh penduduk setempat seperti

kebutuhan tukang, sopir, ojek dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu saja menimbulkan dampak sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Polri sendiri sudah mengantisipasi dinamika perkembangan Jakarta dan wilayah penyanggahnya itu sejak dini. Sehingga di tahun 1980, Mabes Polri menetapkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Bekasi, Tangerang, dan Depok menjadi tanggungjawab Polda Metro Jaya dan bukan menjadi tanggungjawab Polda Jawa Barat lagi. Ini dilakukan agar mempermudah koordinasi pengendalian situasi kamtibmasnya.

Setelah Bekasi, Tangerang, dan Depok masuk menjadi wilayah hukum Polda Metro Jaya, jumlah penduduk yang harus dilindungi Polda Metro Jaya pun bertambah banyak. Saat ini total penduduk Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok yang harus diayomi Polda Metro Jaya lebih dari 19.580.074 jiwa. Tak mudah tentunya melayani sedemikian banyak penduduk dengan jumlah personil Polda Metro Jaya yang lambat pertambahannya, yakni saat ini 27.895 orang. Sementara kriminalitas dan gangguan keamanan serta stabilitas keamanan dan ketertiban (kamtibmas) menjadi ancaman serius bagi masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tahun 2002 *crime clock* di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami percepatan 14 detik, jika di bandingkan tahun 2001. Pada tahun 2002 *crime clock* terjadi setiap 15 menit 33 detik. Sementara *crime rate* (resiko penduduk terkena tindak pidana) tahun 2002 mengalami kenaikan 9,86 persen dibandingkan tahun 2001. Pada tahun 2002 itu jumlah tindak pidana (*crime total*) mencapai 34.270 kasus naik 2,96 persen dibandingkan tahun 2001, yang hanya terjadi 33.284 kasus. Dari waktu ke waktu ada 11 kejahatan yang sering terjadi di Jakarta, yakni pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, perjudian, pemerasan, pemerkosaan, narkoba, dan kenakalan remaja. Pada semester pertama 2006, jumlah ke 11 kejahatan itu di Jakarta sudah mencapai 9.148 kasus. Dari ke 11 kejahatan tersebut hanya empat ada yang menonjol, yaitu penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Di semester pertama 2006 jumlah kejahatannya sudah mencapai 3.564 kasus. Sedangkan pada semester dua 2004 jumlahnya mencapai 12.491 kasus dan semester dua 2005 melonjak menjadi 18.765 kasus.

Tabel 5.2
Peristiwa Kriminalitas JABODETABEK tahun 2006 dan 2008

Kejadian	2006	2008
Pembunuhan	107	67
Peganiayaan	2,649	1,963
pencurian dg pemberatan	7,571	5,531
Pencurian dengan kekerasan	2,032	982
Pencurian sepeda motor		9,041
Pembakaran/kebakaran	357	302
Pemerasan	1,236	361
Pemeriksaan	174	99
Kesusilaan	472	344
Penghinaan	445	306
Perjudian	1,191	690
Pengrusakan	504	381
penculikan	95	73
Penggelapan	3,762	2,995
penipuan	8,130	5,360
masalah tanah	409	206
Pemalsuan Surat	664	393
Unjuk rasa	1,296	1,218
Senjata api/bhn peledak	50	27
Senjata tajam	485	287
lain2	11,962	9,588
Total	43,591	40,214

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya

Saat ini, setidaknya ada empat ancaman kejahatan yang perlu diperhatikan yaitu Pertama, ancaman kriminalitas (kejahatan jalanan). Kedua, ancaman terorisme. Ketiga, ancaman kejahatan korupsi. Keempat, ancaman kejahatan narkoba. Semua kejahatan tersebut menjadi tuntutan masyarakat Jakarta agar jajaran Polda Metro Jaya, dapat mencegah dan mengatasinya. Bagi kalangan pengusaha yang hendak menanamkan investasinya di ibukota Jakarta tentunya selalu berharap adanya stabilitas kamtibmas dan jaminan kepastian hukum dari kalangan kepolisian.

BAB VI.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk JABODETABEK sangat tinggi, bukan disebabkan oleh pertumbuhan alamiah tetapi lebih banyak disebabkan oleh migrasi masuk ke wilayah ini. Meskipun demikian laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sebagai kota inti terus mengalami penurunan karena sebagian penduduk bermigrasi ke wilayah di seputar Bodetabek. Sementara laju pertumbuhan kawasan Bodetabek meningkat dan jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk nasional.
2. Migrasi masuk yang terjadi di JABODETABEK cenderung berasal dari daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah metropolitan tersebut seperti migran dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
3. Migrasi masuk yang terjadi di wilayah Bodetabek, hampir separuhnya berasal dari DKI Jakarta dengan alasan pindah karena ikut keluarga (suami/istri/orang tua/anak) dan karena perumahan. Sedangkan migran yang berasal dari luar JABODETABEK cenderung memiliki alasan pindah karena mencari pekerjaan.
4. Migrasi masuk ke wilayah Bodetabek dari DKI Jakarta tidak disertai dengan perpindahan tempat bekerja, sehingga menghasilkan pelaku ulang alik antara wilayah Bodetabek menuju DKI Jakarta dan sebaliknya.
5. Fenomena ulang alik di wilayah JABODETABEK menghasilkan kemacetan lalu lintas yang belum terpecahkan dan memberikan pola waktu tempuh yang semakin lama antara tempat tinggal (wilayah Bodetabek) dan tempat bekerja (DKI Jakarta).
6. Pola waktu tempuh yang semakin lama juga memberikan dampak pada makin rendahnya tingkat solidaritas dan kohesi sosial para

pekerja di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketidakpedulian antarsesama warga ini memberikan dampak yang negatif, salah satu di antaranya adalah memicu terjadinya aksi terorisme.

7. Di samping dampak negatif, dampak positif dengan adanya migran adalah peningkatan kesejahteraan dan proses pembangunan wilayah di Bodetabek serta terjadinya proses interaksi nilai-nilai positif di antaranya terjadinya penurunan fertilitas di wilayah yang didatangi.
8. Tingginya migrasi masuk dan proses urbanisasi yang cepat di kawasan JABODETABEK membawa dampak pada penurunan kualitas lingkungan baik fisik maupun social. Lingkungan fisik ditandai dengan meluasnya kawasan-kawasan yang padat dan kumuh dengan infrastuktur pemukiman yang rendah, banjir, kesulitan air bersih, polusi baik udara, air maupun suara. Kondisi ini mengakibatkan perubahan tingkah laku penduduk JABODETABEK menjadi lebih agresif dan kurang peduli akibat stress terhadap kesesakan dan kepadatan wilayah ini.
9. Dari sisi pertahanan dan keamanan, JABODETABEK menjadi barometer untuk tingkat nasional sehingga pengamanan wilayah menjadi prioritas utama dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman. Proses migrasi dan urbanisasi di wilayah ini telah mengakibatkan kesesakan dan kepadatan yang menyebabkan meningkatnya tindak kejahatan dan kriminalitas maupun terorisme.
10. Dari sisi kriminalitas, di wilayah hukum Polda Metro Jaya (yang meliputi kawasan JABODETABEK) terdapat 4 empat katagori kejahatan. Pertama, kejahatan konvensional (pencurian, perampokan, perkelahian). Kedua, transnasional crime (kejahatan transnasional) yang terkadang lintas negara, seperti narkoba, illegal logging, terorisme, dan lainnya. Ketiga, kejahatan yang berkaitan dengan kerugian terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal mining, illegal fishing). Keempat, kejahatan yang berimplikasi pada masalah-masalah rasial. Sama seperti di daerah lain, kejahatan yang paling menonjol di Jakarta dari waktu ke waktu adalah kejahatan konvensional, khususnya kejahatan jalanan

6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Alternatif untuk menangani masalah migrasi desa kota dan proses urbanisasi yang cepat di kawasan JABODETABEK antara lain adalah dengan:

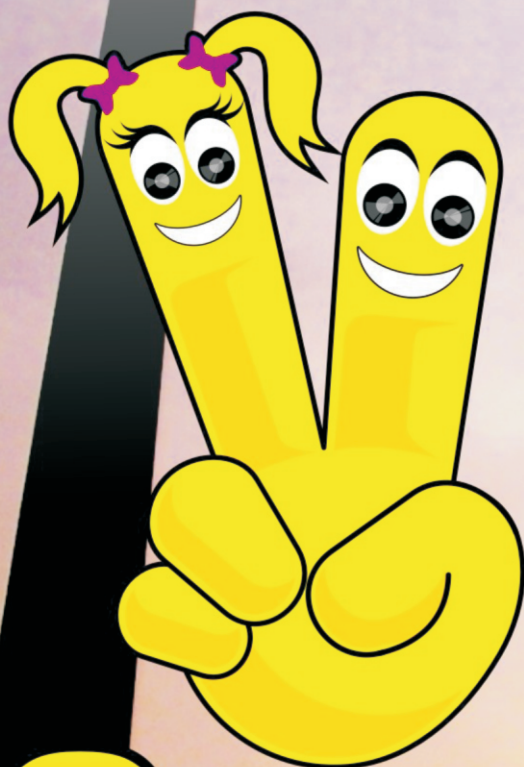
1. Proses migrasi masuk yang makin meningkat ke wilayah Bodetabek seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan nasional sehingga untuk mengalihkan perpindahan penduduk ini perlu dilakukan terus menerus pembangunan wilayah di luar JABODETABEK, khususnya di luar Jawa.
2. Antisipasi atas fenomena ulang alik yang menghasilkan kemacetan lalu lintas seyogyanya diatasi dengan peningkatan sarana transportasi massal murah, cepat dan aman serta dapat beroperasi hingga malam hari. Transportasi yang selama ini ada sudah harus diremajakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penduduk.
3. Berkurangnya tingkat solidaritas dan kohesi sosial di lingkungan tempat tinggal wilayah Bodetabek seharusnya memberikan inspirasi kepada para perencana pembangunan permukiman untuk selalu menyediakan fasilitas ruang publik sehingga proses interaksi sesama warga dapat terus-menerus berlangsung.
4. Untuk dapat memberikan dampak positif terhadap daerah yang dituju, perlu dilakukan selektifitas migran melalui penerapan tertib administrasi kependudukan. Sehingga setiap daerah harus memperkuat system pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, agar setiap penduduk memiliki Nomor induk Kependudukan yang unik, tunggal dan berlaku seumur hidup. Dengan system ini, seluruh orang akan terregister dengan baik dan data yang diperoleh dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Dan bagi penduduk, identitas kependudukan dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan public dimanapun dia berada. Selain itu pelaku mobilitas non permanen diwajibkan melapor di kantor registrar, bukan untuk mengganti KTP nya tetapi sekedar upaya untuk memantau keberadaan mereka.
5. Kebijakan tata ruang kota harus dipandang dalam perspektif nasional, bukan hanya daerah per daerah. Wilayah JABODETABEK merupakan suatu kesatuan kawasan yang saling mendukung saling mempengaruhi, sehingga perencanaan pembangunan seharusnya dilakukan secara bersama-sama dan dipatuhi oleh masing-masing pemerintah daerah.

6. Pembangunan wilayah perdesaan sebagai sentra-sentra ekonomi yang mampu menciptakan peluang kerja bagi warganya, sehingga arus migrasi bisa diturunkan.
7. Kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan pemantauan arus mobilitas baik permanen dan non permanen, pembangunan system informasi baik untuk peluang kerja, persyaratan yang dibutuhkan dan konsekuensi yang akan didapatkan jika migran yang masuk ke wilayah tertentu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibuat sehingga migrant bisa memilih dan memanfaatkan informasi tersebut ketika memutuskan untuk pindah.
8. Perlu revitalisasi peran BLK, khususnya BLKD di JABODETABEK untuk memberikan pelatihan secara gratis kepada para pendatang yang tidak memiliki keterampilan, sehingga tidak menjadi beban pemerintah kota di wilayah JABODETABEK.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotib. 2012. *Dampak Mobilitas Ulang Alik terhadap Kohesi Sosial di Komunitas Kota Depok*. Draft Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia.
- Djakapermana, Ruchiyat Deni, 2011. *Rencana Tata Ruang JABODETABEKpunjur: Upaya Menyeimbangkan Perumbuhan Ekonomi dengan Kelestarian Lingkungan Hidup*.
- Firman, Tommy. 1996. "Pola Urbanisasi di Indonesia: Kajian Data Sensus Penduduk 1980 dan 1990". Dalam Aris Ananta dan Chotib. *Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI dan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Halim, DK. 2008. *Psikologi Lingkungan Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Handiyatmo, Dendi. 2009. *Penggunaan Jenis Transportasi oleh Pelaku Mobilitas Ulang Alik di Enam Kawasan Metropolitan: Analisis Data SUPAS 2005*. Tesis Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Malang: UMM Press.
- Nasrullah. 2011. *Pengaruh Migrasi terhadap Fertilitas di DKI Jakarta*. Tesis Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.
- Polda Metro Jaya, 2012. www.metro.polri.go.id
- Rahmadi, Haryo Budi. 2011. *Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Pertahanan Keamanan*. Jakarta: BKKBN
- Saepudin, Asep. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi Risen Tenaga Kerja Masuk ke Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek): Analisis Data SUPAS 2005*. Tesis Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.

- Sahara, Idha. 2010. *Pola Waktu Tempuh Pekerja dalam Melakukan Mobilitas Ulang-Alik di Kota Metropolitan Indonesia Tahun 2008*. Tesis Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.
- Suselo, Hendropranolo. *JABODETABEK dan Turunannya Sepanjang Sejarah*
- Susetyo, Heru. 2011. *Dampak Kependudukan terhadap Kriminalitas dan Keamanan Individu*. Jakarta : BKKBN
- Todaro, Michael P. 1976. *Internal Migration in Developing Countries*. Geneva: International Labour Office.
- Wulandari, Sri Listianti. 2012. *Status Sosial Ekonomi dan Migrasi di Kota Depok: Analisis Data Sensus Penduduk 2010*. Tesis Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.



2Anak
CUKUP